

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
DI KABUPATEN SUMBA TIMUR**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

UMBU NDILU HAMANDIKA

NIM. 500009062

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2015

Abstract

Food security represents a priority in development in particular in Sub-Province of East Sumba. This region represents one of the areas which encounters food insecurity. This has made food security program is very needed at the Sub-Province of Sumba East. This Research aims at 1) understanding the external and internal factors affecting to food security in Sub-Province of Sumba East, and 2) formulating a strategy to promote food security in Sub-Province of Sumba East. This Research employs exploratory research with descriptive analysis, and formulation of strategy to promote food security by utilizing the SWOT method. Data is collected through respondents drawn by using purposive sampling. Data which have been collected from respondents are analyzed into three categories: external evaluation; Internal evaluation and SWOT analysis. The result shows that 1) the internal factor analysis and the external factor analysis at SWOT diagram located at the 4th quadrant in which its strategy recommendation is strategically diversified (locating in good condition but it still faces various incoming threat of environment). Another strategy is that improvement of governmental apparatus capability to use technology of processing local food, to develop policy with local government in particular in the field of price control and also other conditions which influence instability of food security system and progressively promote local organization to support local produces.

ABSTRACT**STRATEGI PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

**Umbu Ndilu Hamandika
(putraanawaru@gmail.com)**

Ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan. Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu daerah tapal kuda yang rawan pangan. Untuk itu peningkatan ketahanan pangan sangat diperlukan di Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) mengetahui faktor External dan Internal yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur, dan 2) merumuskan strategi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan analisis deskriptif, dan perumusan strategi peningkatan ketahanan pangan dengan analisis SWOT. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara sengaja (Purposive Sampling). Data yang telah dikumpulkan dari informan kunci maupun lembaga terkait, kemudian diolah dan dianalisis melalui tiga langkah, yaitu evaluasi faktor eksternal, evaluasi faktor internal, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Analisis faktor internal dan eksternal pada matrik SWOT, berada pada kuadran IV dengan rekomendasi strateginya adalah strategi diversifikasi (berada pada posisi yang baik namun masih menghadapi berbagai ancaman yang datang dari lingkungan eksternal), 2) Beberapa strateginya yaitu : peningkatan kapasitas produksi domestik melalui pengembangan produksi pangan sesuai dengan potensi masing-masing wilayah (pangan lokal), peningkatan kelancaran distribusi dan akses pangan melalui peningkatan kualitas dan pengembangan infrastruktur distribusi dan pengembangan sarana dan prasarana pasca panen dan peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal

Kata Kunci : Strategi, Ketahanan Pangan, Kabupaten Sumba Timur

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Di Kabupaten sumba Timur

Penyusun TAPM : Umbu Ndilu Hamandika

NIM : 500009062

Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 September 2015

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Adjis Salim Adang Djaha, M.Si
NIP. 19640405 199003 1 004

Pembimbing II,



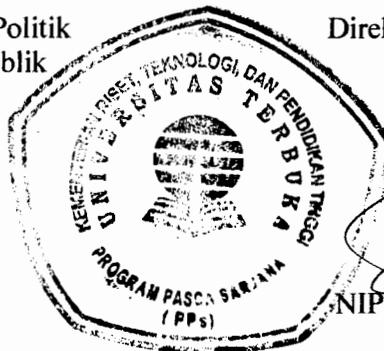
Prof. Daryono S.H., M.A., Ph.D
NIP. 19640722 198903 1 019

Mengetahui :

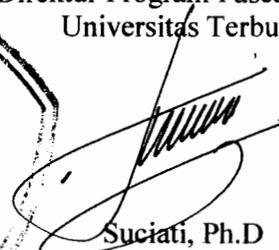
Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP.19630107 198903 2 001



Direktur Program Pascasarjana
Universitas Terbuka



Suciati, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Umbu Ndilu Hamandika

NIM : 500009062

Program Studi : Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Judul TAPM : Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Di Kabupaten sumba Timur

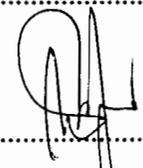
Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana. Program studi Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 September 2015

Waktu : 10:00 – 12:00 Wita

Dan telah dinyatakan LULUS/~~TIDAK LULUS~~

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji Nama	: Drs. Ribut Alam Malau, M.Si	
Penguji Ahli Nama	: Prof. Dr. Sam'un Jaja Raharja, M.Si	
Pembimbing I, Nama	: Dr. Adjis Salim Adang Djaha, M.Si,	
Pembimbing II, Nama	: Prof. Daryono S.H., M.A., Ph.D	

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Sumba Timur adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata di temukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Waingapu, 12 September 2015
Yang Menyatakan


(Umou Nditu Hamandika)
NIM. 500009062

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, saya dapat menyelesaikan penulisan TAPM (Tesis) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari mulai perkuliahan sampai pada penulisan penyusunan TAPM ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan TAPM ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas terbuka Pro. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D;
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D;
3. Kepala UPBJJ-UT Kupang Bapak Drs. R. Alam Malau, M.Si selaku penyelenggara Program Pascasarjana;
4. Pembimbing I, Ajis Salim Adang Djaha, M.Si, Dr. dan Pembimbing II, Daryono, SH, MA, Ph.D, Prof. Yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan TAPM ini;
5. Ir. Josis Djawa Gigy, M.Si selaku Kepala Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur, yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan TAPM ini;
6. Keluarga yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
7. Sahabat Pascasarjana Program Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat administrasi Publik Universitas Terbuka yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini;
8. Semua pihak yang penulis tidak sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu memberikan bantuan material dan moral dalam penyusunan TAPM ini.

Penulis menyadari bahwa TAPM (Tesis) ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya sangat diharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan TAPM (Tesis) ini.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga penulisan TAPM (Tesis) ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Waingapu, September 2015

Penulis

Umbu Ndilu Hamandika

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstraksi	i
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	
Daftar Lampiran	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	8
B. Kerangka Berpikir.....	17
C. Defenisi Operasional.....	20
D. Penelitian Terdahulu.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Fokus Penelitian.....	48
D. Sumber Data.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisa Data.....	52

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum.....	62
B. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	80
C. Temuan.....	97
D. Hasil Analisa Data.....	161

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	198
B. Saran.....	199

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Data Ketersediaan Pangan 2009 sampai dengan 2014..	Hal. 4
Gambar 2	Kerangka Sistim Ketahanan Pangan.....	Hal. 10
Gambar 3	Sub Sistim Ketahanan Pangan	Hal. 47
Gambar 4	Hasil Koordinat SWOT.....	Hal. 187

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan	Hal. 14
Tabel 2	Komposisi AKE dan Skor PPH Nasional	Hal. 17
Tabel 3	Kajian Penelitian Terdahulu	Hal. 47
Tabel 3.1	Penentuan Bobot Faktor Eksternal	Hal. 55
Tabel 3.2	Penentuan Peringkat Faktor Eksternal	Hal. 56
Tabel 3.3	Ilustrasi Matriks EFE	Hal. 56
Tabel 3.4	Penentuan Bobot Faktor Internal	Hal. 57
Tabel 3.5	Perhitungan Peringkat Faktor Internal	Hal. 58
Tabel 3.6	Ilustrasi Matriks IFE	Hal. 59
Tabel 3.7	Contoh Matriks SWOT	Hal. 61
Tabel 4	Jumlah kecamatan, penduduk dan kepadatan penduduk	Hal. 62
Tabel 4.1	Bobot dan Peringkat Faktor Strategik Internal	Hal. 163
Tabel 4.2	Bobot dan Peringkat Faktor Strategik Eksternal	Hal. 181
Tabel 4.3	Alternatif Strategi dengan menggunakan matriks SWOT	Hal. 189

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuisisioner Analisa SWOT
Lampiran 2	Pendalaman Analisa SWOT
Lampiran 3	Matriks IFE Informan 1 sampai dengan 10
Lampiran 4	Rekapitulasi Matriks IFE
Lampiran 5	Rekapitulasi IFE
Lampiran 6	Matriks EFE Informan 1 sampai dengan 10
Lampiran 7	Rekapitulasi Matriks EFE
Lampiran 8	Rekapitulasi EFE

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada Tahun 2000 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan pernyataan tentang perlunya upaya global untuk peningkatan kesejahteraan manusia melalui *Millenium Development Goals* (MDGs). MDGs memiliki 8 tujuan, 18 target dan 48 indikator. Tujuan pertama dari MDGs adalah bahwa pada tahun 2015 nanti setiap negara nanti diharapkan mampu untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan separuh dari kondisi awal pada tahun 1990. Dua dari lima indikator sebagai penjabaran tujuan pertama MDGs adalah menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita (Indikator keempat) dan menurunnya jumlah penduduk defisit energi atau kelaparan (indikator kelima). Kedua indikator tersebut mencerminkan tingginya keterkaitan antara kondisi ketahanan pangan dan status gizi masyarakat.

Sebagai negara dengan penduduk besar dan wilayah yang sangat luas, ketahanan pangan merupakan agenda penting didalam pembangunan ekonomi indonesia. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik indonesia. Menjadi sangat penting bagi indonesia untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan nasional, wilayah, rumah tangga dan individu yang berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik.

Pangan merupakan komoditas penting dan strategis bagi bangsa Indonesia mengingat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama seperti diamanatkan oleh Undang Undang (UU) Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan. Dalam UU tersebut disebutkan Pemerintah menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sementara masyarakat



menyelenggarakan proses produksi dan penyediaan, perdagangan, distribusi serta berperan sebagai konsumen yang berhak memperoleh pangan yang cukup dalam jumlah dan mutu, aman, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau oleh daya beli mereka.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan sebagai peraturan pelaksanaan UU No.7 tahun 1996 menegaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan dan mengembangkan lahan produktif. Di PP tersebut juga disebutkan dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan ke seluruh wilayah dilakukan distribusi pangan melalui upaya pengembangan sistem distribusi pangan secara efisien, dapat mempertahankan keamanan, mutu dan gizi pangan serta menjamin keamanan distribusi pangan.

Di samping itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan dilakukan diversifikasi pangan dengan memperhatikan sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal melalui peningkatan teknologi pengolahan dan produk pangan dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan gizi seimbang. Peraturan Pemerintah tentang Ketahanan Pangan juga menggaris bawahi untuk mewujudkan ketahanan pangan dilakukan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi pendidikan dan pelatihan di bidang pangan, penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan dan penyuluhan di bidang pangan. Di samping itu, kerjasama internasional juga dilakukan dalam bidang produksi, perdagangan dan distribusi pangan, cadangan pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan serta riset dan teknologi pangan.



Dari uraian di atas terlihat ketahanan pangan berdimensi sangat luas dan melibatkan banyak sektor pembangunan. Keberhasilan pembangunan ketahanan pangan sangat ditentukan tidak hanya oleh performa salah satu sektor saja tetapi juga oleh sektor lainnya. Dengan demikian sinergi antar sektor, sinergi pemerintah dan masyarakat (termasuk dunia usaha) merupakan kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.

Menyadari hal tersebut di atas, Pemerintah pada tahun 2001 telah membentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) diketuai oleh Presiden Republik Indonesia (RI) dan Menteri Pertanian sebagai Ketua Harian DKP. DKP terdiri dari 13 Menteri termasuk Menteri Riset dan Teknologi dan 2 Kepala LPND. Dalam pelaksanaan sehari-hari, DKP dibantu oleh Badan Bimas Ketahanan Pangan Deptan, Tim Ahli Eselon I Menteri Terkait (termasuk Staf Ahli Bidang Pangan KRT), Tim Teknis dan Pokja.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan pasal 9 menyebutkan: (1) penganeekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, (2) penganeekaragaman pangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan dengan a. Meningkatkan keragaman pangan, b. Mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pertanian dan c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan prinsip gizi berimbang.

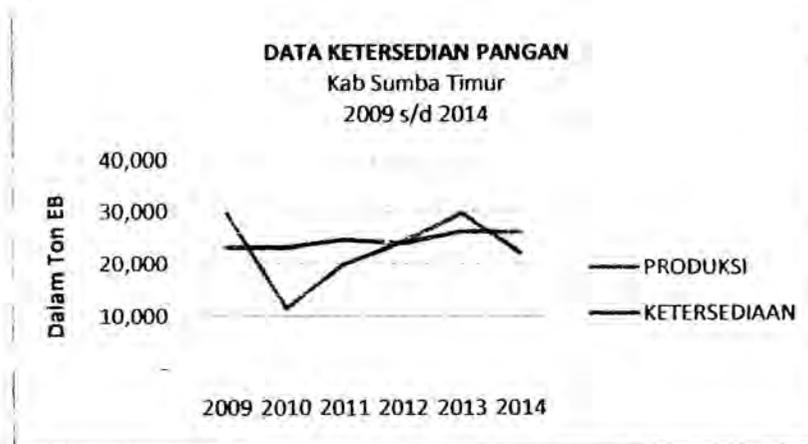
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kabupaten Sumba Timur identik dengan rawan pangan. Permasalahan rawan pangan di Kabupaten Sumba Timur selalu terjadi setiap tahun dan berulang dalam beberapa tahun terakhir ini. Sering ditemui dari pemberitaan berbagai media massa mengenai permasalahan rawan pangan. Harian Kompas, 20 Agustus 2011 melansir berita bahwa ada 46.309 jiwa atau 10.955 keluarga yang tersebar di 140 desa di Sumba Timur mengalami rawan pangan. Sementara itu, pada periode yang sama di tahun



berikutnya, kejadian rawan pangan terulang. *Harian Kompas*, 15 Agustus 2012 merilis berita bahwa sebanyak 11 dari 21 kabupaten di Provinsi NTT, termasuk Kabupaten Sumba Timur di dalamnya, terancam rawan pangan akibat kekeringan dan gagal panen.

Menurut laporan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2009*, Sumba Timur termasuk dalam 100 kabupaten prioritas 1, yaitu kabupaten yang harus mendapat prioritas khusus dan penanganan segera/mendesak dalam peningkatan ketahanan pangan dan penanganan masalah kerawanan pangan (DKP, Departemen Pertanian RI, dan WFP, 2010).

Ini sejalan dengan Laporan Pemetaan Daerah Rawan Pangan dan Gizi Kabupaten Sumba Timur dalam enam tahun terakhir (tahun 2009-2014), yang menggambarkan bahwa Sumba Timur secara keseluruhan berada dalam kriteria resiko tinggi. Kondisi produksi pangan domestik yang mengalami defisit dibanding kebutuhan konsumsi menyumbang tingginya resiko rawan pangan di Sumba Timur. Berdasar Laporan Analisa Situasi Pangan Kabupaten Sumba Timur dalam enam tahun terakhir (tahun 2009-2014), jumlah produksi pangan (padi, jagung, ubi-ubian dan kacang-kacangan) dalam beberapa tahun mengalami defisit dibanding kebutuhan konsumsi. Kondisi produksi dan kebutuhan konsumsi pangan di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2009-2014 seperti pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Produksi dan Kebutuhan Konsumsi Pangan di Kabupaten Sumba Timur



Kondisi produksi pangan yang defisit/minus dibanding kebutuhan konsumsi masyarakat menyebabkan tingginya kerentanan terhadap rawan pangan di Kabupaten Sumba Timur, karena bergantung pada pangan yang diimpor dari luar wilayah. Disamping itu, ketiadaan akses individu/rumah tangga terhadap pangan, baik itu akses ekonomi, fisik dan sosial merupakan faktor kunci kerawanan pangan.

Ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan pangan (*food availability*), akses pangan (*food access*), dan penyerapan pangan (*food utilization*). Status gizi merupakan dampak dari ketahanan pangan (Hanani, 2009). Penelitian ini difokuskan pada strategi peningkatan ketahanan pangan, dimana pentingnya strategi dalam pencapaian ketahanan pangan didasarkan pada pertimbangan berikut: (i) Ketahanan dan ketersediaan pangan di tingkat nasional, regional, wilayah merupakan syarat keharusan tetapi itu saja tidak cukup, (ii) Terjaminnya ketahanan pangan tingkat rumah tangga merupakan syarat kecukupan bagi tercapainya ketahanan pangan lokal, regional, nasional, global, (iii) Bukti empiris menunjukkan bahwa di wilayah tahan pangan dan terjamin masih ditemukan proporsi rumah tangga rawan pangan yang cukup tinggi (20-30%), dan (iv) Kasus rawan pangan dan insiden busung lapar di berbagai daerah pada kondisi ketersediaan pangan nasional (dan wilayah) cukup baik (Rachman, 2010). Oleh karenanya, peneliti menetapkan permasalahan Ketahanan pangan ini yang menjadi fokus pembahasan untuk dapat dirumuskan strategi peningkatan Ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

Data ketersediaan pangan, distribusi/akseibilitas dan penyerapan/konsumsi pangan di kabupaten sumba timur dalam beberapa tahun terakhir seperti berikut:



Data Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur 2009 s/d 2014

Tahun	Ketersediaan Pangan	Kebutuhan Pangan	Akses Pangan		Penyerapan Pangan (Dlm PPH) (%)
			Dibiayai	fisik	
2009	29.693,33	23.237,00		5	
2010	11.522,87	23.200,78		4	
2011	19.971,17	24.688,00	5 Luep	5	74,0
2012	24.332,36	23.985,92	5 Luep	1	73,9
2013	29.685,62	26.283,78	7 Luep	4	77,4
2014	22.176,38	26.164,44	12 Luep	4	78,0

PPH Ideal 100%

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mengatasi persoalan kerawanan pangan yang selalu muncul hampir setiap tahun. Kondisi kerawanan pangan ini tidak bisa terselesaikan jika ditangani dengan intervensi program/kegiatan yang bersifat reaksional. Masalah ini harus diselesaikan dengan strategi dan program yang terstruktur dan konsisten untuk mampu mengatasinya. Oleh karenanya dilakukan penelitian tentang strategi peningkatan ketahanan pangan agar perumusan kebijakan/program ketahanan pangan dilakukan secara terstruktur dan konsisten untuk menjawab persoalan kerawanan pangan yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menguraikan persoalan kerawanan pangan yang ada di Kabupaten Sumba Timur dengan menyediakan rekomendasi strategi ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur yang bermanfaat bagi pemerintah daerah.

B. Perumusan Masalah

Hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- Bagaimana strategi ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.
- Bagaimana menyusun strategi ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.



C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Melakukan identifikasi strategi dalam rangka peningkatan ketahanan pangan untuk mengatasi persoalan kerawanan pangan yang terjadi di Kabupaten Sumba Timur.
- Melakukan penyusunan strategi dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Akademis

- a). Menambah wacana keilmuan di bidang pelayanan dan kebijakan publik.
- b). Menambah khazanah penelitian mengenai strategi dalam rangka Peningkatan Ketahanan Pangan
- c). Menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tentang Ketahanan Pangan

2. Praktis

- a). Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam menentukan strategi yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan.
- b). Dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap strategi ketahanan pangan.
- c). Menyediakan rekomendasi strategi dalam rangka peningkatan ketahanan pangan yang bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan untuk perumusan strategi di bidang ketahanan pangan.



BAB II

Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau tinjauan teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Sebab itu kajiannya perlu didukung oleh suatu landasan teori yang dipilih dari literatur maupun berbagai referensi sebagai dasar teoritik yang menghubungkan konsep-konsep, proposisi-proposisi dan definisi variabel yang hendak diteliti, sehingga dapat menerangkan dan memecahkan masalah yang sementara dihadapi.

2.1. Kajian Teori

Perhatian terhadap ketahanan pangan (*food security*) merupakan respon dari deklarasi PBB tentang Hak Asazi Manusia (HAM) tahun 1948, bahwa hak atas pangan adalah salah satu elemen utama untuk menjalani kehidupan secara ideal. Dalam hal ini, kebutuhan pangan masyarakat dilihat dalam konteks pendekatan hak (*right-based*), yang bermakna bahwa pemerintah wajib untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kecukupan pangan tersebut. Menghormati berarti bahwa pemerintah tidak boleh menghilangkan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup. Melindungi berarti bahwa pemerintah harus melindungi masyarakat dari keadaan kehilangan akses tersebut. Pemerintah secara proaktif harus menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mandiri, apabila masyarakat belum mampu melakukannya, maka pemerintah harus menjamin ketersediaan pangannya.

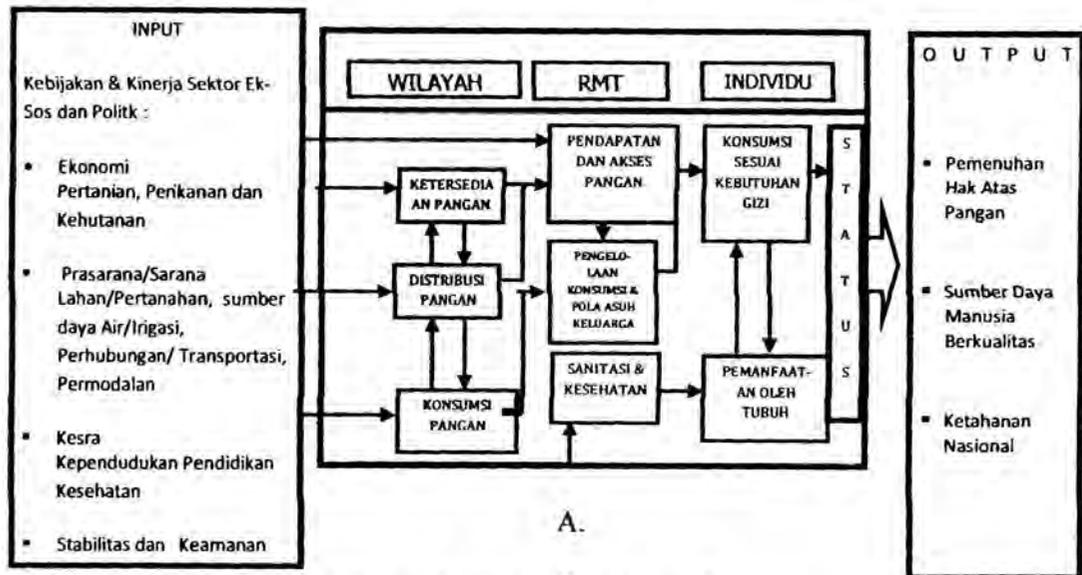


Berdasarkan Konferensi Pangan Tingkat Tinggi tahun 1996 yang diselenggarakan oleh Food and Agriculture Organisation (FAO), definisi ketahanan pangan adalah *“food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life”* (Dewan Ketahanan Pangan, 2011). Makna yang terkandung dalam definisi tersebut adalah setiap orang pada setiap saat memiliki aksesibilitas secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan agar dapat hidup produktif dan sehat.

Indonesia kemudian mengadopsi rumusan ketahanan pangan tersebut dan dituangkan ke dalam UU RI Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan. Berdasarkan UU tersebut, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Ketahanan pangan terdiri dari tiga subsistem, yaitu: (1) Ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk baik jumlah maupun mutunya, serta aman, (2) Distribusi pangan, dimana pasokan pangan dapat menjangkau ke seluruh wilayah sehingga harga stabil dan terjangkau oleh rumah tangga, dan (3) konsumsi pangan, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsi sesuai kaidah gizi dan kesehatan serta preferensinya (Dewan Ketahanan Pangan, 2006). Lebih lanjut, Baliwati (2007) menyatakan bahwa ketiga subsistem ketahanan pangan tersebut berinteraksi membentuk sistem ketahanan pangan (Gambar 1).





A.
Gambar 1 Kerangka Sistem Ketahanan Pangan

Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Subsistem ini berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk, baik dari sisi jumlah, kualitas, keragaman maupun keamanannya. Acuan kualitatif untuk ketersediaan pangan adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG) rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII Tahun 2004, yaitu energi sebesar 2200 kkal/kapita/hari dan protein 57 gram/kapita/hari. Acuan untuk menilai tingkat keragaman ketersediaan pangan adalah Pola Pangan Harapan dengan skor 100 sebagai PPH ideal.

Subsistem distribusi pangan yang efektif dan efisien sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang baik sepanjang waktu. Subsistem ini mencakup aspek aksesibilitas secara fisik, ekonomi maupun sosial atas pangan secara merata

sepanjang waktu. Akses pangan didefinisikan sebagai kemampuan rumah tangga untuk secara periodik memenuhi sejumlah pangan yang cukup, melalui berbagai sumber atau kombinasi cadangan pangan yang dimiliki, hasil produksi pangan, pembelian/barter, pemberian, pinjaman dan bantuan pangan.

Akses pangan secara fisik ditunjukkan oleh kemampuan memproduksi pangan, infrastruktur dasar maupun kondisi sumberdaya alam dan lingkungan. Dengan demikian akses fisik lebih bersifat kewilayahan dan dipengaruhi oleh ciri dan pengelolaan ekosistem. Akses pangan secara ekonomi menyangkut keterjangkauan masyarakat terhadap pangan yang ditunjukkan oleh harga, sumber mata pencaharian dan pendapatan. Sumber mata pencaharian meliputi kemampuan, asset dan aktivitas yang dapat menjadi sumber pendapatan. Seringkali, sumber mata pencaharian sangat dipengaruhi oleh kondisi maupun pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Akses pangan secara sosial antara lain dicerminkan oleh tingkat pendidikan, bantuan sosial, kebiasaan makan, konflik sosial/keamanan.

Subsistem konsumsi pangan berfungsi mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan memenuhi kaidah mutu, keragaman dan keseimbangan gizi, keamanan dan halal, serta efisiensi untuk mencegah pemborosan. Subsistem ini menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik sehingga dapat mengatur menu beragam, bergizi, seimbang secara optimal, pemeliharaan sanitasi dan *hygiene* serta pencegahan penyakit infeksi dalam lingkungan rumah tangga. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pangan oleh tubuh. Kondisi



konsumsi pangan rumahtangga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ekonomi, sosial dan budaya setempat.

Kebijakan merupakan penjabaran secara normatif komitmen pemerintah dalam pembangunan sehingga menjadi acuan tindakan suatu organisasi dalam mencapai tujuan (Martianto *et al*, 2007). Kebijakan terkait pembangunan ketahanan pangan diperlukan sebagai fondasi atau *pre-condition* bagi pemerintah untuk mampu menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup, bermutu dan aman, terutama dari produksi dalam negeri dan mendistribusikannya secara merata ke berbagai wilayah Indonesia dari waktu ke waktu dengan harga yang terjangkau secara berkelanjutan (DKP, 2011).

Dokumen kebijakan terkait ketahanan pangan pada tingkat pusat tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Kebijakan Umum Ketahanan Pangan (KUKP) 2010-2014, serta Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Departemen terkait Ketahanan Pangan. Adapun kebijakan ketahanan pangan di tingkat daerah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Propinsi/Kabupaten. Mengacu pada RPJMN 2010-2014, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional 2010-2014 adalah untuk:

- (a) Meningkatkan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan,
- (b) Meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan, dan
- (c) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kemandirian pangan.

Berdasarkan KUKP 2010-2014, terdapat 18 kebijakan ketahanan pangan, yaitu: (1) menata pertanahan dan tata ruang wilayah, (2) antisipasi perubahan iklim: adaptasi dan mitigasi, (3) Meningkatkan produksi domestik: proteksi dan

promosi, (4) Memperlancar sistem distribusi pangan, (5) Mengembangkan cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat, (6) Menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga pangan, (7) Meningkatkan aksesibilitas atas pangan, (8) Menanganai kerawanan pangan kronis dan transien, (9) Mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan, (10) Mendorong perilaku konsumsi pangan, (11) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, (12) Memfasilitasi pengembangan industri pangan UKM, (13) Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan ketahanan pangan, (14) Kebijakan makro dan perdagangan yang kondusif, (15) Menguatkan kelembagaan ketahanan pangan dan koordinasi antar daerah, (16) Meningkatkan peran pimpinan formal dan nonformal dalam pembangunan ketahanan pangan, (17) Memfasilitasi penelitian dan pengembangan, dan (18) Melaksanakan kerjasama internasional (DKP, 2011).

Program peningkatan ketahanan pangan disusun untuk mengoperasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik di tingkat pemerintah maupun di tingkat masyarakat. Program ketahanan pangan tahun 2011 berdasarkan Peraturan Kepala BKP No 006/Kpts/OT.140./K/01/2011 yaitu (1) Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan, (2) Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan, (3) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan, dan (4) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

Standar pelayanan minimal bidang ketahanan pangan telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor



65/Permentan/OT.140/12/2010. Standar Pelayanan Minimal merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketahanan pangan di daerah. Pemerintah provinsi harus menyelenggarakan dua jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan serta penanganan kerawanan pangan dengan 4 indikator. Pemerintah kabupaten/kota wajib menyelenggarakan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan; distribusi dan akses pangan; penganeekaragaman dan keamanan pangan; serta penanganan kerawanan pangan dengan 7 indikator seperti terdapat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

Jenis Pelayanan Dasar Bidang KP		SPM		Capaian	Ket SKPD
		Indikator (<u>definisi operasional</u>)	Nilai (%)		
A	Ketersediaan dan Cadangan Pangan	1. Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (AKE = 2200 kkal/kap/hr; AKP = 57 gr/kap/hr)	90	2015	BKPD (Badan Ketahanan Pangan Daerah)
		2. Penguatan Cadangan Pangan CPP kab/kota 100 ton; CPM 500 kg di RT ut 3 bl setara beras – CPD, % kec punya CPM)	60	2015	BKPD
B	Distribusi dan Akses Pangan	3. Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah- mingg/ bul/ kuartal/th; kec/desa; kab/kota);	90	2015	BKPD
		4. Stabilitas Harga & Pasokan Pangan (jika gejolak harga < 25% kondisi normal; jika penurunan pasokan 5-40%)	90	2015	BKPD
C	Penganeekaragaman dan Keamanan Pangan	5. Skor Pola Pangan Harapan/PPH (komposisi konsumsi pangan secara seimbang sesuai AKE = 2000 kkal/kap /hr; AKP = 50 gr/kap/hr)	90	2015	BKPD
		6. Pengawasan & Pembinaan Keamanan Pangan (informasi Prima-3, 2, 1; koordinasi dg instansi terkait; pembinaan & pengawasan UMKM; KAP keamanan pgn di sekolah; pembinaan & pengawasan produk pgn segar, pabrik skala kecil/RMT)	80	2015	BKPD
D	Penanganan Kerawanan Pangan	7. Penanganan Daerah Rawan Pangan (berdasarkan pengembangan SKPG; penyajian peta FSVA; penghitungan tingkat rawan pangan)	60	2015	BKPD

2.1.3 Konsumsi Pangan

Hak atas kecukupan pangan tidak dapat dilepaskan dari masalah hak azasi manusia. Aspek gizi memandang bahwa tujuan mengonsumsi pangan adalah memperoleh sejumlah zat gizi yang diperlukan tubuh, sehingga bila hak atas pangan terpenuhi maka kualitas hidup yang baik mencakup status gizi dan kesehatan akan tercapai (Khomsan, 2002). Hardinsyah dan Martianto (1989) juga mengungkapkan bahwa agar hidup sehat secara berkelanjutan, manusia memerlukan sejumlah zat gizi. Zat gizi dapat diperoleh dari konsumsi pangan yang mencukupi kebutuhan tubuh untuk melakukan kegiatan pemeliharaan dan pertumbuhan tubuh.

Kekurangan zat gizi terutama energi dan protein pada tahap awal akan menimbulkan rasa lapar. Jika berlangsung cukup lama akan berakibat pada penurunan berat badan disertai dengan penurunan produktivitas kerja. Apabila kekurangan berlanjut terus akan menyebabkan marasmus atau kwashiorkor. Penanganan yang terlambat akan mengakibatkan mudah terkena infeksi yang dapat berakhir dengan kematian.

Hardinsyah dan Martianto (1989) mendefinisikan kebutuhan gizi sebagai kebutuhan minimal zat gizi agar dapat hidup sehat sedangkan kecukupan gizi adalah jumlah masing-masing zat gizi yang sebaiknya dipenuhi seseorang agar hampir semua orang (minimal 97,5% populasi) hidup sehat. Angka kecukupan energi dan protein berguna untuk mengukur tingkat dan perencanaan konsumsi. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (2004), Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata orang Indonesia adalah sebesar 2000 kkal/kapita/hari sedangkan Angka Kecukupan Protein (AKP) adalah sebesar 52 gram/kapita/hari.



Jumlah konsumsi pangan dikelompokkan menurut kriteria yang diadaptasi dari Departemen Kesehatan tahun 1996 adalah sebagai berikut :

- a) Kurang dari 70% : defisit berat atau rawan pangan
- b) 70-79% : defisit tingkat sedang
- c) 80-89% : defisit tingkat ringan
- d) 90-110% : normal (tahan pangan)
- e) 110% ke atas : berlebih

Konsumsi pangan tidak hanya diukur dari segi jumlah yang dicerminkan oleh terpenuhinya AKE melainkan juga dari segi kualitas yang dicerminkan oleh keanekaragaman konsumsi pangan. Konsumsi yang beranekaragam sangat penting karena tidak ada satupun jenis pangan yang memiliki kandungan zat gizi lengkap. Oleh karena itu, konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal.

Kinerja konsumsi pangan wilayah tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga. Kondisi konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat. Ukuran rumah tangga, tingkat pendidikan, dan pendapatan merupakan faktor yang mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga (Baliwati, 2007).

Penilaian kualitas konsumsi pangan berdasarkan keragaman dan keseimbangan komposisi energi dapat dilakukan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan kumpulan beragam jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi

pada komposisi yang seimbang (Hardinsyah *et al*, 2001). Selanjutnya dijelaskan bahwa dengan terpenuhinya kebutuhan energi dari berbagai kelompok pangan sesuai PPH, secara implisit kebutuhan zat gizi juga terpenuhi kecuali untuk zat gizi yang sangat defisit dalam suatu kelompok pangan.

Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan. Berikut ini tabel mengenai jumlah, komposisi (% AKE) dan skor PPH (Badan Ketahanan Pangan, 2011).

Tabel 2. Jumlah, Komposisi (% AKE) dan skor PPH Nasional

No	Kelompok Pangan	Konsumsi (gr/kap/hari)	Energi (kkal)	% AKE	Bobot	Skor PPH
1	Padi-Padian	275	1000	50	0,5	25
2	Umbi-umbian	100	120	6	0,5	2,5
3	Pangan Hewani	150	240	12	2,0	24
4	Minyak dan Lemak	20	200	10	0,5	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	10	60	3	0,5	1,0
6	Kacang-kacangan	35	100	5	2,0	10,0
7	Gula	30	100	5	0,5	2,5
8	Sayur dan Buah	250	120	6	5,0	30,0
9	Lain-lain	-	60	3	0,0	0,0
Jumlah			2000	100		100

2.2. Kerangka Berpikir

Definisi Ketahanan Pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah

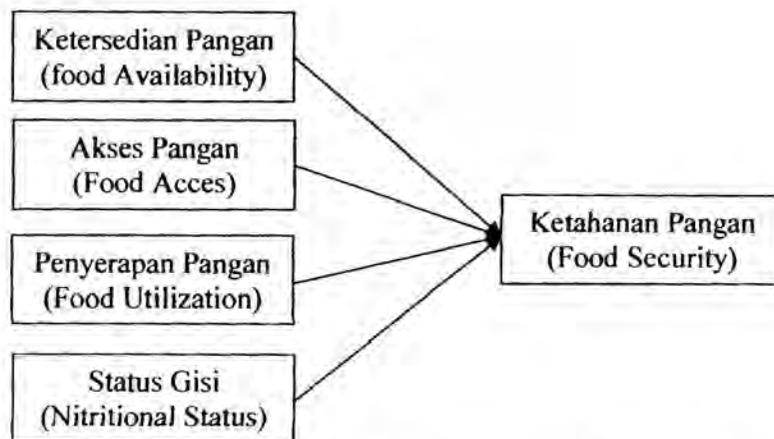
maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. FAO pada *World Food Summit* 1996 memberi definisi "Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi yang memenuhi kebutuhan konsumsi dan selera untuk hidup aktif dan sehat".

Berdasarkan pengertian ketahanan pangan menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1996, maka mewujudkan ketahanan pangan dapat lebih dipahami sebagai berikut (Hanani, 2009):

- a. Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas, mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak, dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya, yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
- b. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman, diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama.
- c. Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata, diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh tanah air.
- d. Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau, diartikan pangan mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau.

Ketahanan pangan terdiri dari tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan pangan (*food availability*), akses pangan (*food access*), dan penyerapan pangan (*food utilization*). Status gizi merupakan *outcome* dari ketahanan pangan. Ketersediaan pangan, akses/distribusi pangan, dan penyerapan/konsumsi pangan

merupakan sub sistem yang harus dipenuhi secara utuh. Jika salah satu sub sistem tersebut tidak dipenuhi, maka suatu wilayah belum dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik. Walaupun pangan tersedia cukup di wilayah tersebut, tetapi jika tidak meratanya akses individu untuk memenuhi kebutuhan pangannya, maka ketahanan pangan masih dikatakan rapuh (Hanani, 2009).



Sumber : USAID dan Weingartner (2004) dalam Hanani (2009)

Gambar 3. Sub Sistem Ketahanan Pangan

Akses pangan (*food access*) adalah kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja dan harga. Akses fisik menyangkut tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang preferensi pangan (Hanani, 2009).

2.3. Defenisi Operasional

Ketika diperkenalkan secara formal pertama kali pada awal dasawarsa enam puluhan, manajemen strategik mendapatkan sambutan yang luar biasa. Bahkan terkesan berlebihan. Konsep dan teknis analisisnya diperlakukan sebagai alat bantu utama pengambilan keputusan manajerial. Ada kesan, bahwa manajemen strategik mampu mengurangi ketidak pastian dan kompleksitas bisnis. Untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, manajemen perlu memperhatikan dua faktor pokok, yakni Eksternal yang tidak terkontrol oleh organisasi dan faktor Internal yang sepenuhnya berada dalam kendali organisasi (Suwarsono Muhamad, 2013).

Peran manajemen strategik mengalami pasang surut. Ketika pertama kali diperkenalkan, manajemen menganggap sebagai alat bantu utama pengambilan keputusan manajerial. Sejak pertengahan dasawarsa tujuh puluhan sampai dengan awal pertengahan delapan puluhan, manajemen strategik dalam masa transisi. Ketika itu, sebagian manajemen sedang mempertanyakan ulang kontribusi yang diperoleh dari manajemen strategik, akan tetapi disaat yang sama, manajemen strategik juga sedang mencari bentuk barunya untuk memenuhi tantangan tersebut (Suwarsono, Muh, 2013).

Manajemen strategik memiliki arti penting dalam perkembangan sebuah organisasi. Tidak hanya sebuah perencanaan atau planning saja, manajemen strategik mencakup bagian-bagian yang lebih dalam dan juga luas. Sebuah organisasi terdiri dari banyak bagian dengan strukturnya masing-masing. Setiap organisasi juga memiliki tujuan yang berbeda-beda. Guna mewujudkan tujuannya, keputusan-keputusan lalu diambil.

Keputusan tersebut tentunya menjadi penentu organisasi menjadi organisasi yang sukses dan maju.

Manajemen strategik memang berbeda dengan perencanaan, namun perencanaan strategik sering diartikan serupa dengan manajemen strategik. Pada awalnya strategik planning atau perencanaan strategik banyak digunakan pada tahun 1950-an dan berkembang pada tahun 1970-an. Perencanaan strategik saat itu dipercaya menjadi solusi bagi permasalahan yang dihadapi sebuah organisasi (Nilasari Senja).

Perencanaan strategik kemudian lebih banyak diartikan sebagai perencanaan formulasi strategi saja. Formulasi atau perumusan itu juga merupakan bagian dari manajemen strategi sehingga strategik planning menjadi berbeda artinya dengan manajemen strategik. Istilah manajemen strategik sendiri saat ini lebih banyak digunakan pada bidang akademik. Manajemen strategik terdiri atas dua buah kata yaitu manajemen dan juga strategi. Manajemen seperti yang kita ketahui merupakan sebuah seni dan ilmu dalam merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan dan melakukan kontrol terhadap sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi sedangkan strategi adalah proses pendekatan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan dan pelaksanaan sebuah kegiatan dalam suatu waktu. (Nilasari, Senja)

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti strategos yang artinya komandan militer. Kita sering mendengar kata strategi dalam perang ataupun pertandingan olah raga. Saat ini kata strategi digunakan dalam berbagai bidang antara lain manajemen, perdagangan dan olahraga. Strategi dalam olahraga diperlukan oleh sebuah tim untuk memenangkan sebuah pertandingan, sama



halnya dengan sebuah organisasi yang juga membutuhkan sebuah manajemen strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Porter (1996) juga ikut mendefinisikan strategi. Strategi menurutnya adalah penciptaan posisi unik dan berharga yang didapatkan dengan melakukan serangkaian aktivitas. Porter juga pernah menuliskan bahwa esensi dari strategi adalah memilih aktivitas yang tidak dilakukan oleh pesaing atau lawan.

Pengertian strategi dari Alfred Chandler yaitu strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang dari organisasi dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Kenechi Ohmae, strategi adalah keunggulan bersaing guna mengubah kekuatan organisasi sehingga menjadi sebanding atau melebihi kekuatan pesaing dengan cara yang paling efisien.

Strategi terkadang sering disamakan dengan taktik padahal keduanya berbeda, strategi lebih bersifat dinamis karena merupakan sebuah proses sehingga mengikuti perubahan yang terjadi sedangkan taktik lebih bersifat tetap karena dilakukan pada suatu waktu saja. Selain itu strategi juga memiliki pilihan alternatif yang lebih banyak dari pada taktik.

Lalu apa itu manajemen strategik? Beberapa ahli manajemen mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian manajemen strategi.

Menurut David, 2002, manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai tujuannya. Berdasarkan pengertian tersebut kita dapat mengetahui tentang cakupan manajemen strategi dalam memenuhi tujuan organisasi mulai dari perumusan sampai dengan proses



evaluasi, tidak hanya satu bagian organisasi saja namun juga lintas fungsional yang berarti mencakup pegawai atau anggota dari berbagai tingkatan di organisasi.

Ketchen, 2009, menyatakan manajemen strategis sebagai analisis, keputusan dan aksi yang dilakukan organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Berdasarkan pengertian tersebut bisa dijabarkan mengenai manajemen strategis yang terdiri dari elemen proses menciptakan keputusan strategis dan juga keunggulan kompetitif. Keputusan strategis dan keunggulan kompetitif tersebut nantinya dapat membuat sebuah organisasi mengalahkan organisasi lainnya.

John Andrew Pearce dan Richard Benjamin Robinson mendefinisikan manajemen strategi sebagai ilmu yang mengkaji kumpulan keputusan dan tindakan sebagai hasil dari penerapan rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai sebuah ilmu, manajemen strategi memang bisa dipelajari. Namun terkadang teori yang dipelajari menjadi berbeda saat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Kasus-kasus manajemen strategi dari organisasi lain bisa dijadikan pembelajaran manajemen strategi juga.

Wheelan dan Hunger dalam bukunya *Strategic Management and Business Policy* Massachusetts menyatakan manajemen strategi sebagai suatu kesatuan rangkaian keputusan dan tindakan yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategi juga mencakup tentang mengenali lingkungan dan menganalisa lingkungan, membuat formulasi strategi, mengimplementasikan, dan juga melakukan pengendalian atau evaluasi.

Sedangkan menurut Gluch, Kaufman dan Walleck, 1982, manajemen strategi merupakan sistem manajemen yang menghubungkan perencanaan

strategis dengan pembuatan keputusan dalam proses operasional organisasi. Proses operasional organisasi terjadi setiap hari dan berkelanjutan. Manajemen strategi turut berproses seperti proses operasional organisasi tersebut. Tidak heran manajemen strategis bersifat dinamis menurut perkembangan yang terjadi.

Manajemen strategis merupakan proses sistematis yang dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Sebagai sebuah proses, manajemen strategis melibatkan keseluruhan kepentingan yang diperlukan dalam mewujudkan tujuan organisasi. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, serta komitmen juga akan dilibatkan berdasarkan proses manajemen strategi. Sebuah keputusan yang diambil berdasarkan proses manajemen strategi diharapkan merupakan keputusan yang tepat dan tidak asal-asalan.

Berbicara mengenai strategi, maka akan terbayang dalam pikiran kita adalah upaya untuk memenangkan suatu pertempuran atau peperangan yang sedang dihadapi. Bagaimana menggunakan atau mengalokasikan kekuatan yang dimiliki secara tepat dan dalam waktu yang tepat pula untuk memukul mundur lawan dan berupaya memenangkan peperangan secara keseluruhan.

Konsep strategi ini pula berkembang dalam kancah persaingan bisnis yang dilakukan untuk memenangkan dan menguasai pasar yang ada. Bagaimana membuat dan menciptakan suatu produk unggulan, sehingga mampu menguasai pasar secara baik dan berkesinambungan, hal ini dapat dicapai, hanya apabila suatu perusahaan atau organisasi secara tepat memiliki strategi, baik proses produksi, pengemasan, promosi, distribusi, dan pelayanan yang baik bagi para pelanggannya.

Strategi juga dikenal dalam proses penyelenggaraan pembangunan, yang biasanya dilakukan oleh birokrasi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan hasil yang akan dicapai dalam suatu program pembangunan, sebagai akibat keterbatasan sumber daya yang ada, dengan cara mengoptimalkan dan menalokasikan secara tepat sumber daya tersebut

Penerapan strategi yang digunakan oleh kalangan bisnis maupun kalangan penyelenggara pembangunan (Pemerintah maupun LSM), pada perkembangannya dikemas dalam suatu metode yang saat ini telah dikenal luas yaitu manajemen strategi. Pengintegrasian terminologi strategi dan manajemen, sesungguhnya merupakan konsekwensi logis dari upaya untuk mencapai keberhasilan suatu program dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara utuh, baik perencanaan, pengorganisasian, pembimbingan (kepemimpinan), pengawasan dan evaluasi kembali.

Menurut Fred R.David dalam bukunya *Strategic Manajement*, ada 9 kunci dalam manajemen strategi yang perlu kita ketahui. Berikut ini 9 kunci manajemen strategi :

a. Keunggulan kompetitif

Keunggulan Kompetitif atau *competitive advantage* merupakan hasil kritik dari keunggulan komparatif atau *comparative advantage*. Keunggulan kompetitif banyak menekankan sumber daya pada penguasaan skill, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Secara mudah keunggulan kompetitif dapat diartikan sebagai segala sesuatu pada organisasi yang dinilai lebih baik dibanding dengan organisasi lainnya.

Sebuah keunggulan kompetitif atau strategi kompetitif didapat dengan melakukan beberapa strategi antara lain :

- 1) Cost Leadership Strategy
- 2) Differentiation Strategy
- 3) Innovation Strategy
- 4) Operational Effectiveness Strategy

b. Pembuatan Strategi

Pembuat strategi adalah orang yang sangat penting dalam organisasi. Dia adalah orang yang bertanggung jawab dalam keberhasilan maupun kegagalan sebuah organisasi, seorang pembuat strategi harusnya menjadi pemimpin pembelajaran organisasi.

Seorang pemimpin saat ini harus bisa dijadikan panutan. Ada baiknya pemimpin juga adalah seorang yang dapat membuat strategi untuk organisasinya. Pembuat strategi harus peka terhadap faktor dari dalam dan luar lingkungan organisasi, dia bertugas untuk memformulasikan strategi yang cocok bagi organisasi, mengimplementasikannya dan juga nantinya akan mengevaluasi strategi tersebut.

Seorang pembuat strategi yang juga seorang pemimpin organisasi biasanya memiliki gaya masing-masing, kadang-kadang strategi yang mereka terapkan tidak termasuk dalam tipe strategi yang telah dikategorikan oleh para ahli manajemen, hal tersebut karena mereka kadang memiliki filosofi sendiri. Pembuat strategi masing-masing organisasi memiliki kemampuan yang berbeda dan kepribadian yang berbeda sehingga strategi yang diterapkan juga akan berbeda-beda.

c. Pernyataan Visi dan Misi

Visi dan Misi diperlukan dalam organisasi untuk mengetahui tujuan dan imej sebuah organisasi. Visi dapat diartikan sebagai jawaban atas pertanyaan keinginan organisasi tersebut di masa depan ingin seperti apa. Sedangkan misi lebih menjelaskan gambaran prioritas organisasi secara ringkas.

d. Peluang dan Ancaman dari Luar

Peluang dan ancaman dari luar organisasi dapat berupa kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi dan tren pasar. Peluang dan ancaman dari luar itu termasuk dalam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memformulasikan strategi, dinamisnya lingkungan dari luar membuat organisasi perlu selalu memantaunya. Ancaman dari luar kadang tidak bisa dihindari karena faktor lingkungan luar lebih sulit dikendalikan.

e. Kekuatan dan Kelemahan Internal Organisasi

Ancaman dari luar memang terlihat berbahaya, tapi organisasi juga perlu memperhatikan kelemahan internalnya. Seperti kata pepatah “Gajah diberang lautan tampak tapi kuman di depan mata tidak tampak” Kadang terlalu sering memperhatikan lingkungan diluar organisasi dapat membuat organisasi melupakan internal organisasinya.

f. Tujuan Jangka Panjang

Sebuah organisasi tentu memerlukan tujuan, tujuan dapat menjadi pengarah organisasi dalam beroperasi. Tujuan jangka panjang berarti tujuan yang ingin dicapai Organisasi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

g. Strategi-strategi



Strategi yang dimaksud ialah tujuan jangka panjang mana yang ingin dicapai oleh organisasi. Strategi dapat berupa tindakan yang diputuskan oleh pimpinan dengan menggunakan banyak sumber daya organisasi.

h. Tujuan Tahunan

Tujuan tahunan merupakan tujuan jangka pendek yang diharapkan dapat diraih oleh organisasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, tujuan tahunan juga berhubungan dengan dengan tujuan jangka panjang.

i. Kebijakan

Kebijakan atau policies berkaitan dengan tujuan tahunan yang ingin dicapai oleh organisasi. Kebijakan mencakup panduan, aturan dan juga prosedur yang digunakan dalam membuat pencapaian tujuan organisasi. Kebijakan dapat dibuat dalam tingkat korporasi namun dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi di berbagai tingkat. Sebuah kebijakan tentunya membutuhkan dukungan dari semua pihak agar benar-benar efektif berjalan guna mencapai tujuan organisasi.

Identifikasi Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan pengertiannya adalah konflik satu jenis atau lainnya. Konflik bisa terjadi pada aras tujuan, cara, prinsip, lokasi, waktu, dan kelompok-kelompok yang memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian akibat dampak atau hasil dari pemecahan isu tersebut. Untuk memunculkan dan memecahkan isu secara efektif, institusi atau organisasi harus dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan akan terjadinya konflik yang biasanya tidak dapat dihindari (Bryson, 1995 : 65)

Untuk menyeleksi dan memilih isu strategi secara tepat, maka dapat digunakan 5 tehnik analisa (Nawawi, H. Hadari : 175-176) sebagai berikut ini :

1. Teknik matriks faktor internal dan eksternal (The Internal and External Factor Matrix), yang dilakukan dengan analisis dan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan serta mengkaji peluang dan hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan suatu misi, baik yang bersumber dari faktor dari dalam maupun dari luar institusi.
2. Teknik matriks profil kompetitif (The Competitive Profile Matrix) yang dilakukan dengan mengidentifikasi faktor kekuatan dan kelemahan institusi yang sejenis, agar dapat diadaptasi atau digunakan strateginya.
3. Teknik matriks memperkuat dan mengevaluasi posisi (The Strenght Position And Evaluation Matrix), yang dilakukan dengan mencocokkan kemampuan sumber daya internal yang dimiliki (kinerja institusi) untuk memperkuat posisi dengan peluang yang ada, dan mengatasi atau menghindari resiko faktor eksternal.
4. Teknik matriks dari konsultan boston (The Boston Consulting Group Matrix), dilakukan dengan menetapkan strategi yang berbeda-beda untuk setiap biro atau bidang sebagai unit atau satuan kerja.
5. Teknik matriks strategi unduk (The Grand Strategy Matrix), yang dilakukan dengan menetapkan posisi yang kompetitif diukur dari

tingkat keunggulan atau keberhasilan maksimum yang dapat dicapai.

Untuk penelitian ini akan digunakan teknik matriks faktor internal dan eksternal (*The Internal And Eksternal Factor Matrix*) untuk memperoleh isu strategis dan kombinasi strategis dari hasil silangan matriks bagi peningkatan ketahanan pangan di kabupaten sumba timur.

Tahapan Manajemen Strategi

Manajemen strategi merupakan sebuah proses yang dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan tertentu. Secara umum tahapan manajemen strategi terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu proses formulasi atau perumusan strategi, proses pelaksanaan strategi dan proses evaluasi strategi.

Perumusan strategi

Perumusan strategi dilakukan secara matang dengan memperhatikan berbagai macam faktor Baik dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Secara rinci tahap-tahap perumusan manajemen strategi yaitu:

1) Pengembangan misi organisasi

Misi organisasi berkaitan dengan gambaran organisasi yang bergerak dalam sebuah bidang dengan tujuan tertentu. Misi tersebut harus dikembangkan terlebih dahulu sebelum merumuskan strategi, misi organisasi merupakan daswar dari perumusan strategi itu sendiri.

2) Mengidentifikasi peluang dan juga ancaman lingkungan eksternal organisasi

Setelah mengembangkan misi organisasi selanjutnya adalah mengidentifikasi lingkungan luar organisasi. Lingkungan luar organisasi akan mendatangkan

peluang juga ancaman. Perumusan strategi perlu merinci peluang dan ancaman yang ada dan mungkin terjadi di sekitar organisasi.

3) Mengidentifikasi kekuatan dan juga kelemahan lingkungan internal organisasi

Selain faktor eksternal, perumusan strategi juga memerlukan data tentang lingkungan internal organisasi. Lingkungan internal organisasi diperlukan sebagai data perumusan strategi yaitu kekuatan dan juga kelemahannya. Jika perumusan strategi dapat mengidentifikasi dengan baik maka akan menjadi salah satu dasar strategi yang akan diterapkan. Strategi tersebut nantinya akan membuat kekuatan organisasi akan menjadi lebih optimal dan kelemahan organisasi juga dikelola dengan baik.

4) Menetapkan tujuan jangka panjang

Setelah mengetahui tentang kelemahan dan kekuatan internal perusahaan lalu selanjutnya adalah menetapkan tujuan jangka panjang.

5) Menentukan alternatif strategi

Alternatif strategi diperlukan untuk mendapatkan pilihan strategi lain yang bisa dipilih. Setiap strategi tentunya memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing.

6) Pemilihan strategi untuk dilaksanakan

Tahap terakhir dalam perumusan strategi adalah pemilihan strategi terbaik yang bisa diterapkan dalam organisasi. Pembuat strategi tentunya memiliki alasan tersendiri dalam memilih sebuah strategi yang cocok bagi organisasi, pilihan tersebut tentu telah melalui proses sebelumnya dengan memperhatikan berbagai macam faktor.

Pelaksanaan Strategi

Setelah dirumuskan, sebuah strategi akan dilaksanakan. Tahapan pelaksanaan strategi dalam sebuah organisasi dapat dirinci sebagai berikut :

a. Mengembangkan strategi dengan dukungan budaya organisasi

Budaya organisasi yang sudah menjadi identitas organisasi dapat mendukung pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Jika ternyata budaya organisasi tidak mendukung strategi tersebut maka perlu dilakukan peninjauan kembali.

b. Membuat struktur organisasi yang efektif

Struktur organisasi yang efektif dapat mengoptimalkan kinerja karyawan yang telah ditempatkan dalam posisinya masing-masing. Organisasi yang efektif akan lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan. Kerja sama antar karyawan lintas fungsional menjadi penting karena sebuah organisasi adalah kerja kolektif yang melibatkan banyak individu.

c. Mengarahkan kegiatan pada bidang organisasi

Kegiatan menjadi penting karena akan berhadapan langsung dengan masyarakat, banyak yang mengatakan kegiatan adalah ujung tombak organisasi. Sebuah kegiatan tentu harus dapat diterima oleh masyarakat jika ingin sukses. Pelaksanaan strategi organisasi juga berkaitan dengan bidang kegiatan organisasi tersebut.

d. Mempersiapkan anggaran

Anggaran diperlukan untuk berjalannya proses operasional organisasi. Sumber anggaran organisasi bisa ditentukan sesuai dengan strategi yang telah dirumuskan

e. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi

Sistim informasi organisasi berkaitan dengan sumber daya manusia organisasi dan juga teknologi informasi yang ada dalam organisasi. Sistim informasi ini mencakup komunikasi yang terjadi antara alat informasi dengan sumber daya dalam organisasi. Sistim informasi organisasi yang baik akan mempermudah proses operasional organisasi

f. Menghubungkan sumber daya manusia dengan kinerja organisasi

Sumber daya manusia selanjutnya dialokasikan berdasarkan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak. Karyawan organisasi atau organisasi dapat memberikan kontribusinya dalam melaksanakan strategi tersebut. Pimpinan jga harus dapat meyakinkan karyawan tentang strategi yang telah dibuat.

Evaluasi strategi

Setelah strategi tersebut dilaksanakan maka dilakukan evaluasi strategi. Evaluasi strategi merupakan tahap yang paling akhir dalam sebuah manajemen strategi. Secara rinci evaluasi strategi terdiri dari beberapa tahapan berikut :

a. Meninjau kembali faktor internal dan eksternal organisasi pada saat sekarang

Faktor internal dan eksternal organisasi bersifat dinamis atau berubah-ubah. Perkembangan perubahan lingkungan organisasi perlu dipantau secara rutin karena juga berkaitan dengan strategi yang telah ditetapkan. Jika ternyata ada faktor-faktor yang telah berubah maka perlu dilakukan identifikasi kembali

apakah sesuai dengan strategi yang ada. Jika ternyata sudah tidak sesuai lagi maka strategi dapat diubah sesuai dengan perubahan faktor-faktor tersebut.

b. Mengukur kinerja

Kinerja dapat diukur berdasarkan beberapa indikator. Kinerja sendiri merupakan pencapaian berhasil atau tidaknya sebuah tujuan organisasi. Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Di dalam proses manajemen strategi, tahapan evaluasi juga berupa pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut dapat mengindikasikan sebuah strategi berhasil atau tidak diterapkan guna pencapaian tujuan yang ditetapkan.

c. Mengambil tindakan korelasi yang diperlukan

Terahir dalam tahapan evaluasi adalah menentukan tindakan yang perlu dilakukan untuk proses koreksi. Proses koreksi ini dilakukan agar penentuan strategi selanjutnya lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang mungkin terdapat dalam strategi sebelumnya.

Tony Morden dalam bukunya *Principles of Strategic Management* menyebutkan bahwa manajemen strategi terdiri atas empat komponen proses. Walaupun sedikit berbeda dengan tahapan manajemen strategi yang telah kita sebutkan namun pada dasarnya serupa. Komponen tersebut antara lain :

a. Strategi analisis dan Perencanaan

Strategi analisis merupakan sebuah proses dengan memahami karakteristik dan kemampuan internal organisasi serta mengidentifikasi faktor eksternal yang penting. Sedangkan proses perencanaan di dasarkan pada empat variabel yaitu analisis waktu, analisis resiko, analisis proses peramalan atau perkiraan dan deskripsi dari proses perencanaan kegiatan.

2. Mengidentifikasi yang ada, baik yang bersifat formal maupun informal secara jelas dan transparan, karena mandat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan suatu institusi.
3. Memperjelas misi dan nilai-nilai institusi, karena posisinya penting sebagai tujuan bagi kebutuhan sosial atau politik yang ingin diraih.
4. Nilai lingkungan eksternal yang menyangkut peluang maupun ancaman yang ada. Faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan eksternal ini adalah meliputi politik, ekonomi, sosial dan teknologi.
5. Menilai lingkungan internal yang berhubungan dengan kekuatan yang dimiliki institusi maupun kelemahan yang ada. Dalam hal ini institusi dapat memonitor sumber daya sebagai input, strategi saat ini sebagai konversi, dan kinerja yang diperoleh sebagai output.
6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi, antara lain yang menyangkut tujuan, cara, falsafah, lokasi, ketepatan waktu, pihak-pihak (stake holder) yang mendapat keuntungan atau mengalami kerugian jika strategi baru diimplementasikan.
7. Merumuskan strategi baru dengan tepat untuk mengelola isu-isu strategi yang ada dan muncul kemudian.
8. Membangun suatu visi institusi yang tepat dimasa yang akan datang.

Arti Mandat, Visi dan Misi

a. Mandat

Tugas dan beban yang dipikul oleh suatu institusi untuk melaksanakan suatu program atau pembangunan yang sesuai dengan tuntutan aspirasi yang

b. Strategi Formulasi dan Pengambilan Keputusan

Proses strategi formulasi dan pengambilan keputusan dilakukan untuk mengembangkan misi, tujuan dan strategi organisasi.

c. Strategi Pemilihan

Proses pemilihan digunakan untuk mengidentifikasi pilihan alternatif yang bisa dilakukan. Pilihan tersebut nantinya akan dibandingkan mana yang lebih baik dan menguntungkan bagi organisasi

d. Strategi Implementasi

Strategi implementasi ataupun pelaksanaan tergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Pengetahuan, teknologi dan kompetensi sumber daya organisasi yang akan menentukan proses pelaksanaan strategi tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Pelaksanaan strategi akan berhasil jika sumber dayanya mendukung.

Nawawi, H. Hadari (2000 : 147-148) menginventarisir 4 (empat) definisi dari manajemen strategi sebagai berikut :

1. Manajemen strategi adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penerapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya.
2. Manajemen strategi adalah usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan organisasi untuk mengeksploitasi peluang yang muncul guna mencapai tujuannya yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan

3. Manajemen strategi adalah suatu keputusan dan tindakan yang mengarah pada pengembangan suatu strategi atau strategi-strategi yang efektif untuk membantu mencapai tujuan organisasi.
4. Manajemen strategi adalah perencanaan berskala besar (perencanaan strategi) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (visi), dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat mendasar dan prinsipil).

Penerapan manajemen strategi pada level organisasi mikro, pada dasarnya dapat juga digunakan untuk analisa mencari strategi yang tepat dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan. Teknik analisa dalam manajemen strategi amat relevan untuk dipakai untuk menganalisis prospek dan performance pengembangan sektor ketahanan pangan di kabupaten sumba timur. Melalui komponen analisa yang dimiliki oleh manajemen strategi, maka akan diperoleh visi dan misi yang tepat untuk kabupaten sumba timur dalam usaha untuk mengembangkan ketahanan pangan diseluruh wilayah sumba timur yang berpotensi.

Strategi pengembangan ini diperoleh melalui analisa lingkungan internal dan eksternal untuk menemukan mengidentifikasi isu atau faktor strategis sebagai temuan yang dapat dipergunakan dalam menentukan masa depan pengembangan sektor ketahanan pangan di kabupaten sumba timur

Manfaat dari manajemen strategik (Hadari Nawawi, 2000 : 183-186) adalah sebagai berikut :

1. Institusi atau organisasi akan menjadi dinamis dalam berproses atau beraktifitas

2. Mampu menjadi pengendali dalam mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki secara terpadu dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen secara efisien dan efektif
3. Penerapan manajemen strategi dapat dilakukan dengan memilih dan menetapkan strategi sebagai pendekatan yang logis, rasional dan sistematis sebagai acuan dalam perumusan dan pelaksanaannya.
4. Berfungsi sebagai sarana mengkomunikasikan gagasan, kreatifitas, prakarsa, inovasi dan informasi baru, serta cara merespon perubahan lingkungan yang ada.
5. Mampu mendorong semua pihak (stake holder) yang ada untuk ikut serta dan terlibat sesuai dengan wewenang dan posisi yang dimilikinya
6. Menuntut semua pihak yang ada atau terlibat untuk ikut berpartisipasi secara penuh terhadap keberhasilan yang ingin dicapai.

Jadi manajemen strategi memberikan gambaran kepada pengambil keputusan mengenai bagaimana suatu institusi dapat digerakkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban, dengan mengolah secara efektif faktor-faktor strategi yang ada.

Untuk menerapkan teknik manajemen strategi secara baik dan berhasil, maka harus mempertimbangkan delapan langkah pokok berikut ini (John M. Bryson, 1999 : 55-71)

1. Kesepakatan awal terhadap suatu proses manajemen strategik. Untuk itu perlu dilakukan negosiasi dengan para pembuat keputusan (decision maker) agar diperoleh dukungan dan komitmen dalam implementasinya kemudian.

diinginkan oleh pihak pemberi kewenangan sebagai suatu tujuan atau cita-cita yang harus diwujudkan.

b. Visi

Suatu keadaan atau kondisi masa depan yang ingin diwujudkan yang berfungsi sebagai penggalang harapan dan semangat untuk mencapai tujuan yang diinginkan di masa yang akan datang. Gambaran ke depan ini harus mampu mengarahkan dan menjadi inspirasi pihak-pihak yang berkepentingan untuk berupaya mewujudkan tujuan

Dan keinginan masa depan itu.

Jadi visi merupakan pandangan dan cita-cita yang ingin diraih untuk waktu yang akan datang dan berfungsi sebagai pedoman bagi arah pengembangan suatu daerah di masa mendatang.

c. Misi

Misi pada hakekatnya berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi. Tujuan organisasi menjadi pedoman apa yang harus dilakukan suatu institusi sebagai suatu prioritas dan bagaimana menggunakan sumber daya secara tepat. Suatu misi mengandung serangkaian tindakan yang lebih nyata atau sesuatu yang harus diemban untuk pencapaian visi.

2.4. Penelitian Terdahulu

Firman Noer (2002) melakukan kajian mengenai Strategi Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Kawasan Sentra Produksi Koto Hilalang, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan untuk menyusun dan merumuskan implikasi strategi yang tepat bagi kawasan sentra produksi Koto

Hilalang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Responden dipilih secara *purposive* yaitu para ahli yang berpengalaman dan mempunyai kemampuan dalam memberikan penilaian terhadap pengembangan agribisnis sapi potong. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi langsung, wawancara, penyebaran kuesioner, dan studi pustaka.

Penelitian tersebut dilakukan dalam lima tahapan, yaitu (1) Analisis gap untuk memperoleh perkembangan agribisnis sapi potong di kawasan, (2) Analisis faktor-faktor internal dan eksternal untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh bagi kawasan, (3) Analisis matriks evaluasi faktor internal dan eksternal (IFE-EFE), (4) Analisis matriks SWOT untuk mengetahui alternatif-alternatif strategi pengembangan agribisnis sapi potong di kawasan sentra produksi, dan (5) Analisis AHP untuk mengetahui peringkat alternatif strategi pengembangan agribisnis sapi potong di kawasan sentra produksi.

Melalui kombinasi matriks IFE, EFE, dan matriks SWOT maka diperoleh beberapa alternatif strategi, yaitu strategi pengembangan investasi/modal usaha, strategi kerjasama memperkuat kelompok peternak sapi kawasan, strategi peningkatan teknologi peternak sapi di kawasan, strategi peningkatan posisi peternak dan pemasaran sapi, dan strategi diversifikasi lahan rumput. Berdasarkan hasil analisis AHP diketahui prioritas strategi adalah pengembangan investasi/modal usaha dan kerjasama penguatan kelompok peternak sapi di kawasan produksi Koto Hilalang.

Mahmuri (2005) melakukan penelitian mengenai Analisis Situasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Penelitian tersebut bertujuan mengkaji ketahanan pangan rumah tangga, khususnya dari aspek distribusi dan konsumsi pangan serta menganalisis hubungan implementasi antara kebijakan ketahanan pangan dengan situasi ketahanan pangan di Pulau Panggang dan Pulau Untung Jawa. Desain penelitian yang digunakan adalah *Crossectional Study Design* dengan pendekatan *Comparative Analysis* melalui kajian pustaka dan penelitian terdahulu, analisis data sekunder, survey dan analisis data primer. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner terhadap beberapa kelompok responden, penelusuran dan inventarisasi berbagai dokumen dan atau laporan resmi dari dinas/instansi terkait ketahanan pangan serta studi literatur.

Responden penelitian ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu (1) pengelola program, pejabat pemerintah yang berwenang dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan dan pelaksanaan program ketahanan pangan yang dipilih secara *purposive*, (2) keluarga, yaitu 50 sampel keluarga di Pulau Panggang dan 50 sampel keluarga di Pulau Untung Jawa yang dipilih secara acak dengan metode *simple random sampling*, dan (3) pedagang, yaitu 5 sampel pedagang di Pulau Panggang dan 5 sampel pedagang di Pulau Untung Jawa yang dipilih secara acak dengan metode *simple random sampling*.

Hasil analisis yang diperoleh yaitu, konsumsi pangan tingkat rumahtangga di Kepulauan Seribu masih di bawah kecukupan yang dianjurkan baik dari sisi kuantitas AKE maupun kualitas skor PPH. Pola konsumsi pangan rumah tangga di Kepulauan Seribu dipengaruhi oleh jumlah anggota rumahtangga, pola pendapatan, pola pengeluaran keluarga, dan kebiasaan makan. Faktor yang paling

dominan terhadap konsumsi pangan rumah tangga adalah jumlah anggota keluarga dan pendapatan. Semakin besar jumlah anggota keluarga dan semakin rendah pendapatan, maka semakin rendah pula tingkat konsumsinya. Aspek distribusi pangan dapat diketahui dari harga pangan. Harga pangan di Pulau Panggang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Untung Jawa.

Masih rendahnya pencapaian situasi ketahanan pangan di Pulau Panggang dan Pulau Untung Jawa yang ditandai oleh rendahnya konsumsi pangan dan tingginya harga pangan merupakan dampak dari kebijakan ketahanan pangan yang belum optimal. Hal ini tercermin dalam rendahnya perhatian pemerintah dalam mensosialisasikan berbagai peraturan tentang pangan, rendahnya strategi advokasi dan implementasi kebijakan ketahanan pangan serta lemahnya fungsi koordinasi dan optimalisasi pemanfaatan kelembagaan pangan yang ada.

Sukari (2009) mengkaji tentang Strategi Pengembangan Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, menganalisis situasi ketahanan pangan dan kondisi lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi pengembangan kebijakan dan program ketahanan pangan serta merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada 70 orang responden yang dipilih secara *purposive*. Data sekunder diperoleh penelusuran pustaka dan dokumen pembangunan ketahanan pangan. Analisis yang dilakukan meliputi

analisis isi terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, analisis deskriptif terhadap situasi ketahanan pangan, analisis SWOT dan AHP untuk merumuskan alternatif strategi dan prioritas pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Situasi ketersediaan pangan tergolong ideal yaitu energi 2.318 kkal/kapita/hari (105% AKE) dan protein 72,95 gram/kapita/hari (128% AKP). Meskipun dari sisi ketersediaan pangan sudah mencukupi, namun konsumsi pangan masyarakat masih rendah yaitu energi 1.468 kkal/kapita/hari (73,4% AKE) dan protein 63,2 gram/kapita/hari (121% AKP). Hasil evaluasi faktor eksternal dan internal menunjukkan bahwa strategi pengembangan kebijakan dan program ketahanan pangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berada pada kuadran III (rasionalisasi atau *turnaround*) yaitu strategi mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang.

Berdasarkan hasil analisis AHP diperoleh rekomendasi kebijakan operasional ketahanan pangan, yaitu: prioritas pertama adalah pengembangan kapasitas distribusi pangan dengan cara meningkatkan efisiensi sistem distribusi pangan. Prioritas kedua adalah peningkatan kualitas SDM, prioritas ketiga peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, prioritas keempat pengembangan dan peningkatan intensitas jaringan kerjasama, prioritas kelima pengembangan diversifikasi dan konsumsi pangan, prioritas keenam pembangunan sistem cadangan pangan, dan prioritas ketujuh peningkatan kelembagaan pangan.

Analia (2009) juga melakukan penelitian mengenai Analisis Diversifikasi Konsumsi Pangan Rumah tangga di Sumatera Barat Menuju Pola Pangan Harapan

(PPH). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga dan variabel-variabel yang mempengaruhinya di Sumatera Barat. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan data modul konsumsi Susenas 2005, sosioekonomi dan sosiodemografi. Hasil penelitian menunjukkan konsumsi pangan rumah tangga belum seimbang dan beragam dengan skor PPH baru mencapai 67,72 dari skor maksimal 100. Tingkat pendapatan, jumlah anggota rumah tangga dan pendidikan istri merupakan faktor-faktor yang signifikan terhadap pola diversifikasi konsumsi pangan rumah tangga.

Mahfi (2009) melakukan kajian mengenai Analisis Situasi Pangan dan Gizi untuk Perumusan Kebijakan Operasional Ketahanan Pangan dan Gizi Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi ketahanan pangan dan lingkungan strategis yang mempengaruhinya serta penyusunan kebijakan operasional ketahanan pangan. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui kondisi aktual ketahanan pangan dan merumuskan lingkungan strategis ketahanan pangan yang dianalisis menggunakan SWOT. Data primer hasil wawancara kuesioner dianalisis menggunakan AHP untuk merumuskan kebijakan operasional ketahanan pangan Kabupaten Lampung Barat.

Hasil penelitian menunjukkan kondisi distribusi pangan, konsumsi pangan dan status gizi yang menjadi permasalahan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat. Kondisi lingkungan strategis ketahanan pangan berada pada kuadran II (diversifikasi). Rekomendasi strategi yang dihasilkan yaitu pengembangan SDM, pengembangan teknologi budidaya dan pengolahan pangan, pengembangan sarana prasarana pertanian, pengembangan lumbung pangan,

kompetensi aparat daerah, peningkatan pelayanan kesehatan, dan penanganan kemiskinan

Penelitian dengan menggunakan analisis SWOT dan AHP untuk menentukan strategi juga dilakukan oleh Rochman *et al* (2011). Penelitian tersebut berjudul *Analysis of Indonesia Agroindustry Competitiveness in Nanotechnology Development Perspective Using SWOT-AHP Method*. Penelitian ini dilakukan pada lima agroindustri yang dianggap potensial untuk mengembangkan nanoteknologi di Indonesia.

Analisis SWOT-AHP dilakukan untuk menentukan posisi keunggulan bersaing masing-masing industri. Faktor internal yang didominasi oleh pengembangan master teknologi dan ketersediaan bahan baku serta energi memiliki nilai signifikansi yang lebih besar dibandingkan faktor eksternal yaitu dampak ekonomi bagi industri seperti peningkatan nilai tambah produk-produk yang menggunakan nanoteknologi serta peningkatan jangkauan pasar. Hasil studi ini dapat digunakan sebagai referensi bagi stakeholder terkait untuk memformulasikan strategi dalam rangka peningkatan agroindustri nasional melalui pengembangan nanoteknologi.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kahraman, *et al.* (2007) mengenai *Prioritization of e-Government Strategies Using a SWOT-AHP Analysis: The Case of Turkey*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendefinisikan dan menemukan prioritas dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari aplikasi *e-Government* di Turki. Selain itu untuk menentukan dan mengevaluasi alternative strategi dari aplikasi *e-Government* di level nasional di Turki. Hasil penelitian ini yaitu strategi prioritas yang diperoleh adalah menyederhanakan

proses dalam *e-Government* untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui penelitian ini diketahui bahwa alat analisis SWOT-AHP mampu menentukan faktor-faktor strategis dan prioritas strategi secara tepat di lingkup pemerintahan.

Relevansi penelitian yang dilakukan oleh Firman Noer (2002) dan Sukari (2009) dengan penelitian ini adalah penggunaan alat analisis IFE dan EFE, hasil analisis tersebut digunakan dalam penilaian dan penentuan faktor-faktor yang akan digunakan dalam analisis SWOT. Alternatif strategi yang dihasilkan kemudian dianalisis menggunakan AHP untuk mengetahui prioritas strategi. Relevansi penelitian Mahfi (2009), Rochman *et al* (2011), dan Kahraman (2007) dengan penelitian ini adalah penggunaan alat gabungan analisis SWOT dan AHP mampu memberikan prioritas strategi yang tepat dan terukur secara kuantitatif. Mahmuri (2005) dan Analia (2009) menemukan bahwa pola konsumsi pangan rumah tangga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan istri dan tingkat pendapatan. Selain itu, kebijakan ketahanan pangan yang belum optimal memiliki dampak yang signifikan terhadap rendahnya pencapaian situasi ketahanan pangan.

Tabel 3. Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Firman Noer (2002)	Strategi Pengembangan Agribisnis Sapi Potong di Kawasan Sentra Produksi Koto Hilalang, Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat	Analisis IFE-EFE, SWOT, AHP	Prioritas strategi adalah pengembangan investasi/modal usaha dan kerjasama penguatan kelompok peternak sapi di kawasan produksi Koto Hilalang
2	Mahmuri (2005)	Analisis Situasi dan Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	<i>Comparative Analysis</i>	Konsumsi pangan tingkat rumah tangga di Kepulauan Seribu masih rendah, antara lain dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga dan pendapatan. Hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan ketahanan pangan yang belum optimal
3	Sukari (2009)	Strategi Pengembangan Kebijakan dan Program Ketahanan Pangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Analisis SWOT, AHP	Strategi pengembangan kebijakan dan program ketahanan pangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berada pada kuadran III (rasionalisasi). Prioritas strategi adalah pengembangan kapasitas distribusi pangan
4	Analia (2009)	Analisis Diversifikasi Konsumsi Pangan Rumah tangga di Sumatera Barat Menuju Pola Pangan Harapan (PPH)	Analisis deskriptif	Tingkat konsumsi pangan rumah tangga di Sumatera Barat belum seimbang dan beragam, yang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, jumlah anggota rumah tangga dan pendidikan istri
5	Mahfi (2009)	Analisis Situasi Pangan dan Gizi untuk Perumusan Kebijakan Operasional Ketahanan Pangan dan Gizi Kabupaten Lampung Barat	Analisis SWOT, AHP	Kondisi lingkungan strategis ketahanan pangan berada pada kuadran II (diversifikasi). Rekomendasi strategi yang dihasilkan adalah pengembangan SDM, pengembangan teknologi budidaya dan pengolahan pangan, pengembangan sarana prasarana pertanian, pengembangan lumbung pangan, kompetensi aparat daerah, peningkatan pelayanan kesehatan, dan penanganan kemiskinan
6	Rochman, et al (2011)	<i>Analysis of Indonesia Agroindustry Competitiveness in Nanotechnology Development Perspective Using SWOT-AHP Method</i>	Analisis SWOT, AHP	Faktor internal yang dominan yaitu pengembangan master teknologi, ketersediaan bahan baku dan energi sementara faktor eksternal yang dominan yaitu dampak ekonomi bagi industri
7	Kahraman, et al (2007)	<i>Prioritization of e-Government Strategies Using a SWOT-AHP Analysis: The Case of Turkey</i>	Analisis SWOT, AHP	Strategi prioritas yang diperoleh adalah menyederhanakan proses dalam <i>e-Government</i> untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kasus

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur

3.3. Fokus penelitian

Penelitian ini difokuskan pada strategi ketahanan pangan di kabupaten Sumba Timur. Untuk menemukan strategi yang tepat maka sub fokus kajiannya adalah pemetaan secara internal berkenaan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, pemetaan secara eksternal berkenaan dengan peluang dan ancaman yang dihadapi.

Analisis Lingkungan Strategis

a. Lingkungan Internal

Analisa lingkungan internal adalah analisa yang dilakukan pada level internal organisasi dalam rangka menilai kekuatan (strength) dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Dengan demikian proses analisa lingkungan internal merupakan proses yang sangat penting dan harus dilakukan, karena dengan analisa lingkungan internal maka akan diketahui kekuatan dan kelemahan yang selanjutnya berguna untuk mengetahui isu-isu strategis (Rangkuti, 1997 : 19).

Adapun yang tercakup dalam lingkungan internal adalah faktor sumber daya, strategi yang digunakan dan faktor kinerjanya.

b. Lingkungan Eksternal

Analisa lingkungan eksternal adalah faktor-faktor yang mengekspresikan diri sebagai kekuatan atau kelemahan yang berada di luar organisasi, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi suatu organisasi secara paksa dan pada akhirnya memberikan dampak pengaruh timbal balik antara organisasi dan lingkungan tersebut.

Pada hakekatnya lingkungan eksternal mengandung dua aspek yaitu peluang dan ancaman. Lingkungan eksternal suatu institusi atau organisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap pencapaian misi yang disepakati. Pengaruh yang cukup kuat ini menyebabkan perlunya perhatian yang serius terhadap dimensi yang terkandung didalamnya, meskipun berada di luar organisasi. Adapun faktor-faktor yang tercakup dalam faktor eksternal tersebut adalah : aspek politik, ekonomi, sosial dan tehnologi.

Untuk menemukan strategi yang tepat dan handal maka akan dilakukan analisa dengan menggunakan teknik dalam manajemen strategi dengan mengelaborasi Visi dan Misi yang dimiliki Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur dalam upaya peningkatan ketahanan pangan, dan juga menganalisis faktor-faktor yang relevan sebagai faktor internal maupun eksternal dalam suatu sistim lingkungan yang saling pengaruh mempengaruhi terhadap kinerja peningkatan ketahanan pangan di kabupaten sumba timur. Temuan-temuan yang akan diperoleh berada dalam suatu kerangka analisa dengan menggunakan metode manajemen strategi terutama teknik analisa data dengan

menggunakan analisa matriks SWOT (Strength Weakness Opporyunity Threat Matriks Analisis).

3.4. Sumber Data

Data dihimpun dari beberapa sumber yaitu bersumber dari orang (informan), data yang bersumber dari dokumen dan data yang bersumber dari peristiwa.

3.5. Teknik Pengumpulan data

Data yang bersumber dari orang (informan) dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara mendalam.

Informan ditetapkan dengan teknik *purposive sampling* yaitu menggunakan sejumlah pertimbangan berdasarkan tujuan penelitian. Pertimbangan yang digunakan adalah: Informan yang bersangkutan memiliki keahlian dan kompeten di bidangnya. Informan yang dipilih adalah para pengambil keputusan atau orang-orang yang ditunjuk oleh pimpinan instansi terkait pembangunan ketahanan pangan maupun *stakeholder* lain terkait, yaitu: 1) Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan, 2) Kepala Badan Bimas dan Ketahanan Pangan , 3) Kepala Bulog Divisi Regional Sumba Timur, 4) Kepala Sabandar pelabuhan laud Sumba Timur

Data dokumen yang dihimpun berupa rekapan data, dokumen, gambar, dan hasil dari wawancara terhadap responden .

Data peristiwa dihimpun dengan teknik observasi secara langsung. Observasi dilakukan terhadap 270 (dua ratus tujuh puluh) sampling yang tersebar pada 9 kecamatan dan 27 desa yang tersebar di kabupaten sumba timur

3.5.1. Instrumen Penelitian

Instumen penelitian ini adalah peneliti sendiri yang memperlengkapi dengan semua instrumet pengambilan data yang dianggap valid dan dapat mendukung penelitian ini. Dalam penelitian ini, alat untuk mengumpulkan data dan informasi dalam penelitian ini adalah Instrumen Wawancara dan Dokumentasi serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang di anggap oleh penelitian dapat membantu memberikan informasi yang signifikan dengan permasalahan penelitian ini. Dokumen tersebut dapat berupa literatur yang sesuai dengan dengan masalah penelitian serta berbagai hasil kajian terdahulu yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

3.5.2. Prosedur Pengumpulan Data

- Analisa data sekunder yang meliputi data-data yang relevan yang berada di birokrasi pemerintah kabupaten sumba timur antara lain : Badan Bimas dan Ketahanan Pangan, Bappeda dan penjelajahan sumber kepustakaan
- Wawancara langsung dengan Dewan Ketahanan Pangan, aparat Badan Bimas dan Ketahanan Pangan kabupaten sumba timur yang membidangi sektor ketahanan pangan.
- Pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk melihat dan membandingkan fakta yang diperoleh dari hasil wawancara.

Teknik Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di bawah ini :

- a. *Indepth interview* (wawancara secara mendalam) dan *Focus Group Discussion* (FGD), dilaksanakan dengan responden ahli yang telah dipilih, untuk

menentukan faktor-faktor strategis, menentukan aktor/pelaku tujuan dan alternatif strategi, mempertajam analisis dan mengambil beberapa keputusan strategik.

- b. Studi kepustakaan diperoleh dan dikumpulkan dengan cara membaca, mempelajari dan mengutip pendapat dari berbagai sumber buku, tesis, laporan atau dokumen instansi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.6. Teknik Analisis Data

Data yang dihimpun dianalisis dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Penggunaan alat analisis ini didahului dengan beberapa tahapan. Pertama, data hasil wawancara yang direkam dibuatkan transkripnya. Dari transkrip tersebut kemudian dilakukan pemetaan/kategorisasi. Kategorisasi dilakukan ke dalam kelompok kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Berdasarkan hasil kategorisasi tersebut kemudian ditetapkan strategi bagi ketahanan pangan di kabupaten Sumba Timur. Data-data dokumen dan hasil observasi juga dianalisis dengan menggunakan langkah yang sama seperti hasil wawancara.

Alat analisi yang digunakan dalam memetakan isu atau faktor strategis adalah analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat Analysis), sehingga dapat diketahui struktur serta tingkat strategis dari faktor-faktor tersebut. Dengan matriks SWOT ini dapat diketahui isu atau faktor-faktor strategis yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dalam pengembangan sektor ketahanan pangan.

Teknik analisa matriks SWOT merupakan tahap awal dalam menemukan isu strategis yang nantinya digunakan bagi penemuan strategi pengembangan

ketahanan pangan di kabupaten sumba timur. Diagram matriks SWOT dapat digambarkan pada bagan 2 berikut ini:

DIAGRAM MATRIKS SWOT

Efas / Ifas	Kekuatan (S) Identifikasi Kekuatan	Kelemahan (W) Identifikasi Kelemahan
Peluang (O) Identifikasi Kesempatan	Strategi (SO) Menggunakan kekuatan untuk Menangkap Kesempatan	Strategi (WO) Mengatasi Kelemahan dgn Mengambail Kesempatan
Ancaman (T) Identifikasi Ancaman	Strategi (ST) Menggunakan kekuatan untuk Menghindari Ancaman	Strategi (WT) Meminimalkan Kelemahan dgn Menghindari Ancaman

Sumber : Wahyudi, Agustinus, 1996 : 105

Beberapa alternatif strategi yang dihasilkan dari analisa matriks SWOT ini adalah :

1. Strategi SO (Strength Opportunity Strategy) yaitu strategi yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari peluang yang ada di lingkungan eksternal
2. Strategi WO (Weakness Opportunity Strategy) yaitu strategi untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan luar
3. Strategi ST (Strength Threat Strategy) yaitu strategi yang menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar.

4. Strategi WT (Weakness Threat Strategy) yaitu strategi yang digunakan untuk memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman yang datang dari lingkungan luar.

Evaluasi Faktor Eksternal (*External Factor Evaluation*)

Menurut David (2006), evaluasi faktor eksternal (*external factor evaluation*) digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal dalam perusahaan/organisasi. Faktor-faktor peluang dan ancaman yang diidentifikasi dalam penelitian ini akan dievaluasi dengan analisis eksternal, yaitu dengan menggunakan matriks EFE. Hasil analisis eksternal ini akan menggambarkan apakah peluang yang ada kemungkinan dapat direspon dengan baik, serta apakah ancaman yang akan muncul kemungkinan dapat diatasi. Terdapat lima langkah yang harus dilakukan dalam mengembangkan matriks EFE sebagai berikut (David, 2006):

- a. Mendaftar faktor eksternal kunci sebagaimana diidentifikasi dalam proses penilaian. Terlebih dahulu didaftar peluang kemudian ancaman. Dilakukan sekhusus mungkin dengan menggunakan persentase atau rasio
- b. Memberi bobot setiap faktor dengan angka 0 (tidak penting) sampai 1 (terpenting). Bobot tersebut menandakan tingkat kepentingan relatif faktor tersebut. Jumlah seluruh bobot sama dengan 1,0. Pengolahan data dilakukan dengan teknik Delphi untuk mengetahui bobot dari setiap faktor strategis (Jain, 1997). Perhitungan bobot faktor eksternal dapat dilihat pada Tabel 3.6

Tabel 3.1. Penentuan Bobot Faktor Eksternal

Faktor Strategis	Tingkat Kepentingan					Jumlah Responden	Rata- rata	Bobot
	1	2	3	4	5			
1	a	b	c	d	e	F	G	l
2							H	m
3							I	n
4							J	o
N								
Jumlah Rata-rata							K	1,00

Penjelasan:

- ❖ 1...5 = Tingkat kepentingan faktor-faktor strategis
- ❖ 1...N = Faktor-faktor strategis yang digunakan
- ❖ G = $\{(1 \times a) + (2 \times b) + (3 \times c) + (4 \times d) + (5 \times e)\} : f$
- ❖ K = $G + H + I + J$
- ❖ l = G/K

c. Memberikan peringkat 1 sampai dengan 4 pada tiap faktor eksternal kunci untuk menunjukkan seberapa efektif strategi yang ada saat ini merespon faktor tersebut, dimana: 4 adalah respon superior (luar biasa), 3 adalah respon diatas rata-rata, 2 adalah respon rata-rata dan 1 adalah respon di bawah rata-rata. Peringkat adalah seberapa efektif organisasi dalam merespon faktor-faktor eksternal. Dengan demikian, nilainya didasarkan pada kondisi organisasi. Perhitungan peringkat eksternal dapat dilihat pada Tabel 3.7

3.....			
Ancaman		Skala 1-4	Perkalian bobot dan peringkat
1			
2.....			
3.....			
Total	1		

Sumber: David, 2006.

3.6.3 Evaluasi Faktor Internal (*Internal Factor Evaluation*)

Evaluasi faktor internal (*internal factor evaluation*) digunakan untuk mengetahui faktor-faktor internal perusahaan/organisasi berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dianggap penting (David, 2006). Pada prinsipnya tahapan kerja pada matriks IFE sama dengan matriks EFE yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan menelaah secara mendalam terhadap setiap faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari Kab Sumba Timur dalam upaya peningkatan ketahanan pangan
- b. Memberi bobot setiap faktor dengan angka 0 (tidak penting) sampai 1 (terpenting). Bobot tersebut menandakan tingkat kepentingan relatif faktor tersebut. Jumlah seluruh bobot sama dengan 1,0. Pengolahan data dilakukan dengan teknik Delphi untuk mengetahui bobot dari setiap faktor strategis (Jain, 1997). Perhitungan bobot faktor internal dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 3.4. Penentuan Bobot Faktor Internal

Faktor Strategis	Tingkat Kepentingan					Jumlah Responden	Rata-rata	Bobot
	1	2	3	4	5			
1	a	b	c	d	e	F	G	l
2							H	m
3							I	n
4							J	o
N								
Jumlah Rata-rata							K	1,00

Penjelasan:

- ❖ 1...5 = Tingkat kepentingan faktor-faktor strategis
- ❖ 1...N = Faktor-faktor strategis yang digunakan
- ❖ G = $\{(1 \times a) + (2 \times b) + (3 \times c) + (4 \times d) + (5 \times e)\} : f$
- ❖ K = $G + H + I + J$
- ❖ I = G/K

- c. Memberikan peringkat 1 sampai dengan 4 pada tiap faktor internal, dimana 4 adalah kekuatan utama, 3 adalah kekuatan kecil, 2 adalah kelemahan kecil dan 1 adalah kelemahan utama. Untuk lebih jelasnya, perhitungan peringkat faktor internal dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 3.5. Perhitungan Peringkat Faktor Internal

Kekuatan	Besarnya Nilai				Jumlah Responden	Peringkat
	1	2	3	4		
1.						P
2.						
3.						
4.						
N						

Kelemahan	Besarnya Nilai				Jumlah Responden	Peringkat
	1	2	3	4		
1.						P
2.						
3.						
4.						
N						

Penjelasan:

- ❖ $1...4$ = Besarnya nilai faktor-faktor kekuatan dan kelemahan
 - ❖ $1...N$ = Faktor-faktor strategis yang digunakan
 - ❖ p = Modus dari jawaban kolom nilai
- d. Mengalikan bobot masing-masing faktor dengan peringkat pada tiap faktor untuk memperoleh skor terbobot (*weighted score*);
- e. Menjumlahkan seluruh skor terbobot untuk mendapatkan skor terbobot total (*total weighted score*). Total skor terbobot akan berkisar antara 1 hingga 4. Angka 4 menunjukkan bahwa pelaksanaan bisnis katekin dan tanin sangat baik, sedangkan angka 1 sebaliknya. Total skor terbobot rata-rata adalah 2,5. Total nilai terbobot berada dibawah 2,5 menunjukkan posisi internal lemah, sedang total nilai terbobot yang berada diatas 2,5 menunjukkan posisi internal yang kuat (David, 2006). Tabel 11 menyajikan ilustrasi matriks IFE (*Internal Factor Evaluation*) yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 3.6. Ilustrasi Matriks IFE

Faktor Strategis Internal	Bobot	Peringkat	Skor terbobot
Kekuatan			
1		Skala 3-4	Perkalian bobot dan peringkat
2.....			
3.....			
Kelemahan			
1		Skala 1-2	Perkalian bobot dan peringkat

2.....			
3.....			
Total	1		

Sumber: David, 2006

Matriks SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats)

Setelah melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal maka akan diperoleh peluang dan ancaman sebagai faktor strategis eksternal serta kekuatan dan kelemahan sebagai faktor strategis internal. Setelah diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk masing-masing faktor kemudian dilakukan analisis SWOT.

Dalam mengembangkan alternatif strategi digunakan matriks SWOT untuk membantu dalam melakukan pencocokkan antar kekuatan dan peluang (strategi SO), kekuatan dan ancaman (strategi ST), peluang dan kelemahan (strategi WO) serta kelemahan dan ancaman (strategi WT). Matriks SWOT dapat dilihat pada Tabel 12. Tahapan yang dilakukan dalam menggunakan matriks SWOT adalah sebagai berikut (David, 2006):

- a. membuat daftar peluang eksternal;
- b. membuat daftar ancaman eksternal;
- c. membuat daftar kekuatan internal;
- d. membuat daftar kelemahan internal;
- e. mencocokkan kekuatan internal dan peluang eksternal serta melakukan pencatatan terhadap hasil dalam kolom strategi SO;
- f. mencocokkan kelemahan internal dan peluang eksternal serta melakukan pencatatan terhadap hasil dalam kolom strategi WO;

- g. mencocokkan kekuatan internal dan ancaman eksternal serta melakukan pencatatan terhadap hasil dalam kolom strategi ST; dan
- h. mencocokkan kelemahan internal dan ancaman eksternal serta melakukan pencatatan terhadap hasil dalam kolom strategi WT.

Tabel 3.7. Contoh Matriks SWOT

Faktor Internal Faktor Eksternal	KEKUATAN (<i>STRENGTH</i>)	KELEMAHAN (<i>WEAKNESS</i>)
PELUANG (<i>OPPORTUNITIES</i>)	Strategi S-O (Progresif) Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi W-O (Korektif) Mengatasi kelemahan untuk memanfaatkan peluang
ANCAMAN (<i>THREATS</i>)	Strategi S-T (Diversifikasi) Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi W-T (Defensif) Mengatasi kelemahan untuk menghindari ancaman

Sumber : David, 2006

Tahapan-tahapan di atas dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu bagian reduksi data dan bagian penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan menggunakan narasi dalam box, dalam tabel/matriks, dan juga dalam gambar.

3.7. Teknik Validasi hasil penelitian.

Data-data yang telah dihimpun dan disajikan kemudian divalidasi dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan meliputi triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan triangulasi teori/pustaka.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR

4.1.1. Keadaan Geografi

Secara astronomis Kabupaten Sumba Timur terletak antara 119,45° – 120,52° Bujur Timur (BT) dan 9,16° – 10,20° Lintang Selatan (LS). Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Sumba Timur memiliki batas-batas :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumba
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lautan Hindia
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sabu
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sumba Tengah

4.1.1.1. Jumlah Kecamatan

Kabupaten Sumba Timur terdiri dari 22 Kecamatan, yaitu :

Tabel 4. Sumba Timur dalam angka

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah penduduk	Kepadatan Penduduk (km ²)
1	Lewa	281,1	16.790	59.73
2	Nggaha Ori angu	286,4	9.119	31.84
3	Lewa Tidahu	322,1	6.637	20.61
4	Katala Hamulingu	453,1	3.975	8.77
5	Tabundung	514,4	9.100	17.69
6	Pinu Pahar	246,6	6.960	28.22
7	Paberiwai	199,7	6.178	30.94
8	Karera	334,6	8.507	25.42
9	Matawai lapawu	405,4	6.541	16.13
10	Kahaungu Eti	475,1	8.233	17.33
11	Mahu	196,6	3.967	20.18
12	Ngadu Ngala	207,9	5.136	24.70
13	Pahunga Lodu	349,8	12.780	36.54
14	Wula Waijelu	221,3	7.356	33.24
15	Rindi	366,5	8.925	24.35
16	Umalulu	307,9	16.548	53.74

17	Pandawai	412,6	15.327	37.15
18	Kambata Mapambuhang	412,7	3.755	9.10
19	Kota Waingapu	73,8	36.170	490.11
20	Kambera	52,0	29.865	574.33
21	Haharu	601,5	5.917	9.84
22	Kanatang	279,4	9.653	34.55

Sumber ; Statistik 2013

Peta rawan pangan di Kabupaten Sumba Timur menurut Kecamatan

4.1.1.2. Luas Wilayah

Luas wilayah daratan Sumba Timur 700 050 ha yang tersebar pada satu pulau utama (pulau sumba) dan 3 pulau kecil yaitu Pulau Prasalura, Pulau Mengkudu dan Pulau Nuha (belum berpenghuni). Sekitar 40% luas sumba timur merupakan daerah yang berbukit-bukit terjal terutama di daerah bagian selatan, dimana lereng-lereng bukit tersebut merupakan lahan yang cukup subur sementara daerah bagian utara berupa daratan yang berbatu dan kurang subur.

4.1.1.3. Musim

Seperti halnya daerah lain di Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumba timur memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada umumnya Sumba Timur diguyur hujan pada bulan Januari – April, sementara 8 bulan lainnya mengalami kemarau yang menyebabkan wilayah Sumba Timur tergolong wilayah kering.

4.1.2. Pemerintahan

1. Kabupaten Sumba Timur menjadi Daerah Tingkat II definitif berdasarkan Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Lembaran Negara Nomor 115 tahun 1958 serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649.
2. Secara administrasi, sejak tahun 2007 telah terjadi pemekaran sejumlah kecamatan di Sumba Timur menjadi 22 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 140 Desa. Kabupaten Sumba Timur dipimpin oleh seorang Bupati dengan ibukota kabupaten adalah Waingapu yang terletak di kecamatan Kota Waingapu.

3. Kelurahan adalah wilayah administrasi setingkat desa yang dikepalai oleh seorang Lurah yang berstatus Pegawai Negeri dan bertanggung jawab langsung kepada Camat. Seorang Kepala Desa berstatus bukan Pegawai Negeri dipilih langsung oleh masyarakat yang dalam melaksanakan pekerjaannya dibantu oleh seorang Sekretaris Desa (berstatus Pegawai Negeri) yang ditunjuk langsung oleh Bupati.
4. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur hasil Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak 30 orang (26 laki-laki dan 4 orang perempuan) yang berasal dari Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai demokrasi Indonesia Perjuangan, Parta Amanah Nasional, Partai Gerindra, Partai Kesatuan Pembangunan Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan dan partai Hanura.

4.1.3. Wilayah Administrasi

1. Sumber utama data kependudukan adalah Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Sensus Penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia Merdeka yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000 dan 2010. Untuk menjembatani ketersediaan data kependudukan dua periode sensus BPS melakukan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), yang telah dilakukan empat kali tahun 1976, 1985, 1995 dan 2005. Selain Sensus Penduduk dan SUPAS data penduduk juga diperoleh dari proyeksi penduduk dan registrasi penduduk yang dilakukan di masing-masing desa/kelurahan.

Dalam Sensus Penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial indonesia termasuk warga Negara Asing kecuali anggota Korps Diplomatik Negara sahabat beserta keluarganya. Metode pengumpulan data dalam sensus dilakukan dengan metode wawancara antara petugas sensus dengan responden.

Cara pencacahan yang dipakai dalam sensus penduduk adalah kombinasi antara *de facto* (untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap) dan *de jure* (untuk penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap). Yang termasuk penduduk bertempat tinggal tidak tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendara Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing dan pengungsi.

Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap tapi sedang bertugas keluar wilayah lebih dari enam bulan tidak dicacah ditempat tinggalnya. Sebaliknya seorang keluarga yang menempati suatu bangunan belum mencapai enam bulan tetapi bermaksud menetap disana dicacah ditempat tersebut.

2. Penduduk Sumba Timur adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Sumba Timur selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
3. Rata-rata pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu.
4. Kepadatan penduduk adalah banyak penduduk per km persegi.
5. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyak penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.
6. Rumah tangga adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika pengurusan makan sehari-hari dikelola bersama-sama menjadi satu.

7. Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.
8. Rata-rata anggota rumah tangga adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anggota rumah tangga per rumah tangga.
9. Sumber utama data ketenagakerjaan adalah Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang khusus dirancang untuk mengumpulkan informasi/ data ketenagakerjaan. Selain dilaksanakan secara tahunan Sakernas juga dilaksanakan secara triwulan yang dimaksud untuk memantau indikator ketenagakerjaan secara dini di Indonesia yang mengacu pada the key indicators of the labour market (KILM) yang direkomendasikan oleh ILO.

4.1.1.4. Sosial

1. Tidak/ belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak pernah atau belum pernah aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal.
2. Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan disuatu jenjang pendidikan formal baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Bagi mahasiswa yang masih cuti dianggap masih bersekolah.
3. Tidak bersekolah lagi adalah mereka yang pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan suatu jenjang pendidikan formal tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif mengikuti pendidikan.
4. Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan Tanda Tamat Belajar/Ijasah. Seorang yang

belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.

5. Dapat membaca dan menulis artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dengan suatu aksara tertentu.
6. Luas Lantai adalah luas lantai yang ditempatkan dan digunakan untuk keperluan sehari-hari.
7. Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialihkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air, seperti PDAM.
8. Status penguasaan bangunan tempat tinggal milik sendiri adalah jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah seorang anak rumah tangga.

4.1.1.5. Pertanian

1. Pengumpulan data Statistik Pertanian (SP) diselenggarakan oleh BPS bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Di tingkat Kabupaten SP diselenggarakan oleh BPS Kabupaten bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten.
2. Data pokok tanaman pangan yang dikumpulkan adalah luas panen dan produktivitas (produksi per hektar). Produksi tanaman pangan merupakan hasil perkalian antara luas panen dan produktivitas.

Tanaman pangan mencakup padi (padi sawah dan padi ladang) dan palawija (jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jala).
3. Data sawah yang dikumpulkan setiap akhir tahun meliputi :
 1. Sawah berpengairan teknis

Sawah yang saluran pengairan pemberinya terpisah dengan saluarn pembuangan agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Saluran induk, sekunder dan bangunannya dibangun, dikuasai dan dipelihara oleh pemerintah.

2. Sawah berpengairan setengah teknis

Sawah berpengairan setengah teknis tetapi pemerintahannya menguasai bangunan terhadap penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan jaringan selanjutnya tidak diukur dan tidak dikuasai pemerintah.

3. Sawah berpengairan sederhana

Sawah yang cara pembagian dan pembuangan air dalam pengairannya belum teratur walaupun pemerintah sudah ikut membangun sebagian dari jaringan tersebut.

4. Sawah tadah hujan

Sawah yang berpengairannya tergantung pada hujan.

5. Sawah pasang surut

Sawah yang berpengaoirannya tergantung pada air sungai dan dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.

6. Sawah lainnya

Termasuk lahan sawah lebak, polder dan lain-lain.

4. Data produksi padi dan palawija yang dikumpulkan dalam satuan gabah kering giling (padi), pipilan kering (jagung), umbu basah (ubi kayu dan ubi jalar) dan biji kering (kacang tanah dan kedelai).

5. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu berupa hutan yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk mempertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Penunjukkan kawasan hutan mencakup kawasan perairan yang menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan pelestarian Alam (KPA),

6. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi menjadi :

1. Hutan Konservasi

Hutan dengan ciri kas tertentu yang mempunyai fungsi pokok mempertahankan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dan ekosistem.

2. Hutan Lindung

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok melindungi sistem penyangga kehidupan yang mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.

3. Hutan Produksi

Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

7. Hutan konservasi terdiri dari :

1. Kawasan Suaka Alam yang berupa Cagar Alam dan Swaka Mmarga Satwa

2. Kawasan pelestarian alam yang berupa Taman Nasional (TM), Taman Hutan Raya (THR) dan Taman Wisata Alam (TWA)

3. Taman Buruh yang merupakan kawasan hutan yang ditetaapkan sebagai tempat wisata berburuh.

8. Lahan kritis adalah lahan yang sangat rusak karena kehilangan penutupan vegetasinya, sehingga berkurang atau hilang fungsinya sebagai penahan air, pengendali erosi, siklus hara, pengatur iklim mikro dan retensi karbon.

4.1.1.6. Industri dan Energi

1. Pengumpulan data industri besar dan sedang dilakukan melalui Survei industri Besar dan Sedang (IBS) yang dilaksanakan setiap tahun secara lengkap (sensus)

- sejak tahun 1975. Survei IBS mencakup semua perusahaan industri yang mempunyai tenaga kerja 20 orang atau lebih dengan menggunakan kuisioner IIA.
2. Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei ini berdasarkan kepala Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI adalah klasifikasi lapangan usaha yang didasarkan kepada Internasional Standar Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) revisi 3 yang telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia.
 3. Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi dan barang yang lebih tinggi nilai dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir.
 4. Jasa Industri adalah kegiatan industri yang melayani keperluan pihak lain. Pada kegiatan ini bahan baku disediakan oleh pihak lain sedangkan pihak pengolah hanya melakukan pengolahan dengan mendapat imbalan sebagai balas jasa (upah maklon).
 5. Perusahaan atau Usaha Industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.
 6. Industri Pengolahan dikelompokkan dalam 4 golongan berdasarkan banyaknya pekerja yaitu :
 - a. Industri besar (100 orang pekerja atau lebih)
 - b. Industri sedang atau menengah (20 - 99 orang pekerja)
 - c. Industri kecil (5 – 19 orang pekerja)

- d. Industri mikro (1 – 4 orang pekerja)
7. Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah perusahaan umum milik negara yang mempunyai aktivitas kegiatan pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik.
 8. Perusahaan Air Bersih adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas dalam penampungan, penjernihan dan penyaluran air baku atau air bersih dari terminal air melalui saluran air, pipa atau mobil tangki (dalam satu pengelolaan administrasi dalam kegiatan ekonomi) kepada rumah tangga, perusahaan industri atau pengguna komersial lainnya.

4.1.1.7. Perdagangan

1. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah ijin usaha yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota atau wilayah domisili perusahaan. SIUP digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan barang/jasa di Indonesia sesuai Kalsifikasi lapangan Usaha Indonesia (KLUI).
2. Surat Ijin Usaha Perdagangan digolongkan menjadi :
 1. Surat Ijin Usaha Perdagangan Besar
Surat ijin perdagangan untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari 10 milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha)
 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah
Surat ijin perdagangan untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan maksimum 10 milyar rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha)
 3. Surat Ijin Usaha Perdagangan Kecil



Surat ijin perdagangan untuk perusahaan dengan kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan maksimum 500 juta rupiah (tidak termasuk tanah dan bangunan serta tempat usaha)

4.1.1.8. Transportasi, Komunikasi dan Pariwisata

1. Data transportasi dan komunikasi meliputi :
 1. Panjang jalan
 2. Angkutan darat
 3. Angkutan laut
 4. Angkutan udara
 5. Pos dan Telekomunikasi
2. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan tersebut biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang diatas jalan raya selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
3. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan tempat duduk untuk sebanyak-banyaknya delapan orang tidak termasuk tempat duduk untuk pengemudi.
4. Data panjang jalan negara dan jalan propinsi bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum sedangkan jalan kabupaten/kota bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota.
5. Kunjungan kapal adalah kapal yang datang di pelabuhan baik untuk berlabuh di perairan maupun bersandar di dermaga.
6. Sumber data transportasi berasal dari masing-masing instansi terkait, dikumpulkan oleh BPS setiap bulan/tahun
7. Kantor Pos adalah pemberi pelayanan pengiriman barang atau uang dari suatu tempat ke tempat lain.



8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Pelanggan atau pengguna berbayar adalah perseorangan badan hukum perseorangan, badan hukum atau instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi.
10. Akomodasi adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus, dan setiap orang menginap, makan serta memperoleh pelayanan dan fasilitas lainnya dengan pembayaran.
11. Hotel berbintang yaitu hotel yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan seperti persyaratan fisik, bentuk pelayanan yang diberikan, kualifikasi tenaga kerja, jumlah kamar dan lainnya.

4.1.1.9. Keuangan dan Harga

1. Data statistik keuangan Pemerintah Daerah diperoleh dari Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Data statistik Perbankan berupa dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Pembangunan Daerah (Bank NTT) dan Bank Negara Indonesia (BNI)
3. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
4. Data perkoperasian diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang meliputi koperasi dan jenisnya.
5. Data harga yang disajikan meliputi :
 - a. Harga Konsumen (HK)
 - b. Laju Inflasi

- c. Rata-rata harga eceran sembilan bahan pokok dan bahan strategis lainnya
6. Data harga-harga berasal dari survei harga yang dilakukan BPS dengan melakukan wawancara dengan para pedagang/produsen

4.1.1.10. Pengeluaran dan Konsumsi

1. Data pengeluaran dan konsumsi menurut kelompok barang diperoleh dari survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel BPS.
2. Konsumsi dibedakan menjadi dua kelompok :
 - a. Konsumsi makanan, dimana dirinci menjadi lebih dari 200 komoditi dan data yang dikumpulkan mencakup kuantitas dan nilainya.
 - b. Konsumsi bukan makanan dimana pada umumnya hanya mencakup nilai komoditi yang dikonsumsi saja kecuali untuk beberapa jenis pengeluaran seperti penggunaan listrik, gas dan bahan bakar minyak selain nilainya yang dikumpulkan juga data kuantitasnya.

4.1.1.11. Pendapatan Regional

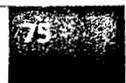
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah (ditingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan) dalam menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu.
2. Secara umum penyusunan PDRB menggunakan dua pendekatan :
 - a. Pendekatan sektoral merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh kegiatan sektor-sektor ekonomi.
 - b. Pendekatan penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. PDRB juga terdiri atas dua versi penilaian yaitu :



- a. Atas dasar harga berlaku, produk-produk yang dihasilkan dari sektor-sektor ekonomi dinilai dengan menggunakan harga yang sedang berlaku pada tahun berjalan
 - b. Atas dasar harga konstan penilaiannya didasarkan pada harga dasar tertentu. Hingga saat ini PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga tahun 2000.
4. Laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari penghitungan PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB tahun ke-n dikurangi dengan nilai tahun ke n -1 (tahun sebelumnya) dibagi dengan nilai pada tahun ke -n-1 kemudian dikalikan dengan 100.
 5. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan nilai tambah dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya (perkembangan berantai)
 6. Produk Domestik Regional Netto (Produk Domestik regional Netto atas dasar harga pasar) adalah PDRB dikurangi penyusutan atas adanya nilai barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi selama satu tahun.
 7. Pendapatan perkapita adalah Produk Domestik Regional Netto atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

4.1.1.12. Kemiskinan

1. Untuk mengukur kemiskinan BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar atas makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluarannya, jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.



2. Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi, umbu, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).
4. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKMN) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
5. Persentase Penduduk Miskin adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK).
6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
7. Indeks Keparahaan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
8. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.
9. Menurut konsep UNDP, pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Terdapat tiga pilihan penting yaitu mencapai umur panjang dan hidup yang sehat, memperoleh pendidikan dan akses terhadap sumber-sumber daya untuk mencapai standar hidup yang layak.

10. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu negara/wilayah menggambarkan tingkat pencapaian dalam beberapa sasaran pembangunan manusia yang telah ditentukan yaitu angka harapan hidup yang tinggi, pendidikan yang memadai dan standar kehidupan yang layak.

4.1.4. Visi dan Misi Kabupaten Sumba Timur

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD 2011-2015 adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada periode 2010-2015 yang telah dirumuskan sebagai berikut : ”

TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA TIMUR YANG SEJAHTERA, MANDIRI, ADIL, RELIGIUS DAN TERDEPAN (SMART)”.

Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Sumba Timur yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Keinginan yang ingin dicapai tidak semata-mata menjadi keinginan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tetapi keinginan tersebut dipandang memiliki kesamaan nilai yang diinginkan dan dicita-citakan masyarakat Sumba Timur (*desirable*) sehingga visi tersebut dapat diyakini sebagai visi bersama (*share vision*). Adapun pokok-pokok pikiran visi yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Sejahtera merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang dan berkeadilan yang ditunjang oleh stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mandiri tidak berarti menutup diri dari bantuan pihak lain akan tetapi dimaksudkan terciptanya kualitas sumber daya manusia Sumba Timur yang mampu melihat, berpikir, bertindak serta memanfaatkan setiap peluang dan tantangan yang ada secara



bertanggungjawab dengan mengedepankan nilai-nilai etika moralitas untuk peningkatan kehidupan sosial ekonominya.

Adil artinya adanya persamaan hak dan kewajiban dari setiap masyarakat Sumba Timur baik didepan hukum maupun dalam memanfaatkan dan menikmati setiap pembangunan daerah secara berimbang, berkeadilan serta bertanggungjawab tanpa perbedaan.

Religius artinya bahwa dalam setiap tindakan pembangunan daerah selalu mengedepankan nilai sosial keagamaan sebagai suatu kekuatan yang perlu dikembangkan, dipertahankan dan ditingkatkan untuk menghadapi pengaruh negatif perubahan global, sehingga kedepan akan melahirkan pembangunan daerah yang seimbang antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan spritual.

Terdepan artinya dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kabupaten Sumba Timur menjadi Kabupaten di Pulau Sumba yang terdepan dalam melakukan inovasi dalam pemerintahan, pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, Hukum dan HAM, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kesetaraan Gender dan Berdaya saing.

Berbagai hal telah dilaksanakan, baik yang telah dicapai maupun yang belum dicapai pada penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada periode tahun 2005 – 2009, tentu akan menjadi dasar pijakan untuk pembangunan selanjutnya, upaya peningkatan terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih baik pada periode tahun 2011 – 2015.

Pemerintah kabupaten Sumba Timur bersama seluruh komponen masyarakat harus memiliki tekad dan semangat juang untuk terus berkarya dalam rangka meningkatkan, serta memperbaiki pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan upaya mengurangi

jumlah rumah tangga sasaran (miskin) melalui program pembangunan yang bersinergi serta lintas sektor, lintas pelaku dan lintas sumber dana.

Dalam menjalankan misinya tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional dan nasional serta pengaruh globalisasi. Perubahan iklim dan ancaman degradasi lingkungan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, peran swasta yang terbatas dalam pembangunan daerah serta rendahnya pemahaman akan hukum dan HAM di samping itu rendahnya ruang fiskal daerah akan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan daerah kedepan. Di samping itu pengaruh perkembangan ekonomi regional dan nasional akan menjadi tantangan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumba Timur tahun 2011 – 2015.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Sumba Timur tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan ekonomi, sosial sudaaya masyarakat Sumba Timur agar lebih sejahtera dengan mengedepankan nilai-nilai sosial keagamaan, penegakan hukum dan HAM, kesetaraan gender, perlindungan anak serta demokratis dalam pembangunan daerah.
2. Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam arti masyarakat telah mampu berpikir dan bertindak untuk memanfaatkan setiap potensi, peluang dan tantangan. Dengan kata lain masyarakat telah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua sumberdaya yang ada secara adil dan bertanggungjawab untuk meningkatkan taraf hidupnya.
3. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kehidupan ekonomi sosial budaya, politik, Hukum dan HAM, Kesetaraan gender, perlindungan anak sehingga

masyarakat merasa terlindungi akan hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan pembangunan secara bertanggungjawab.

4. Mewujudkan dan terpeliharanya nilai-nilai religius dalam pembangunan daerah. Dengan kata lain setiap pelaku pembangunan daerah dalam bertindak, mengedepankan nilai-nilai sosial agama yang ada dan hidup dalam masyarakat Sumba Timur.
5. Mewujudkan Kabupaten Sumba Timur sebagai kabupaten yang terdepan di pulau Sumba dalam melahirkan pemerintahan bersih yang mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak serta berdaya saing.

4.2. Gambaran Umum Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur

Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2008, Struktur Organisasi Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat Badan, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Harga, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, 3 (tiga) Sub Bagian, 6 (enam) Sub Bidang. Sehingga jumlah jabatan struktural 14 jabatan, terdiri dari Eselon II/b 1 jabatan, Eselon III/a 1 jabatan, Eselon III/b 3 jabatan dan Eselon IV/a 9 jabatan.

Tugas pokok Badan Bimas dan Ketahanan Pangan adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan, distribusi dan penganekaragaman konsumsi pangan, dan perumusan kebijakan pengadaan, pengelolaan, distribusi dan konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat.

Visi Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur yaitu **“Terwujudnya Kemandirian Pangan Menuju Masyarakat Sumba Timur yang Sejahtera”**

Untuk mewujudkan tugas pokok dan visi tersebut di atas, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang mencakup Aspek Penataan Administrasi dan Keuangan, Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Aspek Distribusi dan Harga dan Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Upaya peningkatan ketahanan pangan terus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur, seiring dengan pembangunan sektor pertanian. Hal ini mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional.

Untuk mendapatkan gambaran situasi pangan di Kabupaten Sumba Timur, maka Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur, melakukan Analisa Situasi Pangan sebagai bahan masukan kepada Bupati Sumba Timur, dalam rangka pengambilan kebijakan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Sumba Timur

Sesuai amanat UU No. 7/1996 bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau bagi penduduk diseluruh wilayah setiap saat.

Untuk menindaklanjuti Undang–Undang No. 7/1996 dan untuk mengetahui kondisi pangan masyarakat, maka yang menjadi bahan/data analisa, dibuat berdasarkan data

laporan dari kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) dan Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) / Mantri Tani se-Kabupaten Sumba Timur; sedangkan data pendukung lainnya berasal dari Dinas – dinas kemakmuran yang ada kaitannya dengan ketahanan pangan.

4.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumba Timur serta Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 218 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya, maka Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan/Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan Peraturan daerah (PERDA) tersebut di atas adalah:

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik
2. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Struktur Organisasi

Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008, terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretaris membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Evaluasi
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi :
 - a. Sub Bidang Produksi dan Ketersediaan
 - b. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi
4. Bidang Distribusi dan Harga membawahi :
 - a. Sub Bidang Cadangan Pangan
 - b. Sub Bidang Distribusi dan Harga
5. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi :
 - a. Sub Bidang Pola Konsumsi dan Partisipasi Masyarakat
 - b. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan

Tugas dan Fungsi

1. Kepala Badan Bimas dan Ketahanan Pangan

1. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Bimas dan Ketahanan Pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten dan kebijakan kepala daerah serta masukan dari komponen masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan;

2. Menyusun rencana kinerja tahunan Badan Bimas dan Ketahanan Pangan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan masukan komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, standar, norma dan pedoman operasional Bimas dan Ketahanan Pangan dan penyuluhan dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan ketahanan pangan;
4. Merumuskan dan mengendalikan kebijakan bimas dan ketahanan pangan sesuai norma dan kebutuhan untuk mengembangkan ketahanan pangan masyarakat;
5. Mengkoordinasikan identifikasi, pengumpulan data, pengolahan dan pengkajian terhadap ketersediaan pangan, pengadaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan, harga pangan, akses pangan, konsumsi pangan dan gizi, mutu pangan, keamanan pangan, sesuai norma dan standar untuk mendapatkan rumusan model/pola pengembangan bimas dan ketahanan pangan;
6. Mengkoordinasikan pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan karena berbagai sebab, melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi untuk memperoleh masukan demi terwujudnya ketersediaan pangan, pengadaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan, harga pangan, akses pangan, konsumsi pangan dan gizi, mutu pangan, keamanan pangan yang merata, aman dan stabil;

7. Mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar dan pabrikan pangan skala kecil/rumah tangga untuk menjamin mutu dan keamanan pangan;
8. Mengkoordinasikan pengembangan kemampuan instruktur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kabupaten dengan menyelenggarakan pelatihan – pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan;
9. Memantau dan mengawasi penerapan norma, standar dan akreditasi kelembagaan, penetapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional keamanan pangan melalui sosialisasi, rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan dan merumuskan upaya – upaya penanganannya;
10. Memantau pengembangan otoritas kompetensi pangan segar lintas kabupaten, kota melalui laporan secara periodik untuk melakukan pembinaan lebih lanjut;
11. Melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap ketersediaan pangan, pengadaan pangan, cadangan pangan, distribusi pangan, harga pangan, akses pangan, konsumsi pangan dan gizi, mutu pangan, keamanan pangan, sesuai norma dan standar untuk mendapatkan bahan/data/informasi guna pengambilan keputusan selanjutnya;
12. Menetapkan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk urusan wajib secara tepat pada penetapan kinerja (PK) di Kabupaten/Kota agar ditetapkan target kinerja yang akan dicapai secara berkala;

13. Menyelenggarakan rapat staf secara berkala dan rutin dalam rangka penyamaan persepsi pelaksanaan tugas untuk meningkatkan kinerja aparatur;
14. Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan melekat, akuntabilitas kinerja pemerintahan, LKPJ, LPPD, laporan kinerja keuangan dan laporan kinerja badan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja badan;
15. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
16. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan, baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2. Sekretaris Badan Bimas dan Ketahanan Pangan

1. Merencanakan langkah – langkah operasional Sekretariat Badan Bimas dan Ketahanan Pangan berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing – masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk penyempurnaan lebih lanjut;



4. Menyediakan pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
5. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan badan berdasarkan masukan data dari bidang dilingkungan badan agar tersedia program kerja yang partisipatif;
6. Mengkoordinir penyusunan kebutuhan APK dan ATK dilingkungan Badan Bimas dan Ketahanan Pangan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
7. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep data base badan sesuai hasil kajian untuk menjadi dasar penyusunan program kerja selanjutnya dan penyediaan data dan informasi;
8. Melakukan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud aparatur yang handal dan memiliki kompetensi;
9. Mengendalikan pelaksanaan layanan administrasi umum kepada semua unsur yang ada di badan agar tercipta pelayanan administrasi yang cepat, tepat dan lancar;
10. Mengkoordinir penyusunan laporan pengawasan melekat, budaya kerja, LKPI, LPPD, AKIP, kinerja badan, kinerja keuangan dan pelaporan kinerja lainnya untuk bahan pertanggungjawaban;
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi dan sesuai hasil yang telah dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan mencari solusinya;
12. Melakukan koordinasi dengan unit lain/instansi dan pihak terkait agar tercipta kerjasama yang baik;

13. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
14. Melaporkan secara bulanan, semester dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
15. Melaksanakan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Tupoksi : Merencanakan dan melaksanakan kegiatan umum dan kepegawain meliputi penyiapan bahan urusan kepegawaian, pengawasan melekat, budaya kerja ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

2. Sub Bagian Program dan Evaluasi

Tupoksi : Merencanakan dan melaksanakan kegiatan program dan evaluasi meliputi penjabaran berbagai program, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data serta menyusun pelaporan kinerja instansi berdasarkan

ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tersedia program, data, dan hasil evaluasi yang akurat.

3. Sub Bagian Keuangan

Tupoksi : Merencanakan dan melaksanakan kegiatan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akurat.

3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Menyusun langkah-langkah operasional kegiatan bidang konsumsi dan keamanan pangan berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
4. Menyelia pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
5. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep bahan kebijakan dan pedoman operasional sesuai pedoman umum, norma dan standar untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan konsumsi dan keamanan pangan;

6. Melakukan identifikasi, pengumpulan data, pengolahan dan pengkajian terhadap konsumsi pangan dan gizi, mutu pangan dan keamanan pangan serta situasi ketahanan pangan sesuai norma dan standar untuk mendapatkan bahan/data/informasi guna pengambilan keputusan selanjutnya;
7. Melaksanakan pengembangan kelembagaan dan pabrikan pangan skala kecil/rumah tangga melalui identifikasi dan perumusan pola/model pengembangan untuk menjamin keanekaragaman konsumsi pangan;
8. Melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap konsumsi pangan dan gizi, mutu pangan, keamanan pangan sesuai norma dan standar untuk mendapatkan bahan/data/informasi guna pengambilan keputusan selanjutnya;
9. Mengembangkan pangan pokok masyarakat melalui identifikasi, penyusunan pola konsumsi pangan masyarakat dan sosialisasi untuk peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat berbasis bahan baku lokal;
10. Melakukan pengumpulan dan analisis data/informasi ketahanan pangan melalui pengembangan Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKAP) untuk menyiapkan data dan informasi perkembangan ketahanan pangan secara periodik;
11. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak-pihak terkait, agar tercipta kerjasama yang baik;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara bulanan, triwulan dan tahunan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada

berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;

13. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. Sub Bidang Pola Konsumsi dan Partisipasi Masyarakat

Tupoksi : Merencanakan dan melaksanakan identifikasi pangan lokal, sosialisasi penganekaragaman konsumsi, menyusun data base Bimas dan Ketahanan Pangan dalam mengembangkan sistem informasi ketahanan pangan, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan kualitas konsumsi dan aksesibilitas data ketahanan pangan.

2. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan

Tupoksi : Merencanakan dan melaksanakan kegiatan mutu dan keamanan pangan meliputi identifikasi, pengumpulan data, pembinaan dan pengkajian mutu dan keamanan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat

4. Bidang Distribusi dan Harga

1. Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan bidang distribusi berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta

sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;

2. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
4. Menyedia pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
5. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep bahan kebijakan dan pedoman operasional sesuai pedoman umum, norma dan standar untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan konsumsi dan keamanan pangan;
6. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan kelembagaan distribusi, sarana dan prasarana, pola distribusi melalui identifikasi, pengolahan dan analisis data/informasi untuk meningkatkan perimbangan distribusi antar wilayah;
7. Mengatur layanan penyajian dan data informasi harga pangan melalui media cetak dan elektronik agar terinformasinya perkembangan harga pangan secara periodik;
8. Mengkoordinir kegiatan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat melalui pemantauan dan rapat-rapat koordinasi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan masyarakat;

9. Mengkoordinir pengembangan jaringan pasar melalui perumusan dan sosialisasi pola-pola distribusi, kemitraan, kelembagaan dan prasarana distribusi untuk meningkatkan distribusi pangan;
10. Melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap kelembagaan distribusi dan sarana prasarana, harga dan akses pangan sesuai norma dan standar untuk mendapatkan bahan/data/informasi guna pengambilan keputusan selanjutnya;
11. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak-pihak terkait, agar tercipta kerjasama yang baik;
12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara bulanan, triwulan dan tahunan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan;
13. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. Sub Bidang Distribusi dan Harga

Tupoksi : Merencanakan dan melaksanakan kegiatan distribusi harga berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk peningkatan aksesibilitas pangan.

2. Sub Bidang Cadangan Pangan

Tupoksi : Merencanakan dan melaksanakan kegiatan cadangan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk percepatan akses dan informasi harga dan peningkatan aksesibilitas pangan.



5. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

1. Merencanakan langkah-langkah operasional kegiatan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif;
2. Membagi tugas dan member petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas;
3. Mengoreksi hasil kerja bawahan berdasar rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut;
4. Menyedia pelaksanaan tugas berdasarkan rencana kerja agar tercapai hasil yang efektif dan efisien;
5. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep bahan kebijakan dan pedoman operasional sesuai pedoman umum, norma dan standar untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan konsumsi dan keamanan pangan;
6. Mengoreksi dan menyempurnakan konsep kebutuhan produksi pangan melalui pengumpulan, analisa data dan rapat koordinasi untuk proses penanganan secara cepat, tepat dan terpadu;
7. Mengkoordinir pengkajian perkembangan ketersediaan pangan melalui pengumpulan, analisa data dan rapat koordinasi untuk tersedianya data perkembangan pangan secara periodic;
8. Mengkoordinir pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan melalui pemantauan

- dan rapat koordinasi untuk merekomendasikan langkah dan upaya penanganan masalah pangan;
9. Mengkoordinir penanganan kerawanan pangan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisa data, pemantauan dan rapat koordinasi untuk proses secara cepat, tepat dan terpadu;
 10. Mengatur pengendalian kerawanan pangan sebagai isarat dini dan adanya upaya pemberdayaan daerah rawan pangan;
 11. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi dan pihak-pihak terkait, agar tercipta kerjasama yang baik;
 12. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara bulanan, triwulan dan tahunan hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan;
 13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

1. Sub Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Tupoksi : Merencanakan dan melaksanakan kegiatan produksi dan ketersediaan pangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat.

2. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Tupoksi : Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kewaspadaan pangan dan gizi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk

penanganan dan pemberdayaan daerah rawan pangan sedini mungkin.

4.3. Kinerja Pelayanan Badan Bimas dan Ketahanan Pangan

4.3.1. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Bimas dan Ketahanan Pangan, pada bidang konsumsi dan keamanan pangan sejak tahun 2005 hingga saat ini telah melakukan Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, yang diarahkan untuk memotivasi masyarakat dalam melakukan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan seimbang (B2SA). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal serta Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi pangan difokuskan pada sosialisasi dan percontohan pada SD/MI, serta pemberian peralatan kepada kelompok wanita tani dalam rangka pengembangan tepung-tepungan berbahan pangan lokal dalam mewujudkan pangan beragam, bergizi, dan berimbang.

Dari aspek Penganekaragaman Konsumsi Pangan, maka program atau kegiatan aksi yang dilaksanakan adalah pengembangan komoditi tanaman pangan lokal serta dilakukan penyuluhan secara terus menerus agar masyarakat dapat merubah prilaku tentang pola makanan kas daerah yang bebahan pangan lokal dan pemanfaatan pekarangan untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan pekarangan.

Dari aspek Keamanan Pangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penanganan keamanan pangan maka terobosan yang dilakukan difokuskan pada penanganan keamanan pangan segar melalui penguatan kelembagaan dan aparat, peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pelaksana serta pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar untuk petani dan pedagang serta sosialisasi, promosi, dan pelatihan tentang keamanan pangan segar bagi produsen dan konsumen.

Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan; bahwa pemerintah menetapkan persyaratan mutu dan keamanan pangan produk pertanian dalam negeri maupun impor, sehingga dari sisi perencanaan dan pengawasan pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan lebih difokuskan pada penanganan keamanan pangan melalui penyuluhan dan pengawasan bahan pangan segar dengan bekerja sama dengan Instansi yang terkait.

4.3.1.1. Analisis Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2012

Berdasarkan data hasil survey pola konsumsi pangan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, diperoleh gambaran bahwa tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2012 mencapai angka 2.614,5 kkal/kapita/hari atau 130,7 % jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi energi ideal sebesar 2000 kkal/kapita/hari. Dengan ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Sumba Timur untuk tahun 2012 melebihi tingkat konsumsi energi yang ideal. Tingkat konsumsi energi masyarakat Sumba Timur seperti diatas dipengaruhi

oleh kebiasaan pola makan masyarakat dan kondisi pangan pada saat pelaksanaan survey. Untuk jelasnya seperti yang digambarkan dalam tabel berikut ;

**Pola Konsumsi Pangan dan Tingkat Kecukupan
Gizi Penduduk Kabupaten Sumba Timur**

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari)	Kecukupan Energi (Kkal/kapita/Hari)	Tingkat Kecukupan Energi (%)
1	Padi-padian	2.193,7	1.000	219,4
2	Umbi-umbian	26,4	120	303
3	Pangan Hewani	114,8	240	47,9
4	Minyak dan Lemak	22,7	200	11,4
5	Buah/Biji Berminyak	12,9	60	21,5
6	Kacang-kacangan	50,7	100	50,7
7	Gula	25,2	100	25,2
8	Sayur dan Buah	141,0	120	117,2
9	Lain-lain	17,1	60	28,4
	Total	2.614,5	2.000	130,7

Dari tampilan Data Survey yang dilakukan pada musim panen diatas menunjukkan konsumsi energi masyarakat cukup tinggi yaitu 130,7% diatas angka konsumsi energi ideal. Sumbangan sumber energi tertinggi berasal dari padi-padian sebesar 2193,7 kkal/kapita/hari atau 83,90 % dari total Kabupaten dan berturut-turut

oleh sayur dan buah sebesar 141 kkal/kapita/hari atau 5,39%, Pangan Hewani 114,8 kkal/kapita/hari atau 4,39 %, kacang-kacangan 50,7 kkal/kapita/hari atau 1,94%, Umbi-umbian 36,4 kkal/kapita/hari atau 1,39% kemudian disusul oleh kelompok pangan lainnya seperti gula, minyak dan lemak, lain-lain, buah/biji berminyak. Dari tampilan data ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumba Timur lebih cenderung makan beras dan jagung dari pada jenis pangan lainnya seperti umbi-umbian. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya bahwa bila belum makan nasi atau jagung dianggap belum makan. Jenis pangan lainnya diluar beras dan jagung masih dianggap sebagai makanan selingan atau bukan pangan pokok.

Secara keseluruhan bila memperhatikan kontribusi energi dari masing – masing kelompok pangan antar wilayah agroekologi maka wilayah lainnya memberikan sumbangan energi dari padi-padian terbesar yaitu 2.234,7 kkal/kapita/perhari disusul dari wilayah perikanan sebesar 2.199,2 kkal/kapita/hari dan wilayah pertanian sebesar 2.147,3 kkal/kapita/hari. Tingkat konsumsi energi padi-padian pada agroekologi wilayah lain relatif lebih tinggi karena wilayah ini mencakup wilayah perkotaan dan sekitarnya yang sumber pendapatan masyarakatnya berasal dari berbagai jenis usaha dan jasa serta mendapatkan pangan dengan membeli dipasaran. Sedangkan wilayah perikanan sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan hasil laut untuk membeli bahan pangan berupa beras atau jagung.

Kelompok pangan sayur dan buah merupakan kelompok pangan yang memberikan sumbangan energi terbesar kedua setelah padi-padian. Berdasarkan wilayah agroekologi maka wilayah agroekologi lainnya memberikan sumbangan energi terbanyak dari kelompok sayur dan buah bila dibandingkan dengan wilayah agroekologi perikanan dan pertanian yaitu sebesar 173,1 kkal/kapita/hari. Hal ini disebabkan karena pada wilayah agroekologi lainnya yaitu kota dan sekitarnya yang

secara ekonomi memiliki pendapatan sedikit lebih tinggi dari wilayah lainnya, membelanjakan uangnya di pasar dengan pilihan jenis sayur dan buah yang cukup beragam. Wilayah perikanan memberikan sumbangan energi sebesar 115,6 kkal/kapita/hari dan wilayah pertanian 134,3 kkal/kapita/hari. Pada wilayah perikanan utamanya masyarakat membelanjakan uangnya untuk pemenuhan kebutuhan pangan padi-padian dan sedikit sayur dan buah. Sedangkan wilayah pertanian mengkonsumsi sayur dan buah dari usahanya sendiri dengan jumlah dan jenis pilihan yang terbatas sesuai kondisi agroklimat setempat.

Sumbangan energi terbesar ke 3 (tiga) adalah kelompok pangan Hewani dengan sumbangan terbesar dari wilayah perikanan yaitu sebesar 148,70 kkal/kapita/hari disusul oleh wilayah lainnya sebesar 108,40 kkal/kapita/hari dan wilayah pertanian sebesar 87,40 kkal/kapita/hari. Konsumsi energi pangan hewani terutama berasal dari komoditi laut dimana di wilayah perikanan tingkat konsumsi energi dari komoditi perikanan lebih tinggi dari wilayah agroekologi lainnya karena pangan hewani ini mudah didapat dan relatif murah bila dibandingkan dengan wilayah diluar wilayah perikanan.

Bila dilihat dari segi kecukupan energi maka secara keseluruhan Kabupaten Sumba Timur berada diatas kebutuhan energi ideal yaitu sebesar 130,7 % dari kebutuhan energi ideal yaitu 2.000 kkal/kapita/hari. Namun bila dilihat dari tingkat kecukupan energi dari masing-masing kelompok pangan maka kelompok pangan padi-padian merupakan pensuplai energi terbesar yaitu sebesar 83,90 % dari total konsumsi energi masyarakat Sumba Timur. Dengan demikian untuk pemenuhan kecukupan energi masyarakat Sumba Timur belum berimbang. Konsumsi energi padi-padian mencapai 2.193,7 kkal/kapita/hari atau 219,40 % diatas konsumsi ideal padi-padian sebesar 1.000 kkal/kapita/hari. Konsumsi energi dari kelompok sayur dan buah

memberi kontribusi untuk kecukupan energi sebesar 141 kkal/kapita/hari atau mencapai 117,50 % dari kecukupan energi ideal sebesar 120 kkal/kapita/hari. Sedangkan kelompok pangan lainnya berada dibawah standar kecukupan energi yaitu Kacang-kacangan mencapai 50,70 kkal/kapita/hari atau 50,70 % dari standar kecukupan energi ideal 100 kkal/kapita/hari, Pangan Hewani 47,90 % dari standar 240 kkal/kapita/hari, umbi-umbian 30,33 % dari standar 120 kkal/kapita/hari, kelompok pangan lain 28,40 %, Gula 25,20 %, Buah/biji barminyak 21,50 % dan minyak dan lemak 11,4 %. Dengan tampilan data diatas ini dan sesuai potensi wilayah maka pangan umbi-umbian perlu terus disosialisasikan untuk dapat dijadikan sebagai bagian dari pangan pokok dan bukan hanya sebagai pangan selingan. Demikian pula bila dilihat dari pola konsumsi masyarakat, tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat sangat bergantung dari tingkat ketersediaan jenis pangan. Untuk jelasnya pola konsumsi pangan berdasarkan Zona Agroekologi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Pola Konsumsi Pangan Berdasarkan Zona Agroekologi
Per Kelompok Pangan Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2012**

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari)				Kecukupan Energi (Kkal/kapita/Hari)				Tingkat Kecukupan Energi (%)			
		Wilyh Pertanian	Wilyh Perikanan	Wilyh Lainnya	Total	Wilyh Pertanian	Wilyh Perikanan	Wilyh Lainnya	Total	Wilyh Pertanian	Wilyh Perikanan	Wilyh Lainnya	Total
1	Padi-padian	2.147,3	2.199,2	2.234,7	2.193,7	1.000	1.000	1.000	1.000	107,4	110	111,7	219,4
2	Umbi-umbian	92,2	6,8	10,1	36,4	120	120	120	120	4,6	0,3	0,5	303
3	Pangan Hewani	87,4	148,7	108,4	114,8	240	240	240	240	4,4	7,4	5,4	47,9
4	Minyak dan Lemak	15,7	16,3	36,1	22,7	200	200	200	200	0,8	0,8	1,8	11,4
5	Buah/Biji Berminyak	22,2	7,3	9,2	12,9	60	60	60	60	1,1	0,4	0,5	21,5
6	Kacang-kacangan	38,2	52,4	61,6	50,7	100	100	100	100	1,9	2,6	3,1	50,7
7	Gula	28	21,5	26,1	25,2	100	100	100	100	1,4	1,1	1,3	25,2
8	Sayur dan Buah	134,3	115,6	173,1	141,0	120	120	120	120	6,7	5,8	8,7	117,2
9	Lain-lain	22,7	12,5	16,0	17,1	60	60	60	60	1,1	0,6	0,8	28,4
	Total	2588,8	2580,3	2675,3	2.614,5	2.000	2.000	2.000	2.000	129,4	129	133,8	130,7

A. Analisa Pola Pangan Harapan (Aktual)

Dilihat dari komposisi pola konsumsi pangan masyarakat Sumba Timur dalam kaitannya dengan Pola Pangan Harapan (PPH) maka pola konsumsi masyarakat masih jauh dari Pola Pangan Harapan. Dari Skor Pola Pangan Harapan maksimum 100%, Kabupaten Sumba Timur baru mencapai skor **74**. Secara Kabupaten kuantitas konsumsi pangan masyarakat dengan melihat tingkat kecukupan energi maka kelompok pangan padi-padian memberikan kontribusi energi sebesar 109,7%. Dan secara berturut-turut diikuti oleh kelompok pangan Sayur dan buah 7,1%, Pangan Hewani 5,7%, Kacang-kacangan 2,5%, Umbi-umbian 1,8%, gula 1,3%, minyak dan lemak 1,1%, lain-lain 0,9% dan terakhir buah/biji berminyak 0,6%. Namun bila dilihat dari kontribusi energi berdasarkan zona ekologi terdapat perbedaan kontribusi energi antar zona namun kelompok pangan padi-padian tetap merupakan pangan pemberi kontribusi energi yang dominan. Untuk melihat perbandingan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan pada setiap zona dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi energi pada semua wilayah agroekologi masih didominasi dari sumber energi padi-padian dan semuanya berada diatas standar kebutuhan energi 2000 kkal/kap/hari. Tingkat kontribusi energi per kelompok pangan dari masing-masing wilayah agroekosistem, berbeda-beda sesuai potensi wilayah masing-masing. Kelompok pangan umbi-umbian pada wilayah pertanian memberikan kontribusi energi 3,6% dari kebutuhan dan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kontribusi energi umbi-umbian pada wilayah perikanan sebesar 0,3% dan pada wilayah lainnya memberikan sumbangan 0,4% dari kebutuhan konsumsi. Hal ini dapat dipahami

bahwa tingkat keragaman jenis pangan pada wilayah pertanian jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah perikanan dan wilayah lainnya.

Persentase kontribusi energi terbesar dari kelompok pangan hewani adalah 5,7% dari kebutuhan energi pada wilayah perikanan diikuti oleh wilayah lainnya sebesar 4,1% dan wilayah pertanian 3,4%. Sumbangan energi pangan hewani pada wilayah perikanan dominan berasal dari hasil laut, sedangkan wilayah lainnya berasal dari hasil laut dan daging dan diwilayah pertanian berasal dari daging dan telur.

Kontribusi Energi Berdasarkan Zona Agroekologi
Per Kelompok Pangan Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2012

No	Kelompok Pangan	Pertanian			Perikanan			Lainnya		
		Kalori	Kontribusi Energi (%)	AKE (%)	Kalori	Kontribusi Energi (%)	AKE (%)	Kalori	Kontribusi Energi (%)	AKE (%)
1	Padi-padian	2147,3	83	107,4	2199,2	85,3	110	2234,7	83,5	111,7
2	Umbi-umbian	92,2	3,6	4,6	6,8	0,3	0,3	10,1	0,4	0,5
3	Pangan Hewani	87,4	3,4	4,4	148,7	5,7	7,4	108,4	4,1	5,4
4	Minyak dan Lemak	15,7	0,6	0,8	16,3	0,6	0,8	36,1	1,3	1,8
5	Buah/Biji Berminyak	22,2	0,9	1,1	7,3	0,3	0,4	9,2	0,3	0,5
6	Kacang-kacangan	38,2	1,5	1,9	52,4	2,0	2,6	61,6	2,3	3,1
7	Gula	28	1,1	1,4	21,5	0,8	1,1	26,1	1	1,3

8	Sayur dan Buah	134,3	5,2	6,7	115,6	4,5	5,8	173,1	6,5	8,7
9	Lain-lain	22,7	0,9	1,1	12,5	0,5	0,6	16,0	0,6	0,8
	Total	2588,8	100	129,4	2580,3	100	129	2675,3	100	133,8

Dengan demikian kelompok pangan padi-padian memberikan kontribusi energi terbesar dan diatas kebutuhan standar. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat belum menerapkan pola pangan yang berimbang dimana masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian.

Dari sisi kualitas konsumsi masyarakat Sumba Timur masih jauh dari pola pangan yang diharapkan. Secara Kabupaten ada beberapa kelompok pangan yang telah mencapai skor PPH maksimum seperti kelompok padi-padian dengan skor Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 54,8 dari skor PPH maksimum 25 atau 219,20% diatas skor maksimum. Selain itu kelompok pangan Sayur dan buah mencapai skor AKE sebesar 35,30 melampaui skor PPH maksimum yaitu 30 atau 117,66% diatas skor maksimum. Sedangkan kelompok pangan yang lain belum mencapai atau masih jauh dibawah skor maksimum dan tingkat pencapaian skor dari setiap kelompok pangan berturut-turut sebagai berikut: kelompok pangan kacang-kacangan mencapai skor 5,1 atau 51% dari skor maksimum 10, kelompok pangan hewani mencapai skor 11,5 atau 47,91% dari skor maksimum 24, kelompok pangan umbi-umbian mencapai skor 0,9 atau 36% dari skor maksimum 2,5, buah/biji mencapai skor 0,3 atau 30 % dari skor 1, gula mencapai skor 0,6 atau 24% dari skor 2,5, minyak dan lemak mencapai skor 0,6 atau 12% dari skor maksimum 5. Dengan demikian secara keseluruhan skor Angka Kecukupan Energi Kabupaten Sumba Timur mencapai 109,1 atau 109,10% dari skor maksimum 100. Namun bila dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sumba Timur baru mencapai 74 dari skor maksimum 100.

Untuk lebih jelasnya kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Sumba Timur dapat dilihat dari Tingkat Kecukupan Energi per Zona agroekologi seperti pada tabel dibawah :

**Tingkat Kecukupan Energi Dan Skor PPH Berdasarkan
Zona Agroekologi Per Kelompok Pangan
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2012**

No	Kelompok Pangan	Pertanian			Perikanan			Lainnya		
		Skor AKE	Skor Maksimum	Skor PPH	Skor AKE	Skor Maksimum	Skor PPH	Skor AKE	Skor Maksimum	Skor PPH
1	Padi-padian	53,7	25,0	25,0	55,0	25,0	25,0	55,9	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	2,3	2,5	2,3	0,2	2,5	0,2	0,3	2,5	0,3
3	Pangan Hewani	8,7	24,0	8,7	14,9	24,0	14,9	10,8	24,0	10,8
4	Minyak dan Lemak	0,4	5,0	0,4	0,4	5,0	0,4	0,9	5,0	0,9
5	Buah/Biji Berminyak	0,6	1,0	0,6	0,2	1,0	0,2	0,2	1,0	0,2
6	Kacang-kacangan	3,8	10,0	3,8	5,2	10,0	5,2	6,2	10,0	6,2
7	Gula	0,7	2,5	0,7	0,5	2,5	0,5	0,7	2,5	0,7
8	Sayur dan Buah	33,6	30,0	30,0	28,9	30,0	28,9	43,3	30,0	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	103,8	100	71,5	105,3	100	75,3	118,2	100	74,0

Dari tampilan data diatas menunjukkan bahwa jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat didasarkan atas ketersediaan jenis pangan di wilayah yang bersangkutan. Selain padi-padian serta sayur dan buah yang telah mencapai skor PPH maksimum, jenis pangan lainnya, ketersediaan pangan lainnya masih kurang sehingga tingkat konsumsi masyarakat masih rendah dan berbeda antar Zona. Umbi-umbian lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat pada wilayah pertanian dengan Tingkat Kecukupan Energi (TKE) 2,3 dibandingkan dengan wilayah perikanan TKE 0,2 dan wilayah lainnya TKE 0,3. Pangan Hewani pada wilayah perikanan dengan TKE 14,9 lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan TKE 10,8 dan wilayah pertanian 8,7. Pangan hewani pada wilayah perikanan lebih banyak disumbangkan dari hasil laut. Minyak dan lemak pada semua wilayah tidak banyak berbeda dan masih jauh dari skor maksimum. Pada wilayah pertanian minyak dan lemak lebih banyak disumbangkan dari lemak babi dan minyak kelapa, wilayah perikanan dari minyak kelapa dan minyak goreng sedangkan diwilayah lainnya berasal dari minyak goreng. Buah/biji berminyak dengan jenis pangan buah kelapa lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat diwilayah pertanian dibandingkan dengan wilayah lainnya dan wilayah perikanan. Kacang-kacangan lebih banyak dikonsumsi diwilayah lainnya dengan TKE 6,2, sedangkan wilayah perikanan TKE 5,2 dan wilayah pertanian 3,8. Konsumsi kacang-kacangan diwilayah lainnya lebih banyak berasal dari kedelai, wilayah perikanan dari kacang tanah dan kacang hijau sedangkan wilayah pertanian dari kacang tanah. Konsumsi gula pada semua wilayah tidak ada perbedaan yang menyolok atau tingkat konsumsi gula pada semua wilayah masih rendah. Secara keseluruhan Skor PPH atau kualitas konsumsi pangan pada wilayah perikanan dengan PPH 75,3 lebih tinggi dari wilayah lainnya yaitu 74,0 dan wilayah pertanian 71,5. Tingginya skor PPH pada wilayah perikanan

disumbangkan oleh kelompok pangan hawani yang jauh lebih tinggi dari wilayah lainnya dan wilayah pertanian.

Dengan gambaran seperti data diatas ini menunjukkan bahwa tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat Sumba Timur masih rendah karena masih didominasi oleh sumber energi yang berasal dari padi-padian sehingga menyebabkan tingginya skor AKE yaitu 109,1 yang melampaui skor maksimum yaitu 100, sedangkan dilain pihak skor PPH baru mencapai 74 dari skor PPH maksimum yaitu 100.

B. Analisa Pola Konsumsi Berdasarkan Klasifikasi Fungsi Wilayah

Apabila kita melihat tingkat konsumsi energi berdasarkan karakteristik agroekologi, maka tingkat konsumsi energi pada wilayah lainnya 2.675,3 kkal/kap/hari atau 133,8% dari standar kecukupan energi lebih tinggi dari wilayah pertanian 2.588 kkal/kap/hari atau 129,4% dari standar dan wilayah perikanan 2580,3 kkal/kap/hari atau 129% dari standar. Secara keseluruhan, pensuplai sumber energi tertinggi barasal dari padi-padian serta sayur dan buah dan secara wilayah agroekologi ada pada wilayah lainnya yaitu wilayah kota dan sekitarnya. Hal ini dapat dipahami bahwa tingkat ketersediaan dan keragaman pangan pada wilayah ini lebih tinggi dari wilayah pertanian dan perikanan dimana bahan ini didapatkan dengan cara membeli di pasar selain dibudidayakan sendiri.

Sedangkan apabila kita melihat tingkat konsumsi protein berdasarkan karakteristik agroekologi, maka konsumsi Protein pada wilayah perikanan 76,7 gram/kap/hari atau 147,4% dari standar kecukupan protein yaitu 52,0 gram/kap/hari lebih tinggi dari wilayah lainnya 71,6 gram/kap/hari atau 137,7% dari standar dan wilayah pertanian 64,3 gram/kap/hari atau 123,7% dari standar. Secara keseluruhan wilayah agroekologi, tingkat konsumsi protein telah melebihi standar kecukupan protein.

Dilihat dari segi sebaran tingkat konsumsi energi berdasarkan karakteristik agroekologi maka jumlah keluarga yang mengkonsumsi energi diatas 80% AKE mencapai 100 % atau dari jumlah keluarga sample yang disurvei sebanyak 270 KK, semuanya mengkonsumsi energi diatas 80% dari Angka Kecukupan Energi.

Sedangkan bila dilihat dari sebaran tingkat konsumsi Protein maka jumlah keluarga yang mengkonsumsi protein dibawah 70% AKP terdapat 1 (satu) keluarga atau 0,4 % dari total responden sebanyak 270 KK, yang mengkonsumsi antara 70–80% AKP terdapat 2 (dua) keluarga atau 0,7% dari total responden. Sedangkan sisanya yaitu 98,9% atau 267 KK mengkonsumsi protein diatas 80% AKP.

Bila dilihat tingkat konsumsi energi berdasarkan karakteristik ekonomi wilayah, maka tingkat konsumsi energi pada wilayah maju 2.651,2 kkal/kap/hari atau 132,6% dari standar kecukupan energi lebih tinggi dari wilayah sedang 2.622 kkal/kap/hari atau 131,1% dari standar dan wilayah tertinggal 2.557,2 kkal/kap/hari atau 127,9% dari standar.

Sedangkan apabila kita melihat tingkat konsumsi protein berdasarkan karakteristik ekonomi wilayah, maka konsumsi Protein pada wilayah tertinggal mencapai 76,5 gram/kap/hari atau 147,2% dari standar kecukupan protein yaitu 52,0 gram/kap/hari lebih tinggi dari wilayah sedang yang mencapai 69,7 gram/kap/hari atau 134,1% dari standar dan wilayah maju 68,1 gram/kap/hari atau 130,9% dari standar. Dengan persentasi konsumsi protein ini maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat pada wilayah maju lebih tinggi dari wilayah sedang atau wilayah tertinggal walaupun tingkat perbedaannya masih kecil. Hal ini disebabkan oleh karena wilayah maju adalah wilayah yang berada dalam kota dengan tingkat ketersediaan dan keragaman pangan lebih besar.



Dilihat dari segi sebaran tingkat konsumsi energi berdasarkan karakteristik ekonomi wilayah maka jumlah keluarga yang mengkonsumsi energi diatas 80% AKE mencapai 100% atau dari jumlah keluarga sample yang disurvey, semuanya mengkonsumsi energi diatas 80% dari Angka Kecukupan Energi.

Sedangkan bila dilihat dari sebaran tingkat konsumsi Protein maka jumlah keluarga yang mengkonsumsi protein dibawah 70% AKP terdapat 1 (satu) keluarga atau 0,4% dari total responden sebanyak 270 KK yaitu pada wilayah sedang, yang mengkonsumsi antara 70–80% AKP terdapat 2 (dua) keluarga atau 0,7% terdapat pada wilayah maju 1 (satu) KK dan pada wilayah sedang 1 (satu) KK. Sedangkan sisanya yaitu 98,9% atau 267 KK mengkonsumsi protein diatas 80% AKP.

4.3.1.2. Analisis Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2013

Berdasarkan data hasil survey pola konsumsi pangan di wilayah Kabupaten Sumba Timur yang dilakukan berdasarkan karakteristik wilayah agroekologi, diperoleh gambaran bahwa pangan utama sumber karbohidrat pada semua wilayah berasal dari beras dan jagung. Sedangkan sumber protein hewani berbeda-beda antar wilayah dimana pada wilayah pertanian berasal dari ikan, unggas dan telur, wilayah perikanan berasal dari ikan dan telur sedangkan wilayah lainnya berasal dari ikan, daging ruminansia, unggas dan telur. Untuk sumber protein nabati pada wilayah pertanian berasal dari kacang kedelai, wilayah perikanan berasal dari kacang tanah dan kacang kedelai, sedangkan wilayah lainnya berasal dari kacang kedelai dan kacang hijau. Sebagai sumber lemak pada semua wilayah berasal dari minyak sawit dan kelapa, sedangkan sumber vitamin dan mineral yang didominasi sayur dan buah untuk semua wilayah sama. Bila dilihat dari komposisi kontribusi energi sumber pangan karbohidrat maka beras memberi sumbangan tertinggi



sebesar 68,4 % diikuti jagung sebesar 29,8 %. Komposisi kontribusi energi dari sumber Protein Hewani sumbangan terbesar berasal dari ikan sebesar 76,5 % dan diikuti telur 9,7 % dan daging unggas sebesar 8,9 %. Sumber protein nabati berasal dari Kacang kedelai dan kacang hijau, pangan sumber lemak berasal dari minyak sawit dan kelapa, pangan sumber vitamin dan mineral berasal dari sayur dan buah. Kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan berdasarkan sumber Zat Gizi tingkat kabupaten selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No.	Sumber Zat Gizi	Kelompok Pangan	Kontribusi energi (%)
1	Karbohidrat		100,0
		- Beras	68,4
		- Jagung	29,8
		- Terigu	1,0
		- Ubi kayu	0,5
		- Ubi lain	0,2
2	Protein Hewani		100
		- Ikan	76,5
		- Telur	9,7
		- Daging Unggas	8,9
		- Daging Ruminansia	2,9
		- Susu	2,0
3	Protein Nabati		100
		- Kacang kedelai	55,7
		- Kacang Hijau	38,0
		- Kacang Tanah	5,6
		- Kacang Lain	0,7
4	Lemak		100
		- Minyak sawit	72,2
		- Kelapa	24,2
		- Minyak Kelapa	3,6
5	Vitamin dan Mineral		100
		- Sayur	65,4
		- Buah	34,6

Bila dilihat tingkat konsumsi Energi Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2013 mencapai angka 2.622,5 kkal/kapita/hari atau 131,12 % jika dibandingkan dengan tingkat

konsumsi energi ideal sebesar 2000 kkal/kapita/hari. Dengan ini menunjukkan bahwa tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Sumba Timur untuk tahun 2013 melebihi tingkat konsumsi energi yang ideal. Tingkat konsumsi energi masyarakat Sumba Timur seperti diatas dipengaruhi oleh kebiasaan pola makan masyarakat yang disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan pangan pada saat pelaksanaan survey. Untuk jelasnya seperti yang digambarkan dalam tabel ;

**Pola Konsumsi Pangan dan Tingkat Kecukupan
Energi Penduduk Kabupaten Sumba Timur**

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari)	Kecukupan Energi (Kkal/kapita/Hari)	Tingkat Kecukupan Energi (%)
1	Padi-padian	2.194,7	1.000	219,47
2	Umbi-umbian	17	120	14,17
3	Pangan Hewani	140	240	58,33
4	Minyak dan Lemak	48,1	200	24,05
5	Buah/Biji Berminyak	15,4	60	25,67
6	Kacang-kacangan	21	100	21
7	Gula	31,4	100	31,4
8	Sayur dan Buah	140,3	120	116,92
9	Lain-lain	14,6	60	24,33
	Total	2.622,5	2.000	131,12

Dari tampilan Data Survey yang dilakukan pada musim panen diatas menunjukkan konsumsi energi masyarakat cukup tinggi yaitu 31,12% diatas angka konsumsi energi ideal. Sumbangan sumber energi tertinggi berasal dari padi-padian sebesar 2194,7 kkal/kapita/hari atau 83,69 % dari total Kabupaten dan berturut-turut oleh sayur dan buah sebesar 140,3 kkal/kapita/hari atau 5,35%, Pangan Hewani 140 kkal/kapita/hari atau 5,34 %, Minyak dan lemak 48,1 kkal/kapita/hari atau 1,83%, gula 31,4 kkal/kapita/hari atau



1,20% kemudian disusul oleh kelompok pangan lainnya seperti umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, lain-lain. Dari tampilan data ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumba Timur lebih cenderung makan beras dan jagung dari pada jenis pangan lainnya seperti umbi-umbian. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya bahwa bila belum makan nasi atau jagung dianggap belum makan. Jenis pangan lainnya diluar beras dan jagung masih dianggap sebagai makanan selingan atau bukan pangan pokok.

Secara keseluruhan bila memperhatikan kontribusi energi dari masing – masing kelompok pangan antar wilayah agroekologi maka wilayah pertanian memberikan sumbangan energi dari padi-padian terbesar yaitu 2.240 kkal/kapita/perhari disusul dari wilayah perikanan sebesar 2.201,3 kkal/kapita/hari dan wilayah lainnya sebesar 2.142,6 kkal/kapita/hari. Tingkat konsumsi energi padi-padian pada agroekologi wilayah pertanian relatif lebih tinggi karena wilayah ini bertepatan dengan musim panen padi-padian sehingga jenis pangan yang banyak tersedia adalah jenis padi-padian serta didukung dengan kebiasaan dan kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang ada tanpa memperhatikan keragaman pangan. Sedangkan wilayah perikanan sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan hasil laut untuk membeli bahan pangan berupa beras atau jagung.

Kelompok pangan sayur dan buah merupakan kelompok pangan yang memberikan sumbangan energi terbesar kedua setelah padi-padian. Berdasarkan wilayah agroekologi maka wilayah agroekologi lainnya memberikan sumbangan energi terbanyak dari kelompok sayur dan buah bila dibandingkan dengan wilayah agroekologi perikanan dan pertanian yaitu sebesar 151 kkal/kapita/hari. Hal ini disebabkan karena pada wilayah



agroekologi lainnya yaitu kota dan sekitarnya yang secara ekonomi memiliki pendapatan sedikit lebih tinggi dari wilayah lainnya, membelanjakan uangnya di pasar dengan pilihan jenis sayur dan buah yang cukup beragam. Wilayah perikanan memberikan sumbangan energi sebesar 140,1 kkal/kapita/hari dan wilayah pertanian 129,9 kkal/kapita/hari. Pada wilayah perikanan utamanya masyarakat membelanjakan uangnya untuk pemenuhan kebutuhan pangan padi-padian serta sayur dan buah. Sedangkan wilayah pertanian mengkonsumsi sayur dan buah dari usahanya sendiri dengan jumlah dan jenis pilihan yang terbatas sesuai kondisi agroklimat setempat.

Sumbangan energi terbesar ke 3 (tiga) adalah kelompok pangan Hewani dengan sumbangan terbesar dari wilayah perikanan yaitu sebesar 154,10 kkal/kapita/hari disusul oleh wilayah lainnya sebesar 152,10 kkal/kapita/hari dan wilayah pertanian sebesar 113,80 kkal/kapita/hari. Konsumsi energi pangan hewani terutama berasal dari komoditi laut dimana di wilayah perikanan tingkat konsumsi energi dari komoditi perikanan lebih tinggi dari wilayah agroekologi lainnya karena pangan hewani ini mudah didapat dan relatif murah bila dibandingkan dengan wilayah diluar wilayah perikanan. Untuk melihat secara rinci Pola Konsumsi tingkat kecukupan

Bila dilihat dari segi kecukupan energi maka secara keseluruhan Kabupaten Sumba Timur berada diatas kebutuhan energi ideal yaitu sebesar 131,2 % dari kebutuhan energi ideal yaitu 2.000 kkal/kapita/hari. Namun bila dilihat dari tingkat kecukupan energi dari masing-masing kelompok pangan maka kelompok pangan padi-padian merupakan pensuplai energi terbesar yaitu sebesar 83,69 % dari total konsumsi energi masyarakat Sumba Timur. Dengan demikian untuk pemenuhan kecukupan energi masyarakat Sumba Timur belum berimbang. Konsumsi energi padi-padian mencapai 2.194,7 kkal/kapita/hari

atau 219,47 % diatas konsumsi ideal padi-padian sebesar 1.000 kkal/kapita/hari. Konsumsi energi dari kelompok sayur dan buah memberi kontribusi untuk kecukupan energi sebesar 140,3 kkal/kapita/hari atau mencapai 116,92 % dari kecukupan energi ideal sebesar 120 kkal/kapita/hari. Sedangkan kelompok pangan lainnya berada dibawah standar kecukupan energi yaitu Kacang-kacangan mencapai 21 kkal/kapita/hari atau 21 % dari standar kecukupan energi ideal 100 kkal/kapita/hari, Pangan Hewani 58,33 % dari standar 240 kkal/kapita/hari, umbi-umbian 14,17 % dari standar 120 kkal/kapita/hari, kelompok pangan lain 24,33 %, Gula 31,40 %, Buah/biji barminyak 25,67 % dan minyak dan lemak 24,05 %. Dengan tampilan data diatas ini dan sesuai potensi wilayah maka pangan umbi-umbian sebagai jenis pangan yang dapat dikembangkan pada semua wilayah perlu terus disosialisasikan untuk dapat dijadikan sebagai bagian dari pangan pokok dan bukan hanya sebagai pangan selingan. Demikian pula bila dilihat dari pola konsumsi masyarakat, tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat sangat bergantung dari tingkat ketersediaan jenis pangan. Untuk jelasnya pola konsumsi pangan berdasarkan Zona Agroekologi dapat dilihat pada tabel berikut :

Sedangkan untuk melihat secara rinci pola konsumsi pangan dan tingkat Kecukupan Gizi masyarakat Sumba Timur dapat dilihat pada lampiran.



**Pola Konsumsi Pangan Berdasarkan Zona Agroekologi
Per Kelompok Pangan Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2013**

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari)				Kecukupan Energi (Kkal/kapita/Hari)				Tingkat Kecukupan Energi (%)			
		Wilyh Pertanian	Wilyh Perikanan	Wilyh Lainnya	Total	Wilyh Pertanian	Wilyh Perikanan	Wilyh Lainnya	Total	Wilyh Pertanian	Wilyh Perikanan	Wilyh Lainnya	Total
1	Padi-padian	2.240,0	2.201,3	2.142,6	2.194,7	1.000	1.000	1.000	1.000	112,0	110,1	107,1	109,7
2	Umbi-umbian	13,6	9,5	27,9	17,0	120	120	120	120	0,7	0,5	1,4	0,8
3	Pangan Hewani	113,8	154,1	152,1	140,0	240	240	240	240	5,7	7,7	7,6	7,0
4	Minyak dan Lemak	34,7	42,1	67,4	48,1	200	200	200	200	1,7	2,1	3,4	2,4
5	Buah/Biji Berminyak	14,5	14,4	17,2	15,4	60	60	60	60	0,7	0,7	0,9	0,8
6	Kacang-kacangan	12,2	9,9	40,9	21,0	100	100	100	100	0,6	0,5	2,0	1,0
7	Gula	35,3	23,7	35,1	31,4	100	100	100	100	1,8	1,2	1,8	1,6
8	Sayur dan Buah	129,9	140,1	151,0	140,3	120	120	120	120	6,5	7,0	7,6	7,0
9	Lain-lain	15,0	11,7	17,1	14,6	60	60	60	60	0,6	0,6	0,9	0,7
	Total	2609,1	2580,3	2651,3	2.622,5	2.000	2.000	2.000	2.000	130,5	130,3	132,6	131,1

A. Analisa Pola Pangan Harapan (Aktual)

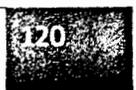
Dilihat dari komposisi pola konsumsi pangan masyarakat Sumba Timur dalam kaitannya dengan Pola Pangan Harapan (PPH) maka pola konsumsi masyarakat masih jauh dari Pola Pangan Harapan. Dari Skor Pola Pangan Harapan maksimum 100%, Kabupaten Sumba Timur baru mencapai skor 73,9 %. Secara Kabupaten kuantitas konsumsi pangan masyarakat dengan melihat tingkat kecukupan energi maka kelompok pangan padi-padian memberikan kontribusi energi sebesar 109,7%. Dan secara berturut-turut diikuti oleh kelompok pangan Sayur dan buah 7,0%, Pangan Hewani 7,0%, minyak dan lemak 2,4%, gula 1,6%, Kacang-kacangan 1,0%, Umbi-umbian 0,8%, buah/biji berminyak 0,8% dan terakhir lain-lain 0,79%. Namun bila dilihat dari kontribusi energi berdasarkan zona ekologi terdapat perbedaan kontribusi energi antar zona namun kelompok pangan padi-padian tetap merupakan pangan pemberi kontribusi energi yang dominan. Untuk melihat perbandingan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan pada setiap zona dapat dilihat pada tabel dibawah. Sedangkan untuk melihat PolaPangan Harapan Aktual masyarakat per Zona agroekologi dapat dilihat pada tabel Skor Pola Pangan Harapan Aktual yang terlampir

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi energi pada semua wilayah agroekologi masih didominasi dari sumber energi padi-padian serta sayur dan buah dan semuanya berada diatas standar kebutuhan dimana standar kebutuhan energi padi-padian 1000 kkal/kap/hari serta sayur dan buah dengan standar 120 kkal/kap/hari. Tingkat kontribusi energi per kelompok pangan dari masing-masing wilayah agroekosistem, berbeda-beda sesuai potensi wilayah masing-masing. Kelompok pangan padi-padian pada wilayah pertanian memberikan kontribusi energi 85,9% dari kebutuhan dan lebih besar

bila dibandingkan dengan kontribusi energi padi-padian pada wilayah perikanan sebesar 84,4% dan pada wilayah lainnya memberikan sumbangan 80,8% dari kebutuhan konsumsi. Kelompok pangan Hewani pada wilayah perikanan memberikan kontribusi energi 5,9% dari kebutuhan dan lebih besar bila dibandingkan dengan kontribusi energi pangan hewani pada wilayah lainnya sebesar 5,7% dan pada wilayah pertanian memberikan sumbangan 4,4% dari kebutuhan konsumsi. Kelompok pangan sayur dan buah pada wilayah lainnya memberikan kontribusi energi 5,7% dari kebutuhan dan lebih besar bila dibandingkan dengan kontribusi energi sayur dan buah pada wilayah perikanan sebesar 5,4% dan pada wilayah pertanian memberikan sumbangan 5,0% dari kebutuhan konsumsi. Hal ini dapat dipahami bahwa ketersediaan dan tingkat keragaman jenis pangan pada wilayah lainnya jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah perikanan dan wilayah pertanian. Wilayah lainnya mencakup wilayah kota dan sekitarnya dimana tingkat ketersediaan sayur dan buah jauh lebih banyak baik karena dibudidayakan sendiri maupun karena tersedia cukup di pasar.

Persentase kontribusi energi terbesar dari kelompok pangan hewani adalah 5,9% dari kebutuhan energi pada wilayah perikanan diikuti oleh wilayah lainnya sebesar 5,7% dan wilayah pertanian 4,4%. Sumbangan energi pangan hewani pada wilayah perikanan dominan berasal dari hasil laut dan telur, sedangkan wilayah lainnya berasal dari hasil laut, daging dan telur serta di wilayah pertanian berasal dari ikan, daging dan telur.

Dengan demikian kelompok pangan padi-padian memberikan kontribusi energi terbesar dan di atas kebutuhan standar. Demikian juga kelompok sayur dan buah memberikan kontribusi yang cukup dan berada di atas kebutuhan standar. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat belum menerapkan pola pangan yang



berimbang dimana masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian serta kelompok pangan sayur dan buah.

Dari sisi kualitas, konsumsi masyarakat Sumba Timur masih jauh dari pola pangan yang diharapkan. Secara Kabupaten ada beberapa kelompok pangan yang telah mencapai skor PPH maksimum seperti kelompok padi-padian dengan skor Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 54,9 dari skor PPH maksimum 25 atau 219,60% diatas skor maksimum. Selain itu kelompok pangan Sayur dan buah mencapai skor AKE sebesar 35,10 melampaui skor PPH maksimum yaitu 30 atau 117,0% diatas skor maksimum. Selain itu kelompok pangan Sayur dan buah mencapai skor AKE sebesar 35,10 melampaui skor PPH maksimum yaitu 30 atau 117,0% diatas skor maksimum. Sedangkan kelompok pangan yang lain belum mencapai atau masih jauh dibawah skor maksimum dan tingkat pencapaian skor dari setiap kelompok pangan berturut-turut sebagai berikut: kelompok pangan hewani mencapai skor 10,7 atau 44,58% dari skor maksimum 24, buah/biji mencapai skor 0,3 atau 30 % dari skor 1, gula mencapai skor 0,6 atau 24% dari skor 2,5, minyak dan lemak mencapai skor 0,9 atau 18% dari skor maksimum 5, kelompok pangan kacang-kacangan mencapai skor 1,6 atau 16% dari skor maksimum 10, kelompok pangan umbi-umbian mencapai skor 0,3 atau 12% dari skor maksimum 2,5. Secara terinci sumbangan energi dari masing-masing kelompok pangan berdasarkan wilayah agroekologi dapat dilihat pada tabel Skor Pola Pangan Harapan Aktual yang terlampir.



**Kontribusi Energi Berdasarkan Zona Agroekologi
Per Kelompok Pangan Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2013**

No	Kelompok Pangan	Pertanian			Perikanan			Lainnya		
		Kalori	Kontribusi Energi (%)	AKE (%)	Kalori	Kontribusi Energi (%)	AKE (%)	Kalori	Kontribusi Energi (%)	AKE (%)
1	Padi-padian	2240,0	85,9	112,0	2201,3	84,4	110,1	2142,6	80,8	107,1
2	Umbi-umbian	13,6	0,5	0,7	9,5	0,4	0,5	27,9	1,1	1,4
3	Pangan Hewani	113,8	4,4	5,7	154,1	5,9	7,7	152,1	5,7	7,6
4	Minyak dan Lemak	34,7	1,3	1,7	42,1	1,6	2,1	67,4	2,5	3,4
5	Buah/Biji Berminyak	14,5	0,6	0,7	14,4	0,6	0,7	17,2	0,6	0,9
6	Kacang-kacangan	12,2	0,5	0,6	9,9	0,4	0,5	40,9	1,5	2,0
7	Gula	35,3	1,4	1,8	23,7	0,9	1,2	35,1	1,3	1,8
8	Sayur dan Buah	129,9	5,0	6,5	140,1	5,4	7,0	151,0	5,7	7,6
9	Lain-lain	15,0	0,6	0,8	11,7	0,4	0,6	17,1	0,6	0,9
	Total	2609,1	100	130,5	2606,9	100	130,3	2651,3	100	132,6

Dengan demikian secara keseluruhan skor Angka Kecukupan Energi Kabupaten Sumba Timur mencapai 108,8 atau 108,80% dari skor maksimum 100. Namun bila dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sumba Timur baru mencapai 73,9 dari skor maksimum 100.

Untuk lebih jelasnya kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Sumba Timur dapat dilihat dari Tingkat Kecukupan Energi per Zona agroekologi seperti pada tabel dibawah.

Dari tampilan data tersebut menunjukkan bahwa jenis dan kuantitas pangan yang dikonsumsi masyarakat didasarkan atas kondisi dan ketersediaan jenis pangan di wilayah yang bersangkutan. Selain padi-padian serta sayur dan buah yang telah mencapai skor PPH maksimum, jenis dan ketersediaan pangan lainnya masih kurang sehingga tingkat konsumsi masyarakat masih rendah dan berbeda antar Zona. Umbi-umbian lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat pada wilayah lainnya dengan Tingkat Kecukupan Energi (TKE) 0,7 dibandingkan dengan wilayah perikanan TKE 0,2 dan wilayah pertanian TKE 0,3. Pangan Hewani pada wilayah perikanan dengan TKE 15,4 lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan TKE 15,2 dan wilayah pertanian 11,4. Pangan hewani pada wilayah perikanan lebih banyak disumbangkan dari hasil laut. Minyak dan lemak pada semua wilayah tidak banyak berbeda dan masih jauh dari skor maksimum. Sumber minyak dan lemak pada semua wilayah hampir sama dimana lebih banyak disumbangkan dari minyak goreng dan minyak kelapa.



**Tingkat Kecukupan Energi Dan Skor PPH Berdasarkan
Zona Agroekologi Per Kelompok Pangan
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2013**

No	Kelompok Pangan	Pertanian			Perikanan			Lainnya		
		Skor AKE	Skor Maksimum	Skor PPH	Skor AKE	Skor Maksimum	Skor PPH	Skor AKE	Skor Maksimum	Skor PPH
1	Padi-padian	56,0	25,0	25,0	55,0	25,0	25,0	53,6	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	0,3	2,5	0,3	0,2	2,5	0,2	0,7	2,5	0,7
3	Pangan Hewani	11,4	24,0	11,4	15,4	24,0	15,4	15,2	24,0	15,2
4	Minyak dan Lemak	0,9	5,0	0,9	1,1	5,0	1,1	1,7	5,0	1,7
5	Buah/Biji Berminyak	0,4	1,0	0,4	0,4	1,0	0,4	0,4	1,0	0,4
6	Kacang-kacangan	1,2	10,0	1,2	1,0	10,0	1,0	4,1	10,0	4,1
7	Gula	0,9	2,5	0,9	0,6	2,5	0,6	0,9	2,5	0,9
8	Sayur dan Buah	32,5	30,0	30,0	35,0	30,0	30,0	37,8	30,0	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	103,8	100	70,1	108,7	100	73,6	114,3	100	78,0

Kacang-kacangan lebih banyak dikonsumsi di wilayah lainnya dengan TKE 4,1, sedangkan wilayah pertanian TKE 1,2 dan wilayah perikanan 1,0. Konsumsi kacang-kacangan di wilayah lainnya lebih banyak berasal dari kedelai, wilayah perikanan dari kacang tanah dan kacang hijau sedangkan wilayah pertanian dari kacang tanah. Konsumsi gula pada semua wilayah tidak ada perbedaan yang menyolok atau tingkat konsumsi gula pada semua wilayah masih rendah. Secara keseluruhan Skor PPH atau kualitas konsumsi pangan pada wilayah lainnya dengan PPH 78,0 lebih tinggi dari wilayah perikanan yaitu 73,6 dan wilayah pertanian 70,1. Untuk jelasnya tampilan pencapaian skor PPH Rumah Tangga responden berdasarkan karakteristik agroekologi seperti pada data dibawah ini.

No	Karakteristik Wilayah	Skor PPH	Tingkat Pencapaian SPM/RT		
			Belum Memenuhi SPM (<90)	Memenuhi SPM (>90)	Total
1	Wil. Pertanian	70,1	88	2	90
2	Wil. Perikanan	73,6	90	0	90
3	Wil. Lainnya	78,0	85	5	90
	Jumlah	73,9	263	7	270

Tingginya skor PPH pada wilayah lainnya disebabkan oleh tingkat keragaman pangan jauh lebih tinggi dari wilayah perikanan dan wilayah pertanian terutama sumbangan pangan dari minyak dan lemak serta kacang-kacangan.

Dengan gambaran seperti data diatas ini menunjukkan bahwa tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat Sumba Timur masih rendah karena masih didominasi oleh sumber energi yang berasal dari padi-padian serta sayur dan buah sehingga

menyebabkan tingginya skor AKE yaitu 108,8 yang melampaui skor maksimum yaitu 100, dan pada akhirnya mempengaruhi skor PPH Kabupaten yang baru mencapai 73,9 dari skor PPH maksimum yaitu 100.

B. Analisa Pola Konsumsi Berdasarkan Klasifikasi Fungsi Wilayah

Apabila kita melihat tingkat konsumsi energi berdasarkan karakteristik agroekologi, maka tingkat konsumsi energi pada wilayah lainnya 2.651,3 kkal/kap/hari atau 132,6% dari standar kecukupan energi lebih tinggi dari wilayah pertanian 2.609,1 kkal/kap/hari atau 130,5% dari standar dan wilayah perikanan 2606,9 kkal/kap/hari atau 130,3% dari standar. Secara keseluruhan, pemasok sumber energi tertinggi berasal dari padi-padian serta sayur dan buah dan secara wilayah agroekologi ada pada wilayah lainnya yaitu wilayah kota dan sekitarnya. Hal ini dapat dipahami bahwa tingkat ketersediaan dan keragaman pangan pada wilayah ini lebih tinggi dari wilayah pertanian dan perikanan dimana bahan ini didapatkan dengan cara membeli di pasar selain yang dibudidayakan sendiri.

Apabila kita melihat tingkat konsumsi berdasarkan kandungan pangan serta berdasarkan karakteristik agroekologi maka pangan sumber karbohidrat pada wilayah pertanian mensuplai kalori sebesar 2.254 kkal/kap/hari, wilayah perikanan sebesar 2.211 kkal/kap/hari dan wilayah lainnya sebesar 2.170 kkal/kap/hari. Dengan demikian suplai kalori dari sumber pangan karbohidrat tingkat kabupaten mencapai 2.212 kkal/kap/hari

Bila kita melihat sumbangan kalori dari pangan sumber protein hewani berdasarkan karakteristik agroekologi, maka kalori pada wilayah perikanan mencapai 154 kkal/kap/hari lebih tinggi dari wilayah lainnya 152 kkal/kap/hari atau dan wilayah pertanian 114 kkal/kap/hari dan secara kabupaten pangan sumber protein hewani memberikan sumbangan kalori sebesar 140 kkal/kap/hari. Sedangkan sumbangan kalori

dari pangan sumber protein nabati pada wilayah lainnya sebesar 41 kkal/kap/hari, wilayah pertanian sebesar 12 kkal/kap/hari dan wilayah perikanan sebesar 10 kkal/kap/hari dan secara kabupaten pangan sumber protein nabati memberikan sumbangan kalori sebesar 21 kkal/kap/hari.

Sumbangan kalori dari pangan sumber lemak pada wilayah lainnya sebesar 85 kkal/kap/hari, wilayah perikanan sebesar 57 kkal/kap/hari dan wilayah pertanian sebesar 49 kkal/kap/hari. Dengan demikian sumbangan kalori dari pangan sumber lemak secara kabupaten mencapai 63 kkal/kap/hari. Sedangkan sumbangan kalori dari pangan sumber Vitamin dan mineral sebesar 140 kkal/kap/hari dan jika dilihat dari karakteristik agroekologi maka pada wilayah lainnya memberikan sumbangan terbesar bila dibandingkan dengan wilayah yang lain. Pada wilayah lainnya mencapai 151 kkal/kap/hari, memberikan sumbangan tersebar bila dibandingkan dengan wilayah yang lain. Pada wilayah lainnya mencapai 151 kkal/kap/hari, wilayah perikanan sebesar 140 kkal/kap/hari dan wilayah pertanian sebesar 130 kkal/kap/hari.

4.3.1.3. Analisis Tingkat Konsumsi Pangan Tahun 2014

Berdasarkan data hasil survey pola konsumsi pangan di wilayah Kabupaten Sumba Timur, diperoleh gambaran bahwa tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2014 mencapai angka 2.713,8 kkal/kapita/hari atau 135,7 % jika dibandingkan dengan tingkat konsumsi energi ideal sebesar 2000 kkal/kapita/hari. Data konsumsi energi menunjukkan bahwa tingkat konsumsi energi masyarakat Kabupaten Sumba Timur untuk tahun 2014 melebihi tingkat konsumsi energi yang ideal. Tingkat konsumsi energi masyarakat Sumba Timur seperti diatas dipengaruhi oleh kebiasaan pola makan masyarakat dan kondisi pangan pada saat pelaksanaan survey. Untuk jelasnya seperti yang digambarkan dalam tabel berikut ;

**Pola Konsumsi Pangan dan Tingkat Kecukupan
Gizi Penduduk Kabupaten Sumba Timur**

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari)	Kecukupan Energi (Kkal/kapita/Hari)	Tingkat Kecukupan Energi (%)
1	Padi-padian	2.209,7	1.000	110,5
2	Umbi-umbian	20,5	120	1,0
3	Pangan Hewani	144,1	240	7,2
4	Minyak dan Lemak	53,9	200	2,7
5	Buah/Biji Berminyak	16,4	60	0,8
6	Kacang-kacangan	47,8	100	2,4
7	Gula	39,5	100	2,0
8	Sayur dan Buah	163,9	120	8,2
9	Lain-lain	17,9	60	0,9
	Total	2.713,8	2.000	135,7

Dari tampilan Data Survey yang dilakukan pada musim panen diatas menunjukkan konsumsi energi masyarakat cukup tinggi yaitu 135,7% diatas angka konsumsi energi ideal. Sumbangan sumber energi tertinggi berasal dari padi-padian sebesar 2209,7 kkal/kapita/hari atau 110,5 % dari total Kabupaten dan berturut-turut

oleh sayur dan buah sebesar 163,9 kkal/kapita/hari atau 8,2%, Pangan Hewani 144,1 kkal/kapita/hari atau 7,2 %, kacang-kacangan 47,8 kkal/kapita/hari atau 2,4%, Umbi-umbian 20,5 kkal/kapita/hari atau 1,0% kemudian disusul oleh kelompok pangan lainnya seperti gula, minyak dan lemak, lain-lain, buah/biji berminyak. Dari tampilan data ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumba Timur lebih cenderung makan beras dan jagung dari pada jenis pangan lainnya seperti umbi-umbian. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang sudah membudaya bahwa bila belum makan nasi atau jagung dianggap belum makan. Jenis pangan lainnya diluar beras dan jagung masih dianggap sebagai makanan selingan atau bukan pangan pokok.

Secara keseluruhan bila memperhatikan kontribusi energi dari masing – masing kelompok pangan antar wilayah agroekologi maka wilayah pertanian memberikan sumbangan energi dari padi-padian terbesar yaitu 2.350,3 kkal/kapita/perhari disusul dari wilayah lainnya sebesar 2.163,5 kkal/kapita/hari dan wilayah perikanan sebesar 2.115,3 kkal/kapita/hari. Tingkat konsumsi energi padi-padian pada agroekologi wilayah pertanian relatif lebih tinggi karena wilayah ini bertepatan dengan musim panen padi-padian sehingga jenis pangan yang banyak tersedia adalah jenis padi-padian serta didukung dengan kebiasaan dan kecenderungan masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang ada tanpa memperhatikan keragaman pangan. Sedangkan wilayah perikanan sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan hasil laut untuk membeli bahan pangan berupa beras atau jagung.

Kelompok pangan sayur dan buah merupakan kelompok pangan yang memberikan sumbangan energi terbesar kedua setelah padi-padian. Berdasarkan wilayah agroekologi maka wilayah agroekologi pertanian memberikan sumbangan energi terbanyak dari kelompok sayur dan buah bila dibandingkan dengan wilayah agroekologi lainnya dan perikanan yaitu sebesar 180,3 kkal/kapita/hari. Wilayah

lainnya memberikan sumbangan energi sebesar 166,0 kkal/kapita/hari dan wilayah perikanan 145,5 kkal/kapita/hari.

Sumbangan energi terbesar ke 3 (tiga) adalah kelompok pangan Hewani dengan sumbangan terbesar dari wilayah lainnya yaitu sebesar 177,9 kkal/kapita/hari disusul oleh wilayah perikanan sebesar 135,2 kkal/kapita/hari dan wilayah pertanian sebesar 119,1 kkal/kapita/hari. Hal ini disebabkan karena pada wilayah agroekologi lainnya yaitu kota dan sekitarnya yang secara ekonomi memiliki pendapatan sedikit lebih tinggi dari wilayah perikanan, membelanjakan uangnya di pasar dengan pilihan jenis daging yang cukup beragam sedangkan pada wilayah perikanan Konsumsi energi pangan hewani terutama berasal dari komoditi laut dimana di wilayah perikanan tingkat konsumsi energi dari komoditi perikanan lebih tinggi dari wilayah agroekologi lainnya karena pangan hewani ini mudah didapat dan relatif murah bila dibandingkan dengan wilayah pertanian.

Bila dilihat dari segi kecukupan energi maka secara keseluruhan Kabupaten Sumba Timur berada diatas kebutuhan energi ideal yaitu sebesar 135,7 % dari kebutuhan energi ideal yaitu 2.000 kkal/kapita/hari. Namun bila dilihat dari tingkat kecukupan energi dari masing-masing kelompok pangan maka kelompok pangan padi-padian merupakan pensuplai energi terbesar yaitu sebesar 110,5 % dari total konsumsi energi masyarakat Sumba Timur. Dengan demikian untuk pemenuhan kecukupan energi masyarakat Sumba Timur belum berimbang. Konsumsi energi padi-padian mencapai 2.209,7 kkal/kapita/hari atau 110,5 % diatas konsumsi ideal padi-padian sebesar 1.000 kkal/kapita/hari. Konsumsi energi dari kelompok sayur dan buah memberi kontribusi untuk kecukupan energi sebesar 163,9 kkal/kapita/hari atau mencapai 8,2 % dari kecukupan energi ideal sebesar 120 kkal/kapita/hari. Sedangkan kelompok pangan lainnya berada dibawah standar kecukupan energi yaitu Kacang-

kacangan mencapai 47,8 kkal/kapita/hari atau 2,4 % dari standar kecukupan energi ideal 100 kkal/kapita/hari, Pangan Hewani 144,1 kkal/kapita/hari atau 7,2 % dari standar 240 kkal/kapita/hari, umbi-umbian 20,5 kkal/kapita/hari atau 1,0 % dari standar 120 kkal/kapita/hari, kelompok pangan lain 0,9 %, Gula 2,0 %, Buah/biji barminyak 0,8 % dan minyak dan lemak 2,7 %. Dengan tampilan data diatas ini dan sesuai potensi wilayah maka pangan umbi-umbian perlu terus disosialisasikan untuk dapat dijadikan sebagai bagian dari pangan pokok dan bukan hanya sebagai pangan selingan. Demikian pula bila dilihat dari pola konsumsi masyarakat, tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat sangat bergantung dari tingkat ketersediaan jenis pangan. Untuk jelasnya pola konsumsi pangan berdasarkan Zona Agroekologi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Pola Konsumsi Pangan Berdasarkan Zona Agroekologi
Per Kelompok Pangan Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2014**

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi (Kkal/kapita/hari)				Kecukupan Energi (Kkal/kapita/Hari)				Tingkat Kecukupan Energi (%)			
		Wilyh Pertanian	Wilyh Perikanan	Wilyh Lainnya	Total	Wilyh Pertanian	Wilyh Perikanan	Wilyh Lainnya	Total	Wilyh Pertanian	Wilyh Perikanan	Wilyh Lainnya	Total
1	Padi-padian	2.350,3	2.115,3	2.163,5	2.209,7	1.000	1.000	1.000	1.000	117,5	105,8	108,2	110,5
2	Umbi-umbian	22,0	11,1	28,4	20,5	120	120	120	120	1,1	0,6	1,4	1,0
3	Pangan Hewani	119,1	135,2	177,9	144,1	240	240	240	240	6,0	6,8	8,9	7,2
4	Minyak dan Lemak	39,2	47,7	74,6	53,9	200	200	200	200	2,0	2,4	3,7	2,7
5	Buah/Biji Berminyak	17,9	14,2	17,2	16,4	60	60	60	60	0,9	0,7	0,9	0,8
6	Kacang-kacangan	10,4	84,5	48,5	47,8	100	100	100	100	0,5	4,2	2,4	2,4
7	Gula	38,6	43,2	36,7	39,5	100	100	100	100	1,9	2,2	1,8	2,0
8	Sayur dan Buah	180,3	145,5	166,0	163,9	120	120	120	120	9,0	7,3	8,3	8,2
9	Lain-lain	18,4	16,8	18,7	17,9	60	60	60	60	0,9	0,8	0,9	0,9
	Total	2.796,2	2.613,6	2.731,6	2.713,8	2.000	2.000	2.000	2.000	139,8	130,7	136,6	135,7

A. Analisa Pola Pangan Harapan (Aktual)

Dilihat dari komposisi pola konsumsi pangan masyarakat Sumba Timur dalam kaitannya dengan Pola Pangan Harapan (PPH) maka pola konsumsi masyarakat masih jauh dari Pola Pangan Harapan. Dari Skor Pola Pangan Harapan maksimum 100%, Kabupaten Sumba Timur baru mencapai skor 77,4. Secara Kabupaten kuantitas konsumsi pangan masyarakat dengan melihat tingkat kecukupan energi maka kelompok pangan padi-padian memberikan kontribusi energi sebesar 110,5%. Dan secara berturut-turut diikuti oleh kelompok pangan Sayur dan buah 8,2%, Pangan Hewani 7,2%, minyak dan lemak 2,7%, Kacang-kacangan 2,4%, gula 2,0%, Umbi-umbian 1,0%, lain-lain 0,9% dan terakhir buah/biji berminyak 0,8%. Namun bila dilihat dari kontribusi energi berdasarkan zona ekologi terdapat perbedaan kontribusi energi antar zona namun kelompok pangan padi-padian tetap merupakan pangan pemberi kontribusi energi yang dominan. Untuk melihat perbandingan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan pada setiap zona dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi energi pada semua wilayah agroekologi masih didominasi dari sumber energi padi-padian dan semuanya berada diatas standar kebutuhan energi 2000 kkal/kap/hari. Tingkat kontribusi energi per kelompok pangan dari masing-masing wilayah agroekosistem, berbeda-beda sesuai potensi wilayah masing-masing. Kelompok pangan umbi-umbian pada wilayah lainnya memberikan kontribusi energi 1,4% dari kebutuhan dan jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kontribusi energi umbi-umbian pada wilayah perikanan sebesar 0,6% dan pada wilayah pertanian memberikan sumbangan 1,1% dari kebutuhan konsumsi. Hal ini dapat dipahami

bahwa tingkat keragaman jenis pangan pada wilayah lainnya jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah perikanan dan wilayah pertanian.

Persentase kontribusi energi terbesar dari kelompok pangan hewani adalah 8,9% dari kebutuhan energi pada wilayah lainnya diikuti oleh wilayah perikanan sebesar 46,8% dan wilayah pertanian 6,0%. Sumbangan energi pangan hewani pada wilayah lainya berasal dari hasil laut sedangkan wilayah perikanan dominan berasal dari hasil laut, dan diwilayah pertanian berasal dari daging dan telur.

**Kontribusi Energi Berdasarkan Zona Agroekologi
Per Kelompok Pangan Kabupaten Sumba Timur
Tahun 2014**

No	Kelompok Pangan	Pertanian			Perikanan			Lainnya		
		Kalori	Kontribusi Energi (%)	AKE (%)	Kalori	Kontribusi Energi (%)	AKE (%)	Kalori	Kontribusi Energi (%)	AKE (%)
1	Padi-padian	2.350,3	84,1	117,5	2.115,3	80,9	105,8	2.163,5	79,2	108,2
2	Umbi-umbian	22,0	0,8	1,1	11,1	0,4	0,6	28,4	1,0	1,4
3	Pangan Hewani	119,1	4,3	6,0	135,2	5,2	6,8	177,9	6,5	8,9
4	Minyak dan Lemak	39,2	1,4	2,0	47,7	1,8	2,4	74,6	2,7	3,7
5	Buah/Biji Berminyak	17,9	0,6	0,9	14,2	0,5	0,7	17,2	0,6	0,9
6	Kacang-kacangan	10,4	0,4	0,5	84,5	3,2	4,2	48,5	1,8	2,4
7	Gula	38,6	1,4	1,9	43,2	1,7	2,2	36,7	1,3	1,8
8	Sayur dan Buah	180,3	6,4	9,0	145,5	5,6	7,3	166,0	6,1	8,3
9	Lain-lain	18,4	0,7	0,9	16,8	0,6	0,8	18,7	0,7	0,9
	Total	2.796,2	100	139,8	2.613,6	100	130,7	2.731,6	100	136,6

Dengan demikian kelompok pangan padi-padian memberikan kontribusi energi terbesar dan diatas kebutuhan standar. Hal ini menunjukkan bahwa pola konsumsi masyarakat belum menerapkan pola pangan yang berimbang dimana masih didominasi oleh kelompok pangan padi-padian.

Dari sisi kualitas konsumsi masyarakat Sumba Timur masih jauh dari pola pangan yang diharapkan. Secara Kabupaten ada beberapa kelompok pangan yang telah mencapai skor PPH maksimum seperti kelompok padi-padian dengan skor Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 55,2 dari skor PPH maksimum 25 atau 110,5% diatas skor maksimum. Selain itu kelompok pangan Sayur dan buah mencapai skor AKE sebesar 41,0 melampaui skor PPH maksimum yaitu 30 atau 8,2% diatas skor maksimum. Sedangkan kelompok pangan yang lain belum mencapai atau masih jauh dibawah skor maksimum dan tingkat pencapaian skor dari setiap kelompok pangan berturut-turut sebagai berikut: kelompok pangan pangan hewani mencapai skor 14,4 atau 7,2% dari skor maksimum 24,0, kelompok pangan kacang-kacangan mencapai skor 4,8 atau 2,4% dari skor maksimum 10, kelompok pangan minyak dan lemak mencapai skor 1,3 atau 2,7% dari skor maksimum 5,0, kelompok pangan gula mencapai skor 1,0 atau 2,0% dengan skor maksimum 2,5, kelompok pangan umbi-umbian mencapai skor 0,5 atau 1,0% dengan skor maksimum 2,5 dan kelompok pangan buah/biji berminyak mencapai skor 0,4 atau 0,8% dengan skor maksimum 1,0. Dengan demikian secara keseluruhan skor Angka Kecukupan Energi Kabupaten Sumba Timur mencapai 109,1 atau 109,10% dari skor maksimum 100. Namun bila dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Sumba Timur baru mencapai 77,4 dari skor maksimum 100.



Untuk lebih jelasnya kualitas konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Sumba Timur dapat dilihat dari Tingkat Kecukupan Energi per Zona agroekologi seperti pada tabel dibawah :

**Tingkat Kecukupan Energi Dan Skor PPH Berdasarkan
Zona Agroekologi Per Kelompok Pangan
Kabupaten Sumba Timur Tahun 2014**

No	Kelompok Pangan	Pertanian			Perikanan			Lainnya		
		Skor AKE	Skor Maksimum	Skor PPH	Skor AKE	Skor Maksimum	Skor PPH	Skor AKE	Skor Maksimum	Skor PPH
1	Padi-padian	58,8	25,0	25,0	52,9	25,0	25,0	54,1	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	0,5	2,5	0,5	0,3	2,5	0,3	0,7	2,5	0,7
3	Pangan Hewani	11,9	24,0	11,9	13,5	24,0	13,5	17,8	24,0	17,8
4	Minyak dan Lemak	1,0	5,0	1,0	1,2	5,0	1,2	1,9	5,0	1,9
5	Buah/Biji Berminyak	0,4	1,0	0,4	0,4	1,0	0,4	0,4	1,0	0,4
6	Kacang-kacangan	1,0	10,0	1,0	8,5	10,0	8,5	4,9	10,0	4,9
7	Gula	1,0	2,5	1,0	1,1	2,5	1,1	0,9	2,5	0,9
8	Sayur dan Buah	45,1	30,0	30,0	36,4	30,0	30,0	41,5	30,0	30,0
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	119,7	100	70,9	114,1	100	79,9	122,2	100	81,6

Dari tampilan data diatas menunjukkan bahwa jenis pangan yang dikonsumsi masyarakat didasarkan atas ketersediaan jenis pangan di wilayah yang bersangkutan. Selain padi-padian serta sayur dan buah yang telah mencapai skor PPH maksimum, jenis pangan lainnya, ketersediaan pangan lainnya masih kurang sehingga tingkat konsumsi masyarakat masih rendah dan berbeda antar Zona. Umbi-umbian lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat pada wilayah lainnya dengan Tingkat Kecukupan Energi (TKE) 0,7 dibandingkan dengan wilayah pertanian TKE 0,5 dan wilayah perikanan TKE 0,3. Pangan Hewani pada wilayah lainnya dengan TKE 17,8 lebih tinggi dari wilayah perikanan dengan TKE 13,5 dan wilayah pertanian 11,9. Pangan hewani pada wilayah perikanan lebih banyak disumbangkan dari hasil laut. Minyak dan lemak pada semua wilayah tidak banyak berbeda dan masih jauh dari skor maksimum. Pada wilayah pertanian minyak dan lemak lebih banyak disumbangkan dari lemak babi dan minyak kelapa, wilayah perikanan dari minyak kelapa dan minyak goreng sedangkan diwilayah lainnya berasal dari minyak goreng. Buah/biji berminyak dengan jenis pangan buah kelapa lebih banyak dikonsumsi oleh masyarakat diwilayah pertanian dibandingkan dengan wilayah lainnya dan wilayah perikanan. Kacang-kacangan lebih banyak dikonsumsi diwilayah perikanan dengan TKE 8,5, sedangkan wilayah lainnya TKE 4,9 dan wilayah pertanian 1,0. Konsumsi kacang-kacangan diwilayah lainnya lebih banyak berasal dari kedelai, wilayah perikanan dari kacang tanah dan kacang hijau sedangkan wilayah pertanian dari kacang tanah. Konsumsi gula pada semua wilayah tidak ada perbedaan yang menyolok atau tingkat konsumsi gula pada semua wilayah masih rendah. Secara keseluruhan Skor PPH atau kualitas konsumsi pangan pada wilayah lainnya dengan PPH 81,6 lebih tinggi dari wilayah perikanan yaitu 79,9 dan wilayah pertanian 70,9. Tingginya skor PPH pada wilayah lainnya disumbangkan



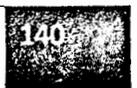
oleh kelompok pangan hewani dan kelompok pangan sayur dan buah yang jauh lebih tinggi dari wilayah perikanan dan wilayah pertanian.

Dengan gambaran seperti data diatas ini menunjukkan bahwa tingkat keragaman konsumsi pangan masyarakat Sumba Timur masih rendah karena masih didominasi oleh sumber energi yang berasal dari padi-padian sehingga menyebabkan tingginya 135,7 skor AKE yang melampaui skor maksimum yaitu 100, sedangkan dilain pihak skor PPH baru mencapai 77,4 dari skor PPH maksimum yaitu 100.

B. Analisa Pola Konsumsi Berdasarkan Klasifikasi Fungsi Wilayah

Apabila kita melihat tingkat konsumsi energi berdasarkan karakteristik agroekologi, maka tingkat konsumsi energi pada wilayah pertanian 2.796,2 kkal/kap/hari atau 139,8% dari standar kecukupan energi lebih tinggi dari wilayah lainnya 2.731,6 kkal/kap/hari atau 136,6% dari standar dan wilayah perikanan 2,613,6 kkal/kap/hari atau 130,7% dari standar. Secara keseluruhan, pensuplai sumber energi tertinggi barasal dari padi-padian serta sayur dan buah dan secara wilayah agroekologi ada pada wilayah pertanian. Hal ini bertepatan dengan musim panen padi-padian sehingga masyarakat lebih banyak mengkonsumsi bahan pangan yang tersedia.

Sedangkan apabila kita melihat tingkat konsumsi protein berdasarkan karakteristik agroekologi, maka konsumsi Protein pada wilayah pertanian 75,4 gram/kap/hari dari standar kecukupan protein yaitu 52,0 gram/kap/hari lebih tinggi dari wilayah lainnya 75,1 gram/kap/hari dari standar dan wilayah perikanan 71,6 gram/kap/hari dari standar. Secara keseluruhan wilayah agroekologi, tingkat konsumsi protein telah melebihi standar kecukupan protein.



4.3.2. Bidang Distribusi dan Harga

Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi masyarakat sangat ditentukan oleh aspek pemerataan distribusi dan pasokan diseluruh wilayah, harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan penyediaan cadangan pangan oleh pemerintah dan masyarakat, maka fungsi pelayanan publik bidang distribusi dan harga adalah menyusun langkah-langkah operasional kegiatan bidang distribusi dan harga berdasarkan rencana kerja badan dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada agar tersedia perencanaan yang partisipatif dan akomodatif.

Program dan kegiatan bidang distribusi dan harga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam perencanaan dari sisi pemerataan distribusi/pasokan yang merata keseluruh wilayah sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat sangat penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dalam jumlah yang cukup dan mutu yang baik.

Dari aspek stabilitas harga pangan mempunyai tujuan ganda, yaitu untuk mengamankan pasokan pangan pokok masyarakat oleh produsen, dan mengamankan konsumsi pangan oleh konsumen dengan harga terjangkau. Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang distribusi pangan dan harga , untuk mendorong stabilitas harga gabah/beras di tingkat petani, mulai tahun 2004 pemerintah telah mengalokasikan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) dari dana APBN dan pada tahun 2006 pemerintah Kabupaten Sumba Timur mengalokasikan dari dana APBD II . DPM merupakan dana talangan dari APBN, disalurkan

kepada LUEP untuk membeli secara langsung gabah/beras petani sesuai HPP dan Jagung sesuai harga referensi daerah.

Dari aspek cadangan pangan Bidang distribusi dan harga telah melakukan pengembangan lumbung pangan masyarakat terutama pada lokasi yang rawan bencana dan daerah yang terpengaruh masa paceklik serta daerah-daerah yang merupakan sentral produksi. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, bahwa cadangan pangan nasional terdiri dari cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat.

**SEBARAN DANA LUEP
KABUPATEN SUMBA TIMUR
S/D TAHUN 2014**

TAHUN 2011

NO	KECAMATAN	GAPOKTAN	JLH DANA	KET
a	b	c	d	e
1	NGGOA	ANUGERAH	12.500.000	
2	WULA WAJELU	MATAWAI MBURUNG	30.000.000	
3	PANDAWAI	KAHAUNGU ETI	60.000.000	
4	UMALULU	EKA MANDALA	100.000.000	
5	KAMBERA	BERKATNYA	10.000.000	
		TOTAL	212.500.000	

TAHUN 2012

NO	KECAMATAN	GAPOKTAN	JLH DANA	KET

a	b	c	d	e
1	NGGOA	ANAKAPU INDAH	65.000.000	PRAIPAHA
2	PANDAWAI	KAHAUNGU ETI	65.000.000	KAWANGU
3	PAHUNGA LODU	BUNGA TANI	50.000.000	PALANGGAY
4	WULA WAIJELU	MATAWAI MBURUNG	40.000.000	WULLA
5	PANDAWAI	PANDAWA LIMA	30.000.000	KADUMBUL
		TOTAL	250.000.000	

TAHUN 2013

NO	KECAMATAN	GAPOKTAN	JLH DANA	KET
a	b	c	d	e
1	NGGOA	ANAKAPU INDAH	50.000.000	PRAIPAHA
2	PANDAWAI	KAHAUNGU ETI	50.000.000	KAWANGU
3	PAHUNGA LODU	BUNGA TANI	60.000.000	PALANGGAY
4	PANDAWAI	PANDAWA LIMA	60.000.000	
5	LETIS	NDULA ANGU	150.000.000	
6	UMALULU	EKA MANDALA	100.000.000	
7	LEWA	GAYA BARU	30.000.000	
		TOTAL	500.000.000	

TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	GAPOKTAN	JLH DANA	KET
a	b	c	d	e
1	PANDAWAI	KAHAUNGU ETI	60.000.000	KAWANGU
2	NGGOA	ANAKAPU INDAH	60.000.000	PRAIPAHA
3	PAHUNGA LODU	BUNGA TANI	60.000.000	PALANGGAY
4	PANDAWAI	PANDAWA LIMA	60.000.000	KADUMBUL
5	TABUNDUNG	KEBERSAMAAN SEJATI	40.000.000	TARIMBANG
6	UMALULU	KARISMA	35.000.000	MUTUGEDING
7	TABUNDUNG	KIOS UNPA	25.000.000	KUKITALU
8	NGGOA	MITRA TANI	30.000.000	PRAIPAHA
9	WULA WAIJELU	RUKUN JAYA	30.000.000	WULLA
10	RINDI	PEKU HAMU	25.000.000	LAILANJANG
11	PAHUNGA LODU	KIOS TANI	55.000.000	KALIUDA
12	PAHUNGA LODU	BUNGA TAJU REJO	20.000.000	KALIUDA
		TOTAL	500.000.000	

4.3.3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Berbagai peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan, juga telah mengarahkan dan mendorong pematapan ketahanan pangan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan diwujudkan melalui kesepakatan Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan pangan (DKP) Propinsi dan Bupati /Walikota selaku Ketua DKP Kabupaten/Kota dalam Konferensi dan Sidang Regional DKP pada bulan Nopember 2008, menyatakan bahwa pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan pertanggungjawaban urusan ketahanan pangan. Suhubungan dengan hal tersebut, maka Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur mempunyai fungsi koordinasi dalam menangani Ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi dijalankan bersama dengan instansi teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat lapangan baik itu secara fisik maupun non fisik melalui penyampaian laporan bulanan secara rutin mengenai ketersediaan pangan, serta pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pada bidang ketersediaan dan kerawanan pangan Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur, maka fungsi koordinasi yang dijalankan adalah menganalisa data ketersediaan bahan pangan yang dikonsumsi yang ditunjukkan dari hasil Neraca Bahan Makanan (NBM) yang dihitung berdasarkan jumlah produksi dan jumlah energi, protein yang di konsumsi perkapita perhari.

Fungsi koordinasi yang dilaksanakan merupakan kebijakan koordinasi yang terkait langsung dengan implementasi konsep pembangunan dilapangan yang diwujudkan dalam bentuk koordinasi teknis dengan berbagai sektor teknis berkenaan dengan pembangunan yang dijalankan sehingga tujuan pembangunan akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Koordinasi sektoral meliputi Badan/Dinas/Kantor dan unit kerja seperti:

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sumba Timur
 2. Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur
 3. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur
 4. Dinas Perkebunan Kabupaten Sumba Timur
 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur
 6. Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Sumba Timur
- BP4K Kabupaten Sumba Timur

2.3.3.1. Pengadaan dan Cadangan Pangan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi pangan di Kabupaten Sumba Timur pada Tahun 2010, maka Badan Bimas dan Ketahanan Pangan melakukan kegiatan pendataan realisasi tanam, panen dan produktivitas komoditi pangan untuk tanaman bahan makanan yang diklasifikasikan dalam 4 kelompok utama, yaitu Kelompok Beras dan Jagung, Kelompok Kacang – kacang, Kelompok Ubi - ubian.

Metode pengumpulan data yang dipakai yaitu dengan metode koordinasi dengan BPP Kecamatan. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer yang diperoleh melalui pengisian format oleh BPP Kecamatan. Data primer yang diperoleh akan diolah untuk mengetahui realisasi tanam, panen dan produktivitas komoditi pangan dan mengetahui situasi pangan se Kabupaten Sumba Timur.

2.3.3.1.1. ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN tahun 2009

Kondisi Pangan Secara Kabupaten

Kondisi pangan pada bulan Januari s/d September 2009 secara Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan hasil Analisa Data Laporan Realisasi Panen dan Produktivitas Tanaman Pangan dalam wilayah 22 Kecamatan, maka disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Jumlah Produksi Pangan yang bersumber dari komoditi padi (beras), jagung/sorghum, ubi-ubian dan kacang-kacangan adalah **sebesar 39.961,00 Ton EB**. Sedangkan jumlah kebutuhan untuk dikonsumsi masyarakat Sumba Timur **sebesar 30.117,35 Ton EB**.
- b. Kondisi pangan untuk periode Januari s/d September 2009, ketersediaannya mengalami **surplus** sebesar **9.783,65 Ton EB**. Sedangkan jumlah kebutuhan perbulannya untuk konsumsi masyarakat Sumba Timur **sebesar 3.353,03 Ton EB**.
- c. Jika masyarakat mengkonsumsi beras saja, maka ketersediaannya mengalami **surplus** sebesar **20.255,75 Ton EB**. Jumlah ketersediaan produksi beras sebanyak **29.693,33 Ton EB**. Sedangkan jumlah kebutuhan untuk dikonsumsi sebanyak **9.437,59 Ton EB**.

- d. Berdasarkan hasil analisis data produksi tersedia dan kebutuhan untuk dikonsumsi dari beberapa komoditi kelompok pangan yang bersumber dari jagung, kacang tanah dan kacang hijau penyediaannya cukup tersedia, sedangkan untuk komoditi kacang kedelai, ubi kayu dan ubi jalar mengalami **minus**.
- e. Adapun jumlah produksi tersedia dan kebutuhan untuk dimakan serta ketersediaannya (kelebihan – kekurangan) dari masing masing komoditi seperti *tabel 1* berikut ini :

Tabel 1 : Ketersediaan Produksi dengan Kebutuhan Konsumsi

No	Jenis Komoditi	Produksi Tersedia (Ton EB)	Kebutuhan utk dikonsumsi /dimakan (Ton EB)	Kelebihan (+) Kekurangan (-) (Ton EB)
1	Padi (beras)	29.693,33	9.437,59	(+) 20.255,75
2	Jagung/sorghum	9.751,77	1.203,31	(+) 8.548,46
3	Kacang tanah	814,95	38,56	(+) 776,39
4	Kacang Kedelai	(0,12)	78,51	(-) 78,63
5	Kacang hijau/lain-lain kacang	68,49	80,76	(-) 12,27
6	Ubi Kayu	490,64	3.057,53	(-) 2.533,95
7	Ubi jalar/lain-lain ubi	25,26	409,80	(-) 384,54

- f. Dari hasil analisa realisasi tanam, luas panen dan jumlah produksi tersedia dari masing – masing komoditi tanaman bahan makanan Kabupaten Sumba Timur keadaan Januari s/d September 2009, dengan rincian masing – masing komoditi sebagai berikut :

Tabel 2 : Luas Tanam, Panen dan Jumlah Produksi per Komoditi

No	Jenis Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi Tersedia (Ton EB)
1	Padi (beras)	10.405	10.010	29.693,33
2	Jagung/sorghum	1.577	11.211	9.751,77
3	Kacang tanah	343	2.897	814,95
4	Kacang Kedelei	3	-	(0,12)
5	Kacang hijau/lain-lain kacang	190	259	68,49
6	Ubi Kayu	474	1.046	490,64
7	Ubi jalar/lain-lain ubi	286	123	25,26

Dari hasil analisa data realisasi tanam, panen, dan produksi diatas, kita mendapat gambaran bahwa realisasi panen untuk komoditi jagung cukup tinggi menyebabkan ketersediaannya cukup. Hal ini disebabkan karena cukup stabilnya curah hujan.

2.3.3.1.2. ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN tahun 2010

Kondisi Pangan Secara Kabupaten

Kondisi pangan pada bulan Januari s/d September 2010 secara Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan hasil Analisa Data Laporan Realisasi Panen dan Produktivitas Tanaman Pangan dalam wilayah 22 Kecamatan, maka disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Jumlah Produksi Pangan yang bersumber dari komoditi padi (beras), jagung/sorghum, ubi-ubian dan kacang-kacangan adalah **sebesar 22.548,68 Ton EB**. Sedangkan jumlah kebutuhan untuk dikonsumsi masyarakat Sumba Timur **sebesar 38.811,72 Ton EB**.

- b. Kondisi pangan untuk periode Januari s/d September 2010, ketersediaannya mengalami **Minus** sebesar **16.263,04 Ton EB**. Sedangkan jumlah kebutuhan perbulannya untuk konsumsi masyarakat Sumba Timur sebesar **3.234,31 Ton EB**.
- c. Jika masyarakat mengkonsumsi beras saja, maka ketersediaannya mengalami **Minus** sebesar **11.677,91 Ton EB**. Jumlah ketersediaan produksi beras sebanyak **11.522,87 Ton EB**. Sedangkan jumlah kebutuhan untuk dikonsumsi sebanyak **23.200,78 Ton EB**.
- d. Berdasarkan hasil analisis data produksi tersedia dan kebutuhan untuk dikonsumsi dari beberapa komoditi kelompok pangan yang bersumber dari jagung, kacang tanah penyediaannya cukup tersedia, sedangkan untuk komoditi padi, kedelai dan kacang hijau dan ubi kayu mengalami **minus**.
- e. Adapun jumlah produksi tersedia dan kebutuhan untuk dimakan serta ketersediaannya (kelebihan – kekurangan) dari masing masing komoditi seperti *tabel 1* berikut ini :

Tabel 1 : Ketersediaan Produksi dengan Kebutuhan Konsumsi

No	Jenis Komoditi	Produksi Tersedia (Ton EB)	Kebutuhan utk dikonsumsi /dimakan (Ton EB)	Kelebihan (+) Kekurangan (-) (Ton EB)
1	Padi (beras)	11.522,87	23.200,78	(-) 11.677,91
2	Jagung/sorghum	9.461,97	8.001,75	(+) 1.460,23
3	Kacang tanah	633,19	181,08	(+) 776,39
4	Kacang Kedelai	31	296,24	(-) 264,65
5	Kacang hijau/lain-lain kacang	187,22	378,55	(-) 191,33
6	Ubi Kayu	439	6.269,81	(-) 5.796,58
7	Ubi jalar/lain-lain ubi	154	428,86	(-) 274,94

- f. Dari hasil analisa realisasi tanam, luas panen dan jumlah produksi tersedia dari masing – masing komoditi tanaman bahan makanan Kabupaten Sumba Timur keadaan Januari s/d September 2010, dengan rincian masing – masing komoditi sebagai berikut :

Tabel 2 : Luas Tanam, Panen dan Jumlah Produksi per Komoditi

No	Jenis Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi Tersedia (Ton EB)
1	Padi (beras)	11.383	8.723	11.522,87
2	Jagung/sorghum	13.188	7.561	9.461,97
3	Kacang tanah	2.255	681	633,19
4	Kacang Kedelei	86	57	31
5	Kacang hijau/lain-lain kacang	648	347	187,22
6	Ubi Kayu	2.569	981	439
7	Ubi jalar/lain-lain ubi	1.549	448	154

Dari hasil analisa data realisasi tanam, panen, dan produksi diatas, kita mendapat gambaran bahwa realisasi panen untuk komoditi jagung cukup tinggi menyebabkan ketersediaannya cukup.

2.3.3.1.3. ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN tahun 2011

Kondisi Pangan Secara Kabupaten

Kondisi pangan pada bulan Januari s/d Desember 2011 secara Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan hasil Analisa Data Laporan Realisasi Panen dan Produktivitas Tanaman Pangan dalam wilayah 22 Kecamatan, maka disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

- g. Jumlah **Produksi Pangan** yang bersumber dari komoditi padi (beras), jagung/sorghum, ubi-ubian dan kacang—kacangan adalah **sebesar 34.323,30 Ton EB**. Sedangkan jumlah **kebutuhan untuk dikonsumsi** masyarakat Sumba Timur **sebesar 43.484,79 Ton EB**.
- h. Kondisi pangan untuk periode Januari s/d Desember 2011, ketersediaannya mengalami **Minus** sebesar **9.161,49 Ton EB**. Sedangkan jumlah kebutuhan perbulannya untuk konsumsi masyarakat Sumba Timur **sebesar 3.623,73 Ton EB**.
- i. Jika masyarakat mengkonsumsi beras saja, maka ketersediaannya mengalami **minus** sebesar **5.264,23 Ton EB**. Jumlah **ketersediaan produksi beras sebanyak 19.971,17 Ton EB**. Sedangkan jumlah **kebutuhan untuk dikonsumsi sebanyak 24.688,00 Ton EB**.
- j. Berdasarkan hasil analisis data produksi tersedia dan kebutuhan untuk dikonsumsi dari beberapa komoditi kelompok pangan yang bersumber dari jagung dan kacang tanah penyediaannya cukup tersedia, sedangkan untuk komoditi padi, kedelai, kacang hijau dan ubi kayu mengalami **minus**.
- k. Adapun jumlah produksi tersedia dan kebutuhan untuk dimakan serta ketersediaannya (kelebihan—kekurangan) dari masing masing komoditi seperti *tabel 1* berikut ini :

Tabel 1 : Ketersediaan Produksi dengan Kebutuhan Konsumsi

No	Jenis Komoditi	Produksi Tersedia (Ton EB)	Kebutuhan utk dikonsumsi /dimakan (Ton EB)	Kelebihan (+) Kekurangan (-) (Ton EB)
1	Padi (beras)	19.971,17	24.688,00	(-) 5.264,23
2	Jagung/sorghum	12.668,14	8.967,38	(+) 3.700,76
3	Kacang tanah	636,22	202,02	(+) 434,19
4	Kacang Kedelai	1,00	334,92	(-) 335,50
5	Kacang hijau/lain-lain kacang	283,28	416,09	(-) 131,60
6	Ubi Kayu	596,20	6.995,11	(-) 6.398,90
7	Ubi jalar/lain-lain ubi	168,86	477,48	(-) 308,62

Dari tabel 1 diatas dapat digambarkan bahwa ada 2 (dua) komoditi yang **surplus** yaitu **komoditi jagung dengan kelebihan produksi 3.700,76Ton EB** dari kebutuhan untuk **dikonsumsi/dimakan 8.967,38Ton EB** dan **produksi tersedianya 12.668,14 Ton EB** dan komoditi kedua yang **surplus** yaitu **komoditi kacang tanah dengan kelebihan produksi 434,19 Ton EB** dari kebutuhan untuk **dikonsumsi/dimakan 202,02 Ton EB** dan **produksi tersedia 636,22 Ton EB**. Sedangkan komoditi yang mengalami **minus** adalah **komoditi padi sebesar 5.264,23 Ton EB, kacang kedelai sebesar 335,50 Ton EB, kacang hijau/lain-lain kacang sebesar 131,60 Ton EB, ubi kayu sebesar 6.398,90 Ton EB dan ubi jalar/lain-lain ubi sebesar 308,62 Ton EB.**

1. Dari hasil analisa realisasi tanam, luas panen dan jumlah produksi tersedia dari masing– masing komoditi tanaman bahan makanan Kabupaten Sumba Timur keadaan Januari s/d Desember 2011 dengan rincian masing – masing komoditi sebagai berikut :

Tabel 2 : Luas Tanam, Panen dan Jumlah Produksi per Komoditi

No	Jenis Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi Tersedia (Ton EB)
1	Padi (beras)	16.087	13.626	19.971,17
2	Jagung/sorghum	13.595	9.796	12.668,14
3	Kacang tanah	1.299	862,00	636,22
4	Kacang Kedelai	15,00	-	1,00
5	Kacang hijau/lain-lain kacang	839	564	283,28
6	Ubi Kayu	3.064	1.790	596,20
7	Ubi jalar/lain-lain ubi	1.523	770,00	168,86

Hasil analisa data realisasi tanam, panen, dan produksi pada tabel 2, dari 7 komoditi kita mendapat gambaran bahwa komoditi padi (beras) jumlah produksi tersedianya lebih tinggi dari komoditi yang lain yaitu 19.971,17 Ton EB dari luas tanam 16.087 Ha dan luas panen 13.626 Ha, ini menunjukkan bahwa petani lebih dominan memilih komoditi padi (beras) sebagai tanaman unggulan. Selanjutnya komoditi jagung juga diandalkan petani dengan jumlah produksi tersedianya 12.668,14 Ton EB dari luas tanam 13.595 Ha dan luas panen 9.796 Ha sedangkan komoditi kacang kedelai adalah komoditi yang jumlah produksi tersedianya paling kecil di banding komoditi yang lain yaitu 1,00 Ton EB karena hampir semua desa tidak menanam komoditi tersebut.

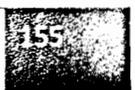


2.3.3.1.4. ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN TAHUN 2012

Kondisi Pangan Secara Kabupaten

Kondisi pangan pada bulan Januari s/d Desember 2012 secara Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan hasil Analisa Data Laporan Realisasi Panen dan Produktivitas Tanaman Pangan dalam wilayah 22 Kecamatan, maka disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

- m. Jumlah **Produksi Pangan** yang bersumber dari komoditi padi (beras), jagung/sorghum, ubi-ubian dan kacang—kacangan adalah sebesar **44.741,39 Ton EB**. Sedangkan jumlah **kebutuhan untuk dikonsumsi** masyarakat Sumba Timur sebesar **41.078,21 Ton EB**.
- n. Kondisi pangan untuk periode Januari s/d Desember 2012, ketersediaannya mengalami **Surplus** sebesar **3.663,18 Ton EB**. Sedangkan jumlah kebutuhan perbulannya untuk konsumsi masyarakat Sumba Timur sebesar **3.423,18 Ton EB**.
- o. Jika masyarakat mengkonsumsi beras saja, maka ketersediaannya mengalami **surplus** sebesar **346,43 Ton EB**. Jumlah **ketersediaan produksi beras sebanyak 24.332,36 Ton EB**. Sedangkan jumlah **kebutuhan untuk dikonsumsi sebanyak 23.985,92 Ton EB**.
- p. Berdasarkan hasil analisis data produksi tersedia dan kebutuhan untuk dikonsumsi dari beberapa komoditi kelompok pangan yang bersumber dari padi, jagung dan kacang tanah penyediaannya cukup tersedia, sedangkan untuk komoditi kedelai, kacang hijau dan ubi kayu mengalami **minus**.
- q. Adapun jumlah produksi tersedia dan kebutuhan untuk dimakan serta ketersediaannya (kelebihan—kekurangan) dari masing masing komoditi seperti *tabel 1* berikut ini :



Tabel 1 : Ketersediaan Produksi dengan Kebutuhan Konsumsi

No	Jenis Komoditi	Produksi Tersedia (Ton EB)	Kebutuhan utk dikonsumsi /dimakan (Ton EB)	Kelebihan (+) Kekurangan (-) (Ton EB)
1	Padi (beras)	24.332,36	23.985,92	(+) 346,43
2	Jagung/sorghum	18.177,77	8.398,95	(+) 9.778,82
3	Kacang tanah	581,25	191,65	(+) 389,60
4	Kacang Kedelai	6,00	323,41	(-) 317,86
5	Kacang hijau/lain-lain kacang	396,57	403,48	(-) 6,91
6	Ubi Kayu	723	6.559,01	(-) 5.835,65
7	Ubi jalar/lain-lain ubi	536	442,35	(+) 93,78

Dari tabel 1 diatas dapat digambarkan bahwa ada 4 (dua) komoditi yang **surplus** yaitu **komoditi padi dengan kelebihan produksi 346,43 Ton EB** dari kebutuhan untuk **dikonsumsi/dimakan 23.985,92 Ton EB** dan **produksi tersedianya 24.332,36 Ton EB**, **komoditi jagung dengan kelebihan produksi 9.778,82Ton EB** dari kebutuhan untuk **dikonsumsi/dimakan 8.398,95Ton EB** dan **produksi tersedianya 18.177,77 Ton EB** dan komoditi ketiga yang **surplus** yaitu **komoditi kacang tanah dengan kelebihan produksi 389,60 Ton EB** dari kebutuhan untuk **dikonsumsi/dimakan 191,65 Ton EB** dan **produksi tersedia 581,25Ton EB**, **Komoditi ubi jalar/lain-lain ubi sebesar 93,78 Ton EB.**

Sedangkan komoditi yang mengalami **minus** adalah **komoditi kacang kedelai sebesar 317,86 Ton EB**, **kacang hijau/lain-lain kacang sebesar 6,91Ton EB**, **ubi kayu sebesar 5.835,65 Ton EB**

- r. Dari hasil analisa realisasi tanam, luas panen dan jumlah produksi tersedia dari masing-masing komoditi tanaman bahan makanan Kabupaten Sumba Timur keadaan Januari s/d Desember 2012 dengan rincian masing – masing komoditi sebagai berikut :

Tabel 2 : Luas Tanam, Panen dan Jumlah Produksi per Komoditi

No	Jenis Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi Tersedia (Ton EB)
1	Padi (beras)	17.581	14.037	24.332,91
2	Jagung/sorghum	10.893	9.945	18.177,77
3	Kacang tanah	1.306	774,00	581,25
4	Kacang Kedelai	-	15	6,00
5	Kacang hijau/lain-lain kacang	831	427	396,57
6	Ubi Kayu	2.628	1.188	723
7	Ubi jalar/lain-lain ubi	1.229	644,00	536

Hasil analisa data realisasi tanam, panen, dan produksi pada tabel 2, dari 7 komoditi kita mendapat gambaran bahwa komoditi padi (beras) jumlah produksi tersedianya lebih tinggi dari komoditi yang lain yaitu 24.332,91Ton EB dari luas tanam 17.581 Ha dan luas panen 14.037 Ha, ini menunjukkan bahwa petani lebih dominan memilih komoditi padi (beras) sebagai tanaman unggulan. Selanjutnya komoditi jagung juga diandalkan petani dengan jumlah produksi tersedianya 18.177,77 Ton EB dari luas tanam 10.893Ha dan luas panen 9.945 Ha sedangkan komoditi kacang kedelai adalah komoditi yang jumlah produksi tersedianya paling kecil di banding komoditi yang lain yaitu 6,00 Ton EB karena hampir semua desa tidak menanam komoditi tersebut.

2.3.3.1.5. ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN tahun 2013

Kondisi Pangan Secara Kabupaten

Kondisi pangan pada bulan Januari s/d Desember 2013 secara Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan hasil Analisa Data Laporan Realisasi Panen dan Produktivitas



Tanaman Pangan dalam wilayah 22 Kecamatan, maka disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Jumlah **Produksi Pangan** yang bersumber dari komoditi padi (beras), jagung/sorghum, ubi-ubian dan kacang--kacangan adalah **sebesar 52.583,86 Ton EB**. Sedangkan jumlah **kebutuhan untuk dikonsumsi** masyarakat Sumba Timur **sebesar 37.244,68 Ton EB**.
- b. Kondisi pangan untuk periode Januari s/d Desember 2013, ketersediaannya mengalami **Surplus** sebesar **15.339,18 Ton EB**. Dan jumlah kebutuhan perbulannya untuk konsumsi masyarakat Sumba Timur **sebesar 3.103,72 Ton EB** dengan demikian dari surplus yang ada sebesar **15.339,18 Ton EB** dapat mencukupi kebutuhan pangan masyarakat untuk 4 (empat) bulan kedepan.
- c. Jika masyarakat mengkonsumsi beras sesuai angka dan standard nasional yaitu 112,65 Kg/Kap/Tahun maka kebutuhan konsumsi beras pertahun sebesar **26.283,78 Ton EB** sehingga masih terjadi surplus beras sebesar **3.401,83 Ton EB** dari produksi tersedia sebesar **29.685,62 Ton EB**. Dengan demikian dari surplus yang ada sebesar 15.339,18 Ton EB dapat mencukupi kebutuhan Pangan Masyarakat untuk 4 Bulan kedepan.
- d. Berdasarkan hasil analisis data produksi tersedia dan kebutuhan untuk dikonsumsi dari beberapa komoditi kelompok pangan yang bersumber dari Padi, jagung dan kacang tanah penyediaannya Surplus sedangkan untuk komoditi kedelai, kacang hijau dan ubi kayu mengalami **minus**.
- e. Adapun jumlah produksi tersedia dan kebutuhan untuk dimakan serta ketersediaannya (kelebihan--kekurangan) dari masing masing komoditi seperti *tabel 1* berikut ini :

Tabel 1 : Ketersediaan Produksi dengan Kebutuhan Konsumsi

No	Jenis Komoditi	Produksi Tersedia (Ton EB)	Kebutuhan utk dikonsumsi /dimakan (Ton EB)	Kelebihan (+) Kekurangan (-) (Ton EB)
1	Padi (beras)	29.685,62	26.283,78	(+) 3.401,84
2	Jagung/Sorghum	18.909,19	4.693,88	(+) 14.215,31
3	Kacang Tanah	1.302,93	92,60	(+) 1.210,33
4	Kacang Kedelai	1,00	408,40	(-) 407,27
5	Kacang hijau/lain-lain kacang	231,96	274,76	(-) 42,80
6	Ubi Kayu	2.012	4.159,43	(-) 2.147,38
7	Ubi jalar/lain-lain ubi	511	378,23	(+) 132,90

Dari tabel 1 diatas dapat digambarkan bahwa ada 4 (Empat) komoditi yang **surplus** yaitu **komoditi Padi dengan kelebihan produksi 3.401,84 Ton EB** dari kebutuhan untuk **dikonsumsi/dimakan 26.283,78 Ton EB** dengan produksi tersedia **29.685,62 Ton EB**, **jagung dengan kelebihan produksi 14.315,31 Ton EB** dari kebutuhan untuk dikonsumsi/dimakan **4.693,88 Ton EB** dengan produksi tersedia **18.909,19 Ton EB**, **komoditi kacang tanah dengan kelebihan produksi 1.210,33 Ton EB** dari kebutuhan untuk **dikonsumsi/dimakan 92,60 Ton EB** dan **produksi tersedia 1.302,93 Ton EB** dan **komoditi Ubi Jalar/Lain – Lain Ubi dengan kelebihan produksi 132,90 Ton EB** dari kebutuhan untuk **dikonsumsi/dimakan 378,23 Ton EB** dan **produksi tersedianya 511 Ton EB** Sedangkan komoditi yang mengalami **minus** adalah **komoditi kacang kedelai sebesar 407,27 Ton EB**, kacang hijau/lain-lain kacang sebesar **42,80 Ton EB** dan ubi kayu sebesar **2.147,38 Ton EB**.

- a. Dari hasil analisa realisasi tanam, luas panen dan jumlah produksi tersedia dari masing– masing komoditi tanaman bahan makanan Kabupaten Sumba Timur keadaan Januari s/d Desember 2013 dengan rincian masing – masing komoditi sebagai berikut

Tabel 2 : Luas Tanam, Panen dan Jumlah Produksi per Komoditi

No	Jenis Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi Tersedia (Ton EB)
1	Padi (beras)	21.339	17.574	29.685,62
2	Jagung/sorghum	12.500	12.298	18.909,19
3	Kacang Tanah	1.783	1.472	1.302,93
4	Kacang Kedelei	2	2	0,00
5	Kacang hijau/lain-lain kacang	574	406	231,96
6	Ubi Kayu	2.362	2.177	2.012
7	Ubi jalar/lain-lain ubi	1.010	762	524

Hasil analisa data realisasi tanam, panen, dan produksi pada tabel 2, dari 7 komoditi kita mendapat gambaran bahwa komoditi padi (beras) jumlah produksi tersedianya lebih tinggi dari komoditi yang lain yaitu **29.685,62** Ton EB dari luas tanam **21.339** Ha dan luas panen **17.574** Ha, ini menunjukkan bahwa petani lebih dominan memilih komoditi padi (beras) sebagai tanaman unggulan. Selanjutnya komoditi jagung juga diandalkan petani dengan jumlah produksi tersedianya **18.909,19** Ton EB dari luas tanam **12.500** Ha dan luas panen **12.298** Ha. Kacang tanah dan ubi kayu memberikan sumbangan produksi masing – masing **1.302,93** Ton EB dan **2.012** Ton EB sedangkan Kedelai kacang panjang dan ubi jalar menyumbang produksi sedikit berturut – turut **1** Ton EB, **231,96** Ton EB dan **524** Ton EB.

sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal menduduki urutan ketiga dengan skor yang selisih sedikit dari faktor kekuatan sebelumnya yaitu sebesar 0,402. setelah faktor kekuatan yang ketiga disusul dengan faktor Adanya sumber dana setiap tahunnya dengan skor sebesar 0,355 atau sebesar 18% dari total faktor kekuatan. Faktor terakhir dengan presentase sebesar 16% adalah faktor terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah dengan skor. 0,306.

Tabel 4.1 Bobot dan Peringkat Faktor Strategik Internal

Faktor Strategik Internal	Bobot	Peringkat	Skor
Kekuatan			
Komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap ketahanan pangan	0,132	3,7	0,489
Luasnya lahan dan factor produksi pertanian	0,122	3,3	0,403
Adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal	0,112	3,6	0,402
Adanya sumber dana setiap tahunnya	0,105	3,4	0,355
Terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah	0,085	3,6	0,306
Jumlah Kekuatan	0,556		1,955
Kelemahan			
Daya beli masyarakat rendah	0,121	1,7	0,205
Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal	0,093	1,8	0,167
Pola konsumsi masyarakat yang belum B2SA	0,092	1,6	0,148
Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan	0,067	1,8	0,121
Terbatasnya SDM dibandingkan beban tugas yang harus dilaksanakan	0,072	1,3	0,093
Jumlah Kelemahan	0,445		0,734
Jumlah Kekuatan dan Kelemahan	1,000		2,689

Sumber : Hasil Penelitian yang Diolah

a. **Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan**

Komitmen pemerintah yang merupakan jaminan legal dan normatif terhadap ketahanan pangan dapat dilihat dari regulasi maupun dokumen kebijakan ketahanan pangan yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Hal ini tertuang dalam kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Sumba Timur urusan ketahanan pangan yaitu peningkatan ketahanan pangan daerah melalui pemetaan daerah rawan pangan, mengendalikan dan menjaga ketersediaan kebutuhan pangan serta menjaga kelancaran distribusi pangan daerah dan upaya pengendalian harga pangan. Komitmen pemerintah daerah terhadap program peningkatan ketahanan pangan tergambar dengan di keluarkannya surat edaran bupati agar masyarakat tidak mengonsumsi beras satu hari dalam seminggu atau yang lebih dikenal dengan istilah NoNaSaRi (No Nasi Satu Hari) serta komitmen pemerintah dalam rangka penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (PERDA) Tentang HILILUWANYA yang mana secara implisit dalam perda tersebut pemerintah mengajak masyarakat untuk membudidayakan dan mengonsumsi pangan lokal. Secara umum visi Kabupaten Sumba Timur telah dinyatakan secara gamblang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) tahun 2010 yaitu **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMBA TIMUR YANG SEJAHTERA, MANDIRI, ADIL, RELIGIUS DAN TERDEPAN (SMART)”**. **Sejahtera** merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang dan berkeadilan yang ditunjang oleh stabilitas keamanan dan ketertiban yang kondusif sehingga masyarakat merasa nyaman dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Mandiri tidak berarti menutup diri dari bantuan pihak lain akan tetapi dimaksudkan terciptanya kualitas sumber daya manusia Sumba Timur yang mampu melihat, berpikir, bertindak serta memanfaatkan setiap peluang dan tantangan yang ada secara bertanggungjawab dengan mengedepankan nilai-nilai etika moralitas untuk peningkatan kehidupan sosial ekonominya.

Adil artinya adanya persamaan hak dan kewajiban dari setiap masyarakat Sumba Timur baik didepan hukum maupun dalam memanfaatkan dan menikmati setiap pembangunan daerah secara berimbang, berkeadilan serta bertanggungjawab tanpa perbedaan.

Religius artinya bahwa dalam setiap tindakan pembangunan daerah selalu mengedepankan nilai sosial keagamaan sebagai suatu kekuatan yang perlu dikembangkan, dipertahankan dan ditingkatkan untuk menghadapi pengaruh negatif perubahan global, sehingga kedepan akan melahirkan pembangunan daerah yang seimbang antara pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan spritual.

Terdepan artinya dalam kurun waktu lima tahun kedepan Kabupaten Sumba Timur menjadi Kabupaten di Pulau Sumba yang terdepan dalam melakukan inovasi dalam pemerintahan, pembangunan Ekonomi, Sosial Budaya, Politik, Hukum dan HAM, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Kesetaraan Gender dan Berdaya saing.

Berbagai hal telah dilaksanakan, baik yang telah dicapai maupun yang belum dicapai pada penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat pada periode tahun 2005 – 2009, tentu akan menjadi dasar pijakan untuk pembangunan selanjutnya, upaya peningkatan terus dipelihara dan ditumbuhkembangkan untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih baik pada periode tahun 2011 – 2015.

Pemerintah kabupaten Sumba Timur bersama seluruh komponen masyarakat harus memiliki tekad dan semangat juang untuk terus berkarya dalam rangka meningkatkan, serta memperbaiki pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan upaya mengurangi jumlah rumah tangga sasaran (miskin) melalui program pembangunan yang bersinergi serta lintas sektor, lintas pelaku dan lintas sumber dana.

Dalam menjalankan misinya tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional dan nasional serta pengaruh globalisasi. Perubahan iklim dan ancaman degradasi lingkungan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, peran swasta yang terbatas dalam pembangunan daerah serta rendahnya pemahaman akan hukum dan HAM di samping itu rendahnya ruang fiskal daerah akan menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan daerah kedepan. Di samping itu pengaruh perkembangan ekonomi regional dan nasional akan menjadi tantangan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumba Timur tahun 2011 – 2015.

Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Sumba Timur tahun 2011 – 2015 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kehidupan ekonomi, sosial sudaaya masyarakat Sumba Timur agar lebih sejahtera dengan mengedepankan nilai-nilai sosial keagamaan, penegakan hukum dan HAM, kesetaraan gender, perlindungan anak serta demokratis dalam pembangunan daerah.
2. Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam arti masyarakat telah mampu berpikir dan bertindak untuk memanfaatkan setiap potensi, peluang dan tantangan. Dengan kata lain masyarakat telah memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua sumberdaya yang ada secara adil dan bertanggungjawab untuk meningkatkan taraf hidupnya.

3. Mewujudkan rasa keadilan masyarakat dalam kehidupan ekonomi sosial budaya, politik, Hukum dan HAM, Kesetaraan gender, perlindungan anak sehingga masyarakat merasa terlindungi akan hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan pembangunan secara bertanggungjawab.
4. Mewujudkan dan terpeliharanya nilai-nilai religius dalam pembangunan daerah. Dengan kata lain setiap pelaku pembangunan daerah dalam bertindak, mengedepankan nilai-nilai sosial agama yang ada dan hidup dalam masyarakat Sumba Timur.
5. Mewujudkan Kabupaten Sumba Timur sebagai kabupaten yang terdepan di pulau Sumba dalam melahirkan pemerintahan bersih yang mengedepankan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik, hukum dan HAM, keamanan dan ketertiban masyarakat, kesetaraan gender dan perlindungan anak serta berdaya saing.

b. Luasnya Lahan dan Faktor Produksi Pertanian

Luasnya lahan yang digunakan untuk melakukan usaha tani/ produksi akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari produksi itu sendiri. Data analisa situasi pangan kabupaten sumba timur tahun 2013 luas lahan yang di olah untuk tanaman padi seluas 21,339 Ha dan yang di panen sebesar 17.574 Ha dengan angka produktifitas sebesar 29,52% sedangkan untuk tanaman jagung luas lahan yang di olah sebesar 12.500 Ha dan yang di panen sebesar 12.298 Ha. Dari data hasil analisa ketersediaan luas lahan yang berhasil ditanami untuk kabupaten sumba timur tahun 2013 sebesar 39.570 Ha dan panen 34.691 ha untuk semua komoditas pangan yang di usakan oleh masyarakat/petani, dan dari tahun ke tahun lahan yang di olah selalu

menalami peningkatan luasannya ini menunjukkan bahwa lahan sangat tersedia dan setiap tahun selalu bertambah luasannya seiring dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan pangan di tengah masyarakat.

Faktor produksi juga sangat menunjang hasil yang akan diperoleh oleh masyarakat.

Faktor produksi adalah semua korbanan yang diberikan pada tanaman agar tanaman tersebut mampu tumbuh/berkembang dan menghasilkan hasil memuaskan. Faktor produksi dikenal pula dengan istilah input dan korbanan produksi. Faktor produksi memang sangat menentukan besar-kecilnya produksi yang diperoleh. Kembali ke pembahasan! Macam-macam faktor produksi dibagi menjadi empat yaitu:

1. Faktor produksi lahan

Tanah sebagai salah satu faktor produksi merupakan pabrik hasil-hasil pertanian yaitu tempat dimana produksi berjalan dan darimana hasil produksi ke luar. Faktor produksi tanah mempunyai kedudukan paling penting. Hal ini terbukti dari besarnya balas jasa yang diterima oleh tanah dibandingkan faktor-faktor produksi lainnya (Mubyarto, 1995). Potensi ekonomi lahan pertanian organik dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berperan dalam perubahan biaya dan pendapatan ekonomi lahan. Setiap lahan memiliki potensi ekonomi bervariasi (kondisi produksi dan pemasaran), karena lahan pertanian memiliki karakteristik berbeda yang disesuaikan dengan kondisi lahan tersebut. Maka faktor-faktornya bervariasi dari satu lahan ke lahan yang lain dan dari satu daerah ke daerah yang lain. Secara umum, semakin banyak perubahan dan adopsi yang diperlukan dalam lahan pertanian, semakin tinggi pula resiko ekonomi yang ditanggung untuk perubahan-perubahan tersebut. Kemampuan ekonomi suatu lahan dapat diukur dari keuntungan yang didapat oleh petani dalam bentuk pendapatannya. Dalam rangka menunjang produksi bahan pangan pemerintah kabupaten sumba timur telah dan sedang melaksanakan percontaan sawah baru setiap tahun dalam rangka

meningkatkan produksi pangan, dengan demikian pemerintah berharap ketahanan pangan akan bisa dicapai pada masa yang akan datang.

2. Faktor Modal (Sarana Produksi)

Dalam kegiatan proses produksi pertanian organik, maka modal dibedakan menjadi dua macam yaitu modal tetap dan tidak tetap. Perbedaan tersebut disebabkan karena ciri yang dimiliki oleh model tersebut. Faktor produksi seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin sering dimasukkan dalam kategori modal tetap. Dengan demikian modal tetap didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang tidak habis dalam sekali proses produk tersebut. Peristiwa ini terjadi dalam waktu yang relative pendek dan tidak berlaku untuk jangka panjang (Soekartawi, 2003). Pemerintah setiap tahunnya selalu memprogramkan penambahan modal tetap kepada masyarakat/tani dengan melakukan pembagian Hand Tractor dan pembangunan lumbung pangan hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Sebaliknya dengan modal tidak tetap atau modal variabel adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan habis dalam satu kali dalam proses produksi tersebut, misalnya biaya produksi yang dikeluarkan untuk membeli benih, pupuk, obat-obatan, atau yang dibayarkan untuk pembayaran tenaga kerja. Besar kecilnya modal dalam usaha pertanian tergantung dari :

- 1) Skala usaha, besar kecilnya skala usaha sangat menentukan besar-kecilnya modal yang dipakai makin besar skala usaha makin besar pula modal yang dipakai.
- 2) Macam komoditas, komoditas tertentu dalam proses produksi pertanian juga menentukan besar-kecilnya modal yang dipakai. (Soekartawi, 2003).

3. Faktor Tenaga Kerja

Partisipasi angkatan kerja di kabupaten sumba timur sebesar 67,34% dengan angkatan kerja sebesar 71,35 %, ini menunjukkan bahwa faktor tenaga kerja sebenarnya sangat tersedia

Faktor produksi tenaga kerja, merupakan faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang cukup bukan saja dilihat dari tersedianya tenaga kerja tetapi juga kualitas dan macam tenaga kerja perlu pula diperhatikan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada faktor produksi tenagakerja adalah :

- 1) Tersedianya tenaga kerja Setiap proses produksi diperlukan tenaga kerja yang cukup memadai. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan perlu disesuaikan dengan kebutuhan sampai tingkat tertentu sehingga jumlahnya optimal. Jumlah tenagakerja yang diperlukan ini memang masih banyak dipengaruhi dan dikaitkan dengan kualitas tenagakerja, jenis kelamin, musim dan upah tenagakerja.
- 2) Kualitas tenaga kerja Dalam proses produksi, apakah itu proses produksi barang-barang pertanian atau bukan, selalu diperlukan spesialisasi. Persediaan tenagakerja spesialisasi ini diperlukan sejumlah tenaga kerja yang mempunyai spesialisasi pekerjaan tertentu, dan ini tersedianya adalah dalam jumlah yang terbatas.
- 3) Kualitas tenaga kerja juga dipengaruhi oleh jenis kelamin, apalagi dalam proses produksi pertanian. Tenaga kerja pria mempunyai spesialisasi dalam bidang pekerjaan tertentu seperti mengolah tanah, dan tenaga kerjawanita mengerjakan tanam.
- 4) Tenaga kerja musiman Pertanian ditentukan oleh musim, maka terjadilah penyediaan tenaga kerja musiman dan pengangguran tenaga kerja musiman.

4. Faktor Menejemen

Manajemen terdiri dari merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan serta mengevaluasi suatu proses produksi. Karena proses produksi ini melibatkan sejumlah orang (tenaga kerja) dari berbagai tingkatan, maka manajemen berarti pula bagaimana mengelola orang-orang tersebut dalam tingkatan atau dalam tahapan proses produksi (Soekartawi, 2003).

c. Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Secara Berkala

Sosialisasi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan beragam bergizi seimbang dan aman melalui pendidikan formal dan informal, keterampilan mengelola pangan dan konsumsi dengan gizi seimbang, sanitasi dan keamanan pangan, serta pengelolaan sumberdaya keluarga untuk meningkatkan gizi. Hal ini diwujudkan melalui program-program tahunan antara lain terdapat beberapa kegiatan yaitu; Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplay Pangan; Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Lokal, Pengembangan Lumbung Pangan Desa, Kegiatan Lomba Cipta Menu Produk Lokal Non Beras dan non Terigu, Penyuluhan Sumber Pangan alternatif, dan Kegiatan Pengembangan Peningkatan Ketahanan Pangan, serta Kegiatan Sistem Insentif dan Disentif bagi Petani/Kelompok Tani.

d. Adanya Sumber Dana Setiap Tahun

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama seluruh komponen masyarakat harus memiliki tekad dan semangat juang untuk terus berkarya untuk meningkatkan serta memperbaiki pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan upaya mengurangi jumlah rumah tangga sasaran (Miskin) melalui program pembangunan



yang bersinergi serta lintas sektor dan lintas pelaku dan lintas sumber dana

Sektor pertanian merupakan sektor yang paling utama dalam menunjang PDRB kabupaten sumba timur, ini terlihat dari sumbangan sektor pertanian sebesar Rp. 2.101.830.000,- dengan pertumbuhan sebesar 5,03% sehingga secara keseluruhan sektor pertanian sumbangsuhnya terhadap PDRP 33,50% dan kemudian diikutioleh sektor lainnya. Dalam segi pendanaan pembangunan di sumba timur, sektor pertanian mendapatkan prosentase sebesar 15% dibawah sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Pemerintah kabupaten sumba timur setiap tahunnya menyediakan anggaran untuk melaksanakan program di sektor pertanian yang dilaksanakan oleh sembilan sektor kemakmuran/pertanian. Dana yang cukup besar ini hendaknya bisa dijadikan dorongan untuk lebih cepat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.

e. Terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah

Kelembagaan ketahanan pangan adalah institusi pemerintah yang menangani ketahanan pangan baik yang berkaitan dengan subsistem ketersediaan, distribusi, konsumsi dan status gizi. Lembaga struktural ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur adalah adalah Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur. Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2008, Struktur Organisasi Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat Badan, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Bidang Distribusi dan Harga, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, 3 (tiga) Sub Bagian, 6 (enam) Sub Bidang.



Sehingga jumlah jabatan struktural 14 jabatan, terdiri dari Eselon II/b 1 jabatan, Eselon III/a 1 jabatan, Eselon III/b 3 jabatan dan Eselon IV/a 9 jabatan.

Tugas pokok Badan Bimas dan Ketahanan Pangan adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan, distribusi dan penganekaragaman konsumsi pangan, dan perumusan kebijakan pengadaan, pengelolaan, distribusi dan konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat.

Upaya peningkatan ketahanan pangan terus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur, seiring dengan pembangunan sektor pertanian. Hal ini mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional.

Untuk mendapatkan gambaran situasi pangan di Kabupaten Sumba Timur, maka Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur, melakukan Analisa Situasi Pangan sebagai bahan masukan kepada Bupati Sumba Timur, dalam rangka pengambilan kebijakan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Sumba Timur

Sesuai amanat UU No. 7/1996 bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau bagi penduduk diseluruh wilayah setiap saat.

Untuk menindaklanjuti Undang–Undang No. 7/1996 dan untuk mengetahui kondisi pangan masyarakat, maka yang menjadi bahan/data analisa, dibuat berdasarkan data laporan dari kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) dan Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) / Mantri Tani se– Kabupaten Sumba Timur; sedangkan data pendukung lainnya berasal dari Dinas – dinas kemakmuran yang ada kaitannya dengan ketahanan pangan.



Faktor Kelemahan (*Weakness*)

Faktor kelemahan dari faktor strategik internal yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur sesuai tabel 4.5 di atas memiliki total skor sebesar 0,734 dengan 28% dari total faktor kelemahan merupakan faktor daya beli masyarakat rendah yaitu dengan skor 0,205 dan merupakan faktor kelemahan utama, disusul dengan faktor kelemahan berpengaruh kedua dengan skor 0,167 yaitu faktor kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal dengan presentase sebesar 23%. Faktor kelemahan berpengaruh ketiga adalah pola konsumsi masyarakat yang belum beragam, bergisi seimbang dan aman dengan presentase sebesar 20% yaitu dengan skor 0,148. Faktor berikutnya dengan perolehan skor sebesar 0,121 adalah faktor belum optimalnya peran dewan ketahanan pangan dengan presentase 16% menjadikan faktor kelemahan yang berpengaruh ke empat. Sementara itu faktor terbatasnya sumber daya manusia dibandingkan beban tugas yang dilaksanakan merupakan faktor ke lima yang berpengaruh dengan skor sebesar 0,093 dan presentase 13% dari total faktor kelemahan yang ada.

a. Daya Beli Masyarakat Rendah

Sesuai dengan persoalan utama yang dihadapi kabupaten sumba timur, maka pemerintah bertekad untuk melanjutkan proses percepatan pembangunan ekonomi setiap tahunnya. Seperti yang kita ketahui bahwa angka kemiskinan di kabupaten sumba timur masih digolongkan pada posisi yang tinggi, pada tahun 2011 sebesar 30,63% = 71.500 orang, dan menurun pada tahun 2012 menjadi 28,58% dan tahun 2013 berada pada 20,41%. Dari kaadaan ini kita dapat melihat bahwa sebanyak 47.488 orang masyarakat sumba timur yang masih berada dalam belenggu kemiskinan. Kalau kita cermati lebih dalam lagi Pengeluaran Perkapita masyarakat miskin hanya sebesar Rp.454.792,- dengan rincian Rp.268.990 dihabiskan untuk belanja makanan 59,15%,



dan 40,85% atau sekitar Rp.185.802 untuk bukan makanan keperluan lainnya. Dengan kondisi seperti ini tergambar jelas daya beli dari masyarakat yang sebagian besar adalah petani begitu rendahnya. Hal inilah yang menyebabkan kerawanan dan kerentanan pangan sering terjadi di kabupaten sumba timur.

Secara historis, pola konsumsi pangan masyarakat akan terbentuk sesuai dengan daya beli masyarakat setempat. Daya beli masyarakat lokal yang kuat merupakan prasyarat untuk mewujudkan tingkat konsumsi pangan yang baik yang pada akhirnya akan mewujudkan ketahanan pangan yang baik pula. Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BBKP membutuhkan partner atau relasi untuk mendukung keberhasilan program-programnya. Contoh kecil saja yaitu yang berkaitan dengan berbagai macam program penganekaragaman pangan untuk Pola Pangan Harapan maksimal seperti kegiatan Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten dalam rangka menggali potensi sumber daya lokal yang diselaraskan dengan struktur budaya lokal untuk mengangkat citra makanan yang mencirikan spesifik lokal masing-masing wilayah, kegiatan Kampanye Pangan Beragam, Bergizi seimbang dan Aman (B2SA) dalam rangka mensosialisasikan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di 33 Kel/Desa dengan cara memperkenalkan tanaman sumber karbohidrat jangka panjang (sukun) dan jangka pendek (ganyong, larut, talas, ketela pohon), kegiatan Kebun Percontohan Penganekaragaman Pangan berupa pengembangan tanaman sukun, ganyong, garut, ubi kayu, talas dan sayuran dan dilaksanakan di 9 Desa yang dikelola oleh Kelompok Wanita Desa. Kegiatan-kegiatan di atas tentu membutuhkan lembaga-lembaga pendukung seperti PKK, Dasa Wisma, Posyandu, kelompok tani, serta kelompok usaha pangan olahan lokal. Namun

lembaga-lembaga tersebut diakui masih belum berpartisipasi aktif dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

Lewat program peningkatan ekonomi rumah tangga pemerintah berupaya dengan keras meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui percepatan laju pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi ini diharapkan mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka. Kombinasi antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan berbagai kebijakan intervensi pemerintah yang terarah diharapkan dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan (RTS), meningkatnya pendapatan perkapita penduduk. Untuk memenuhi sasaran percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah akan terus melanjutkan kebijakan pembangunan pada sektor-sektor yang bersentuhan dengan masyarakat miskin/masyarakat pedesaan.

b. Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur membutuhkan partner atau relasi untuk mendukung keberhasilan program-programnya. Contoh kecil saja yaitu yang berkaitan dengan berbagai macam program penganekaragaman pangan untuk Pola Pangan Harapan maksimal seperti kegiatan Lomba Cipta Menu Tingkat Kabupaten dalam rangka menggali potensi sumber daya lokal yang diselaraskan dengan struktur budaya lokal untuk mengangkat citra makanan yang mencirikan spesifik lokal masing-masing daerah, kegiatan Kampanye Panganku Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (B2SA) dalam rangka mensosialisasikan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di 22 kecamatan 11 Desa/kelurahan sekabupaten sumba timur dengan cara memperkenalkan tanaman sumber karbohidrat jangka panjang (sukun) dan jangka pendek (ganyong, larut, talas, ketela pohon), kegiatan Kebun Percontohan Penganekaragaman Pangan berupa



pengembangan tanaman sukun, ganyong, garut, ubi kayu, talas dan sayuran dan dilaksanakan di 9 Desa yang dikelola oleh Kelompok Wanita Desa. Kegiatan-kegiatan di atas tentu membutuhkan lembaga-lembaga pendukung seperti PKK, Dasa Wisma, Posyandu, kelompok tani, serta kelompok usaha pangan olahan lokal. Namun lembaga-lembaga tersebut diakui masih belum berpartisipasi aktif dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur

c. Pola Konsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA

Pola konsumsi pangan di Kabupaten Sumba Timur dapat dilihat dari potret konsumsi pangan di Kabupaten Sumba Timur yang tersurat pada Laporan Analisa Pola Konsumsi masyarakat Sumba Timur sampai dengan tahun 2013, yang menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat masih mengkonsumsi makanan dengan menggunakan satu jenis bahan pangan, yaitu beras, padahal masih banyak jenis bahan pangan lain yang tidak kalah kandungan gizi/kalorinya. Padahal tanaman lain dengan kalori tinggi selain beras, seperti sukun, talas, ganyong, garut, ketela rambat, ketela pohon, dan sebagainya banyak tumbuh di Kabupaten Sumba Timur, namun karena kurang diminati sehingga tanaman-tanaman tersebut tidak begitu berkembang. Hal ini diperkuat dengan angka pola konsumsi masyarakat Kabupaten Sumba Timur yang masih rendah, yaitu dengan skor PPH sebesar 77,4 dari skor maksimal 100 pada kondisi sampai dengan 2014.

d. Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan

Berbagai peraturan dan perundang-undangan yang ditetapkan, juga telah mengarahkan dan mendorong pemantapan ketahanan pangan melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan, Peraturan pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dan diwujudkan melalui kesepakatan Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan pangan (DKP) Propinsi dan Bupati /Walikota selaku Ketua



DKP Kabupaten/Kota dalam Konferensi dan Sidang Regional DKP pada bulan Nopember 2008, menyatakan bahwa pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan pertanggungjawaban urusan ketahanan pangan. Suhubungan dengan hal tersebut, maka Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur mempunyai fungsi koordinasi dalam menangani Ketersediaan bahan pangan untuk konsumsi dijalankan bersama dengan instansi teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan di tingkat lapangan baik itu secara fisik maupun non fisik melalui penyampaian laporan bulanan secara rutin mengenai ketersediaan pangan, serta pelaksanaan koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Dewan Ketahanan Pangan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai lembaga koordinasi ketahanan pangan. Tugas Dewan Ketahanan Pangan secara rinci yaitu merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketaanan Pangan Pusat dan Provinsi; merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dan penyelenggaraan ketahanan pangan; melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi perwujudan ketahanan pangan; mengadakan rapat koordinasi dan atau evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan tembusan Dewan ketahanan angan Pusat secara berkala selama 6 (enam) bulan sekali. Meskipun di Kabupaten Sumba Timur telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan, namun keberadaan Dewan Ketahanan Pangan masih belum terasa dampak implementasinya. Beberapa informan menyatakan bahwa terbentuknya Dewan Ketahanan Pangan masih belum dilaksanakan secara optimal, hal ini tentu akan mempengaruhi keberhasilan



pembangunan ketahanan pangan yang sangat erat kaitannya dengan koordinasi dan sinkronisasi program-program sektoral bidang ketahanan pangan di lingkungan PEMDA Kabupaten Sumba Timur.

e. Terbatas SDM Dibanding Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan

SDM dengan kinerja yang baik akan sangat mempengaruhi keberhasilan misi dan visi suatu lembaga. Manfaat memiliki SDM yang baik adalah agar pegawai dapat melakukan tugas pokok dan fungsinya secara efisien, serta stabil sehingga lebih efisien. Begitu juga terhadap lembaga pemerintahan yang ada di kabupaten Sumba Timur, SDM yang berkompeten tentu sangat mempengaruhi program peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur. Beberapa informan menyatakan bahwa SDM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur itu lemah. Kelemahan SDM ini akan menjadi faktor penentu ketidakstabilan dalam usaha peningkatan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Sumba Timur dengan berbagai macam alokasi kegiatan pendukung peningkatan ketahanan pangan. Sebagai pembandingan dapat kita telaah pada saat melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan sektor kemakmuran (Musrenbangtan) sektoral di bidang ketahanan pangan yang sangat penting manfaatnya dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di kabupaten sumba timur. Pada kenyataannya bahwa kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara maksimal, dan terkesan hanya dilakukan secara seremonial saja karena pada saat penyusunan perencanaan dimaksud Dewan Ketahanan Pangan ataupun pimpinan SKPD tidak terlibat dengan aktif sehingga keluaran dari kegiatan tersebut kurang maksimal dalam rangka peningkatan ketahanan pangan.

4.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dilaksanakan untuk mengkaji berbagai faktor eksternal yang berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar wewenang Kabupaten Sumba Timur dan dapat mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur. Faktor eksternal diperoleh dari hasil wawancara dan pengisian kuesioner, terdiri dari peluang yang dapat mendorong peningkatan ketahanan pangan serta ancaman, yaitu kondisi eksternal yang dapat menghambat dan harus diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

Hasil analisis faktor eksternal menunjukkan bahwa faktor peluang mendapat total skor dari empat faktor yang dimiliki yaitu sebesar 1,192 sedangkan faktor ancaman memperoleh total skor sebesar 1,293. Secara lengkap hasil analisis faktor strategik eksternal disajikan pada tabel 4.6.

Tabel 4.2 Bobot dan Peringkat Faktor Strategik Eksternal

Faktor Strategik Eksternal	Bobot	Peringkat	Skor
Peluang			
posisi Kabupaten Sumba Timur yang strategis	0,121	3,1	0,374
perkembangan teknologi pengolahan pangan lokal	0,145	2,0	0,290
keberadaan jalan negara dan jalan provinsi	0,102	2,7	0,274
adanya dasar hukum dan kebijakan tentang peningkatan ketahanan pangan di Indonesia	0,134	1,9	0,255
Jumlah Peluang	0,501		1,192
Ancaman			
harga komoditas pangan strategis fluktuatif	0,157	2,3	0,362
regulasi pangan masih belum terpadu	0,123	2,8	0,345
perubahan iklim	0,128	2,6	0,332
perubahan situasi politik daerah	0,091	2,8	0,254
Jumlah Ancaman	0,499		1,293
Jumlah Peluang dan Ancaman	1,000		2,485

Sumber: Hasil penelitian yang diolah

Tabel di atas menunjukkan skor yang di dapat dari semua faktor strategik eksternal dengan empat faktor yang merupakan peluang dan empat faktor

ancaman. Faktor posisi Kabupaten Sumba Timur dari faktor peluang memberikan pengaruh paling besar yaitu 31% dari keseluruhan faktor peluang dengan skor sebesar 0,374. Faktor berpengaruh kedua adalah perkembangan teknologi pengolahan pangan lokal dengan skor 0,290 dan presentase 24%. Faktor selanjutnya, yaitu faktor ketiga keberadaan jalan negara dan jalan provinsi dengan presentase sebesar 23% dan skor 0,274. Faktor peluang terakhir yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur adalah faktor adanya dasar hukum dan kebijakan tentang peningkatan ketahanan pangan di Indonesia dengan skor 0,255.

a. Posisi Kabupaten Sumba Timur Yang Strategis

Kabupaten Sumba Timur berada dalam posisi yang strategis dengan pelabuhan laudnya yang diakses oleh empat kabupaten yang berada di pulau sumba. Letak geografis tersebut sangat berpotensi menjadi simpul perdagangan regional. Sebab akses yang mudah, dimasa yang akan datang daerah ini diproyeksikan akan sangat berpeluang memainkan peranan penting sebagai daerah yang berfungsi untuk percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah dan diharapkan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan aksesibilitas penduduk terhadap pangan. Dengan demikian ke depan dengan posisi yang sangat strategis tersebut

b. Perkembangan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal

Perkembangan teknologi pangan yang meliputi perekayasaan atau inovasi terhadap teknologi atau kearifan lokal di bidang pangan dengan tujuan meningkatkan kualitas fisik maupun kandungan gizi, daya simpan, dan daya saing komoditas pangan. Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat bersama dengan kelompok masyarakat untuk mengembangkan teknologi tersebut di Kabupaten Sumba Timur. Input teknologi dapat menjadikan pangan lokal memiliki keunggulan kompetitif dan menjadi pilihan

pangan unggulan bagi masyarakat Kabupaten Sumba Timur.

c. Keberadaan Jalan Negara Dan Jalan Provinsi

Akses jalan baik jalan nasional maupun jalan propinsi di sekitar Kabupaten Sumba Timur merupakan peluang untuk akses pertukaran pangan dari dan ke dalam Kabupaten sumba timur. Dari tahun ke tahun panjang dan luas jalan terus mengalami peningkatan. Di kabupaten sumba timur panjang jalan nasional 70 km, jalan propinsi 408 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 1.101 km. Dengan semakin mudahnya arus transportasi antar kabupaten dan propinsi diharapkan akan membuka peluang yang besar bagi kabupaten sumba timur dalam meningkatkan ketahanan pangannya.

d. Adanya Dasar Hukum Dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan Di Indonesia

Landasan hukum pelaksanaan percepatan penganekaragaman pangan antara lain terdapat pada UU No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan Bab VII Pasal 46, PP Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dimana disebutkan bahwa penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan yang memperhatikan sumberdaya, kelembagaan, dan budaya lokal. Selain itu, Peraturan Presiden No 22 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2009 memuat tentang kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Hal ini dapat dijadikan sebagai pijakan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati.

Faktor Ancaman (*Threats*)

Faktor ancaman dari faktor strategik eksternal yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur memiliki total skor sebesar 1,293 dengan faktor ancaman terbesar sebesar 0,362 adalah faktor harga komoditas pangan strategis fluktuatif, disusul dengan faktor kelemahan berpengaruh kedua dengan skor 0,345 yaitu faktor belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan. Faktor kelemahan berpengaruh ketiga adalah perubahan iklim dengan skor 0,332 dan faktor perubahan situasi politik daerah merupakan faktor terakhir yang berpengaruh dengan skor sebesar 0,254.

a. Harga Komoditas Pangan Strategis Fluktuatif

Bila kita analisa secara lebih mendalam maka komoditas beras mengalami fluktuasi harga yang cenderung meningkat setiap tahun, bahkan lebih dari 15%, dimana menurut Kementrian Perdagangan (2008), pada kondisi tersebut harus ada tindakan serius untuk menanganinya, Pada komoditas daging ayam, fluktuasi harga cenderung meningkat dari tahun 2009-2013, Selain itu komoditas cabe merah dan bawang merah juga memiliki fluktuasi harga di atas ambang batas aman yaitu 25%, dan kondisi terkini juga dialami komoditas bawang putih yang melonjak dengan kenaikan harga. Harga yang tidak stabil akan berpengaruh pada kemudahan akses pangan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin. Selain itu, instabilitas harga juga berpengaruh terhadap pasokan di pasar. Berdasarkan data analisa harga pasar yang dilakukan secara berkala oleh Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur, lonjakan harga sering terjadi menjelang perayaan hari-hari besar keagamaan dan pada saat musim paceklik. Pada saat inilah peran dari pemerintah sangat diharapkan dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok tersebut.

b. Belum Terintegrasinya Kebijakan Ketahanan Pangan

Pemerintah pusat di satu sisi hukumnya wajib untuk melindungi sektor pertanian, pangan, jasa dan industri dalam negeri namun di sisi lain pemerintah tetap membuka keran impor produk pangan luar negeri. Hal ini menyebabkan produk pertanian dalam negeri tidak bisa bersaing dan merugikan kesejahteraan petani. Pangan lokal pun menjadi kurang diminati masyarakat karena kalah bersaing baik kualitas maupun harga dengan pangan impor. Oleh karena itu perlu dipikirkan suatu terobosan besar kalau memang pemerintah serius untuk meningkatkan kesejahteraan petani sehingga akan berdampak pada peningkatan ketahanan pangan dari masyarakat itu sendiri.

c. Perubahan Iklim

Perubahan iklim yang terjadi ini akan berpengaruh terhadap penyediaan bahan pangan karena mempengaruhi pola tanam dan panen. Jika terjadi kegagalan panen di wilayah produsen pangan, maka pasokan pangan ke daerah konsumen juga akan terancam. Kekeringan panjang sering sekali dialami oleh kabupaten sumba timur sehingga berdampak pada gagal panen sehinggamenimbulkan rawan pangan. Alam tidak bisa dilawan tetapi pemerintah diberi tanggung jawab untuk mensiasati alam agar ketahanan pangan masyarakat dapat terus terjaga dan meningkat.

d. Perubahan Situasi Politik Daerah

Adanya kebijakan otonomi daerah menjadi ancaman terhadap pembangunan ketahanan pangan wilayah. Pergantian pimpinan daerah dan percaturan politik masing-masing partai yang berkompetisi menjadi pemicu perubahan kebijakan yang telah dijalankan oleh pimpinan sebelumnya termasuk kebijakan pembangunan ketahanan pangan. Akibatnya, implementasi kebijakan ketahanan pangan tidak bisa optimal.

4.4.3. Kuadran SWOT

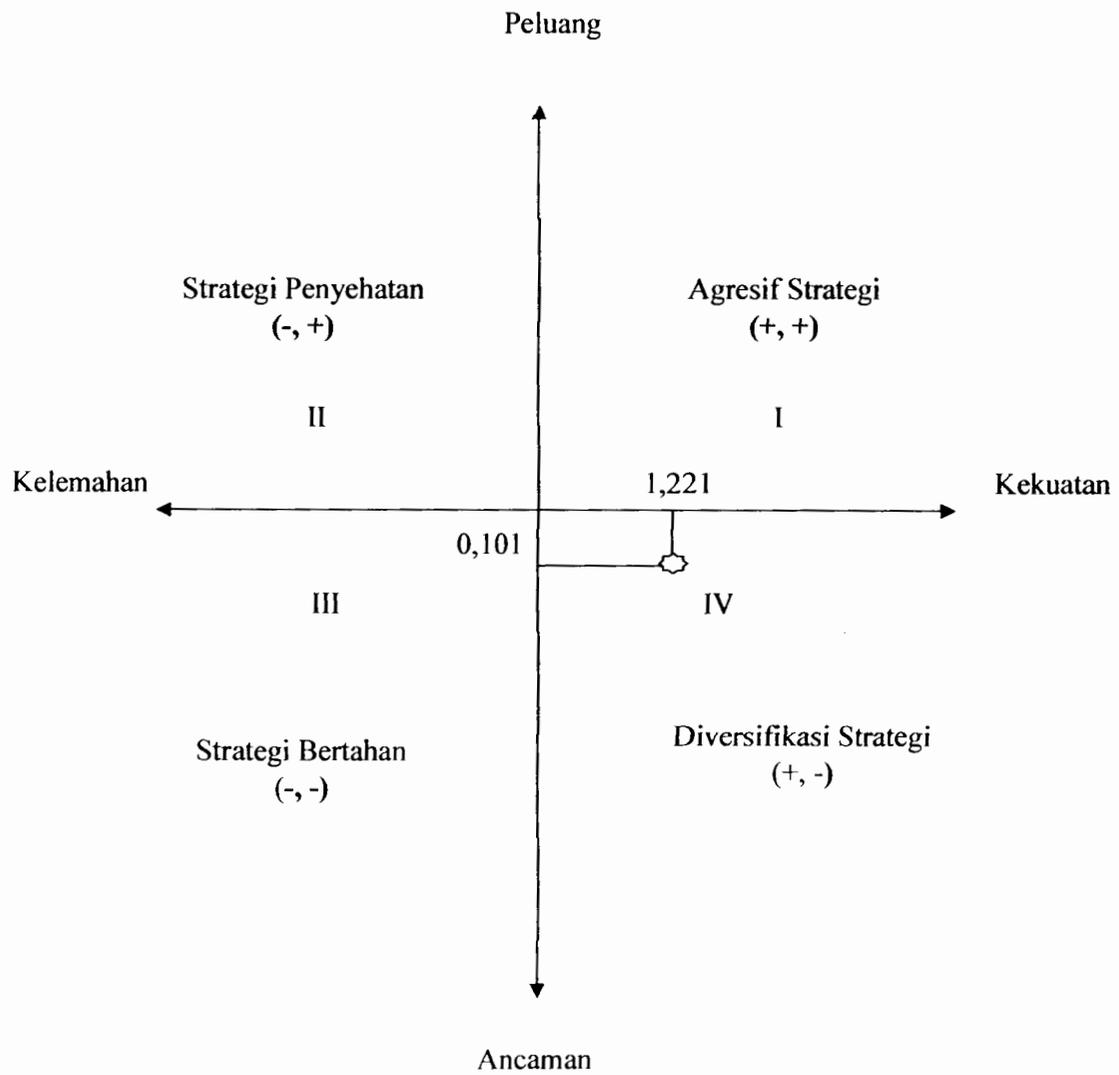
Setelah skor masing-masing faktor telah diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan pengurangan antara total skor faktor kekuatan dengan faktor kelemahan yang selanjutnya sebagai nilai titik x, serta total skor faktor peluang dengan ancaman yang selanjutnya menjadi titik y.

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa total skor dari faktor kekuatan adalah sebesar 1.955 sedangkan dari faktor kelemahan adalah sebesar 0,734. Untuk mencari nilai/ titik x maka total skor faktor kekuatan (1,955) dikurangi dengan total skor faktor kelemahan (0,734) dan nilai setelah pengurangan tersebut adalah sebesar 1,221 yang selanjutnya disebut nilai x.

Sedangkan pada tabel 4.6 diketahui bahwa skor sebesar 1,192 merupakan total skor faktor peluang, dan sebesar 1,293 merupakan total skor faktor ancaman.

Sehingga dapat ditentukan nilai/ titik y dari pengurangan antara total skor faktor peluang (1,192) dengan total skor faktor ancaman (1,293) adalah senilai -0,101.

Setelah diketahui dua titik yaitu x dan y, maka kedua titik tersebut akan dipertemukan dalam satu koordinat yang di sajikan pada gambar 4.1 pada halaman 187.



Gambar 4.1 Hasil Koordinat SWOT
 Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumba Timur
Sumber: Hasil penelitian yang diolah

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa nilai/ titik pertemuan antara x dan y berada pada kuadran IV. Rekomendasi strategi pada posisi ini adalah diversifikasi strategi, yaitu posisi yang sudah bagus namun masih menghadapi beberapa ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Ancaman yang paling membahayakan adalah harga komoditas pangan strategi masih fluktuatif.

4.4.4. Alternatif Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumba Timur

Berdasarkan analisis faktor internal dan eksternal dengan IFE dan EFE matriks, tahap berikutnya adalah menyusun faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT.

Melalui analisis SWOT dapat disusun empat sel alternatif strategi, yaitu Strategi *Strengths-Opportunities* (SO), yaitu memanfaatkan kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang, strategi *Weaknesses-Opportunities*(WO), yaitu meminimumkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang, strategi *Strengths-Threats*(ST), yaitu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan strategi *Weaknesses-Threats* (WT) yaitu meminimumkan kelemahan dan menghindari ancaman. Alternatif strategi matriks SWOT disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel.4.3 Alternatif Strategi dengan menggunakan matriks SWOT

<p style="text-align: center;">SW INTERNAL</p> <p style="text-align: center;">OT EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">STRENGTHS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap ketahanan pangan. 2. Terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah. 3. Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian 4. Adanya sumber pendaan setiap tahunnya 5. Adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal 	<p style="text-align: center;">WEAKNESS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal. 2. Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam. 3. SDM dilingkungan pegawai pemerintahan 4. Belum Optimalnya Fungsi Dewan Ketahanan Pangan. 5.Daya beli masyarakat rendah
<p style="text-align: center;">OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posisi Kabupaten Sumba Timur yang strategis. 2. Adanya dasar hukum dan kebijakan tentang peningkatan ketahanan pangan di Indonesia. 3. Keberadaan jalan negara dan jalan provinsi. 4. Perkembangan teknologi pengolahan pangan lokal. 	<p style="text-align: center;">S – O STRATEGIES</p> <p>Lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, didukung dengan pihak pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam membuat kebijakan terkait upaya peningkatan ketahanan pangan daerah. Pada umumnya serta usaha pengembangan kelompok pengolahan pangan lokal pada khususnya melalui sosialisasi kepada masyarakat luas.</p>	<p style="text-align: center;">W – O STRATEGIES</p> <p>Peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan pemerintah dalam mendukung aplikasi teknologi pengolahan pangan lokal serta usaha pengoptimalan fungsi Dewan Ketahanan Pangan yang berdasarkan atas dasar hukum tentang peningkatan ketahanan pangan di sumba timur.</p>

THREATS	S – T STRATEGIES	W – T STRATEGIES
1. Belum terintegrasinya kebijakan pangan 2. Perubahan situasi politik. 3. Perubahan iklim. 4. Harga komoditas pangan strategis fluktuatif.	Membuat kebijakan pangan yang terpadu dengan pemerintah daerah sebagai peran utama dalam upaya pengendalian harga bahan pokok serta kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi ketidakstabilan ketiga sub sistem ketahanan pangan, yaitu sub sistem distribusi pangan, ketersediaan, konsumsi dan keamanan pangan.	Semakin merangkul organisasi pendukung sosialisasi teknologi pengembangan pangan lokal seperti Gapoktan, PKK dan organisasi lain yang dapat dekat dan menyentuh masyarakat dalam membentuk kesadaran pribadi masyarakat untuk peningkatan ketahanan pangan

Berdasarkan matriks SWOT diperoleh beberapa alternatif strategi yang dapat direkomendasikan dalam rangka penganeekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten

Sumba Timur, yaitu:

- a) Optimalisasi fungsi Dewan Ketahanan Pangan,
- b) Penguatan SDM aparatur daerah,
- c) Menjamin pasokan pangan,
- d) Pengembangan kelompok pengolah pangan lokal,
- e) Gerakan masyarakat menuju Pangan B2SA berbasis pangan lokal, dan
- f) Integrasi SPM ketahanan pangan ke dalam RPJMD/ Renstra SKPD.

4.4.1 Strategi S-O

Strategi S-O atau strategi kekuatan-peluang adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi tersebut menghasilkan dua alternatif strategi, yaitu Meningkatkan peran dan fungsi Badan Bimas dan Ketahanan Pangan dalam usaha Pengembangan kelompok pengolah pangan lokal. Salah satu upaya dalam peningkatan ketahanan pangan adalah melalui pengembangan pangan lokal. Hal ini dikarenakan pangan lokal merupakan pangan yang sudah dikenal, mudah diperoleh di suatu wilayah, jenisnya beragam dan dapat diusahakan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk dijual. Saat ini, kelompok pengolah pangan lokal masih belum berkembang dengan baik di Kabupaten Sumba Timur. Pengembangan kelompok pengolah pangan lokal dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan gengsi olahan pangan lokal di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat terdorong untuk mengonsumsi makanan beraneka ragam di tingkat rumah tangga sekaligus untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Upaya pemberdayaan kelompok yang dapat dilakukan adalah memfasilitasi pengembangan industri pangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Hal ini difokuskan pada UKM yang memiliki karakteristik

- a) berbasis sumberdaya lokal sehingga dapat memanfaatkan potensi secara maksimal dan memperkuat kemandirian;
- b) dimiliki dan dilaksanakan oleh masyarakat lokal;
- c) menerapkan teknologi lokal sehingga dapat dikembangkan oleh masyarakat lokal;
- d) tersebar dalam jumlah yang banyak sehingga merupakan alat pemerataan yang efektif.

4.4.2 Strategi W-O

Strategi W-O atau strategi kelemahan-peluang adalah strategi yang meminimalkan kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Strategi tersebut menghasilkan dua alternatif strategi, yaitu Penguatan SDM aparatur daerah dalam upaya mengoptimalkan Dewan Ketahanan Pangan. Sumber daya manusia yang memadai sangat penting bagi pembangunan ketahanan pangan, khususnya peningkatan ketahanan pangan Kabupaten Sumba Timur.

Aparatur daerah terutama para pemegang otoritas kebijakan di daerah harus memiliki kompetensi dan latar belakang pekerjaan dan pengetahuan terkait ketahanan pangan.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan program kerja pemerintah daerah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Tugas pokok Badan Bimas dan Ketahanan Pangan adalah melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan, distribusi dan penganekaragaman konsumsi pangan, dan perumusan kebijakan pengadaan, pengelolaan, distribusi dan konsumsi pangan serta pengembangan kelembagaan ketahanan pangan masyarakat.

Untuk mewujudkan tugas pokok, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang mencakup Aspek Penataan Administrasi dan Keuangan, Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Aspek Distribusi dan Harga dan Aspek Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Upaya peningkatan ketahanan pangan terus dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Sumba Timur, seiring dengan pembangunan sektor pertanian. Hal ini mutlak diperlukan karena terkait erat dengan ketahanan sosial, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan keamanan atau ketahanan nasional.

Untuk mendapatkan gambaran situasi pangan di Kabupaten Sumba Timur, maka Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur, melakukan Analisa Situasi Pangan sebagai bahan masukan kepada Bupati Sumba Timur, dalam rangka pengambilan kebijakan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat Sumba Timur

Sesuai amanat UU No. 7/1996 bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau bagi penduduk diseluruh wilayah setiap saat.

Untuk menindaklanjuti Undang–Undang No. 7/1996 dan untuk mengetahui kondisi pangan masyarakat, maka yang menjadi bahan/data analisa, dibuat berdasarkan data laporan dari kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan) dan Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) / Mantri Tani se–Kabupaten Sumba Timur; sedangkan data pendukung lainnya berasal dari Dinas – dinas kemakmuran yang ada kaitannya dengan ketahanan pangan.

Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan Peraturan daerah (PERDA) tersebut di atas adalah:

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik

2. Perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain dari itu, pengoptimalan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) di Kabupaten Sumba Timur dengan beberapa alternatif, salah satunya adalah merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan DKP pusat dan provinsi, merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan, melaksanakan pemantauan, pengendalian, pengawasan serta evaluasi perwujudan ketahanan pangan, mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun.

Mendorong tumbuhnya industri olahan pangan berbasis sumber daya lokal dengan memanfaatkan perkembangan teknologi pengolahan pangan sehingga mengarah pada pola konsumsi masyarakat yang beragam baik itu macam dan kandungan gizinya untuk menekan angka penderita gizi buruk. Jika roda perekonomian dari industri olahan pangan lokal sudah bergerak dengan baik, maka diharapkan kedepan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi terlebih lagi dengan posisi geografis Kabupaten Sumba Timur yang strategis, akan lebih mudah memasarkan hasil produksinya ke wilayah atau Kabupaten tetangga bahkan luar provinsi.

Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Timur telah berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui kegiatan pengembangan desa mandiri pangan yang merupakan program pusat yang pendanaannya melalui dana

Tugas Pembantuan (TP) dari APBN dan *Sharing* dana APBD Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk pemberdayaan kelembagaan perekonomian pedesaan dengan pemberian modal usaha kelompok guna pengembangan usaha produktif serta penanganan daerah rawan pangan dengan bantuan sosial yang bersifat hibah bergulir.

Program ini dimulai sejak tahun 2010 yang dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut dengan tahapan yaitu persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian.

Pada kegiatan ini beberapa kelompok afinitas mendapatkan penguatan modal usaha kelompok (PMUK) dengan beberapa bidang usaha antara lain usaha peternakan, pertanian, pengadaan sembako, dan usaha simpan pinjam. Pengawasan kegiatan ini harus lebih ditingkatkan agar perputaran modal cepat dan hasilnya dapat dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat.

4.4.3 Strategi S-T

Strategi S-T atau strategi kekuatan-ancaman adalah strategi yang menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Strategi yang dapat digunakan oleh Kabupaten Sumba Timur, yaitu Gerakan Masyarakat Menuju pola pangan beragam, bergizi Seimbang dan Aman berbasis pangan lokal. Gerakan ini dilakukan pada seluruh elemen masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok agama, pemerintahan, dan swasta untuk memberikan pengetahuan mengenai konsumsi makanan beragam bergizi seimbang dan aman berbasis pangan lokal.

Sebagai contoh, pada lingkup kelompok penggerak aktivitas kemasyarakatan seperti PKK, Dasa Wisma, Posyandu, Kelompok Wanita Tani, dan lain-lain dapat dilakukan upaya peningkatan pengetahuan mengenai konsep beragam, bergizi seimbang dan aman agar dapat disampaikan kepada masyarakat luas. Selain itu, dapat dilakukan upaya pemanfaatan lahan pekarangan secara berkelompok untuk ditanami tanaman

pangan (umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, ternak unggas atau ikan) untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi bagi keluarga.

Pada lingkungan sekolah, dapat dilakukan upaya integrasi pendidikan Pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman secara formal yaitu dalam kurikulum SD/MI maupun non formal yaitu dalam kurikulum muatan lokal maupun sosialisasi. Pada lingkungan pemerintahan, agar segera mengimplementasikan PERDA Hililuwanya dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Keterlibatan media masa juga sangat penting untuk menyebarkan gerakan ini ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat menuju peningkatan ketahanan pangan dapat dicapai.

4.4.4 Strategi W-T

Strategi W-T atau strategi kelemahan-ancaman adalah strategi yang meminimumkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi yang dapat digunakan adalah Peningkatan kualitas sumber daya manusia di pegawai pemerintahan melalui berbagai macam seminar, pelatihan, dan diklat-diklat baik teknis atau fungsional.

Sebagai pelaku utama pembangunan pertanian, dalam meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan usaha agribisnis, petani dan kelompoknya haruslah merancang, merekayasa, dan melakukan agribisnis sebagai upaya meningkatkan kuantitas dan kualitasnya untuk melakukan usaha secara mandiri dengan memanfaatkan peluang yang ada. Untuk pengembangan SDM petani inilah lembaga penyuluh pertanian diperlukan. Selain itu, merangkul organisasi pendukung sosialisasi teknologi pengembangan pangan lokal seperti PKK dan organisasi lain yang dapat dekat dan menyentuh masyarakat dalam membentuk kesadaran pribadi masyarakat untuk peningkatan ketahanan pangan.

Menggerakkan lembaga pendukung masyarakat agar lebih pro aktif dalam rangka

pemanfaatan pekarangan rumah, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi bahan pangan yang diproduksi dari pekarangan sendiri serta dapat menjual hasil produksi pekarangan tersebut, sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya. Jika mempunyai taraf hidup lebih baik, maka secara otomatis daya beli masyarakat juga akan meningkat.

Secara garis besar, hal ini sesuai dengan strategi pembangunan pertanian yang berkaitan dengan kesiapan lahan pertanian, lahan pertanian yang ada sebaiknya lebih ditingkatkan produktivitasnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya tentu dengan ketersediaan pangan yang terjamin dan dengan harga yang terjangkau.

BAB V

5.1. KESIMPULAN

Faktor kekuatan dari lingkungan internal mempunyai total skor sebesar 1,955 yang terdiri dari Komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap ketahanan pangan dengan skor terbesar pertama yaitu 0,489, kekuatan kedua dari faktor Luasnya lahan dan factor produksi pertanian dengan skor 0,403, posisi ini kemudian disusul faktor adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal yaitu sebesar 0,402 dan dilanjutkan dengan faktor terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah sebesar 0,306. Sementara itu faktor lain dari lingkungan internal yaitu faktor kelemahan memiliki total skor sebesar 2,689, faktor-faktor kelemahan itu terdiri dari faktor daya beli masyarakat rendah dengan skor terbesar yaitu 0,205 yang merupakan skor terbesar diantara lima faktor kelemahan yang ada. Skor kedua sebesar 0,167 faktor kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal, kemudian disusul faktor pola konsumsi masyarakat yang belum B2SA dengan skor 0,148, faktor belum optimalnya peran dewan ketahanan pangan dengan skor 0,121, sedangkan faktor yang terakhir adalah faktor SDM di lingkungan pegawai pemerintahan dengan skor 0,093.

Faktor posisi Kabupaten Sumba Timur dari faktor peluang memberikan pengaruh paling besar dengan skor sebesar 0,374, faktor berpengaruh kedua adalah perkembangan teknologi pengolahan pangan lokal dengan skor 0,290, faktor ketiga keberadaan jalan negara dan jalan provinsi dengan skor 0,274, faktor peluang terakhir yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur adalah faktor adanya dasar hukum dan kebijakan tentang peningkatan ketahanan pangan di Indonesia dengan skor 0,255.

Faktor ancaman dari faktor strategik eksternal yang mempengaruhi peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur memiliki total skor sebesar 2,485 dengan faktor ancaman terbesar sebesar 0,362 adalah faktor harga komoditas pangan strategis fluktuatif, disusul dengan skor 0,345 yaitu faktor regulasi pangan masih belum terpadu. perubahan iklim dengan skor 0,332, dan faktor perubahan situasi politik daerah merupakan faktor terakhir yang berpengaruh dengan skor sebesar 0,254.

Berdasarkan hasil analisis faktor internal dan eksternal di atas maka dilakukan analisis matrik SWOT, dengan hasil 1,221 sebagai titik x dan sebesar -0,101 sebagai titik y. Setelah

titik-titik tersebut dipertemukan, maka koordinatnya berada pada kuadran IV dimana pada posisi ini rekomendasi strategi yang dapat dilakukan adalah diversifikasi strategi, artinya sudah pada posisi yang baik namun masih menghadapi berbagai ancaman yang datang dari lingkungan eksternal.

Strategi peningkatan ketahanan pangan dapat dilakukan dengan lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Bimas dan Ketahanan Pangan, didukung dengan pihak pemerintah Kabupaten Sumba Timur dalam membuat kebijakan terkait upaya peningkatan ketahanan pangan daerah pengembangan kelompok pengolahan pangan lokal. Peningkatan SDM aparatur pemerintah dalam mendukung aplikasi teknologi pengolahan pangan lokal. Membuat kebijakan pangan yang terpadu dengan pemerintah daerah sebagai peran utama dalam upaya pengendalian harga bahan pokok serta mendekatkan sumber pangan dengan masyarakat dan kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi ketidakstabilan ketiga sub sistem ketahanan pangan. Semakin merangkul organisasi pendukung sosialisasi teknologi pengembangan pangan lokal.

5.2 Saran

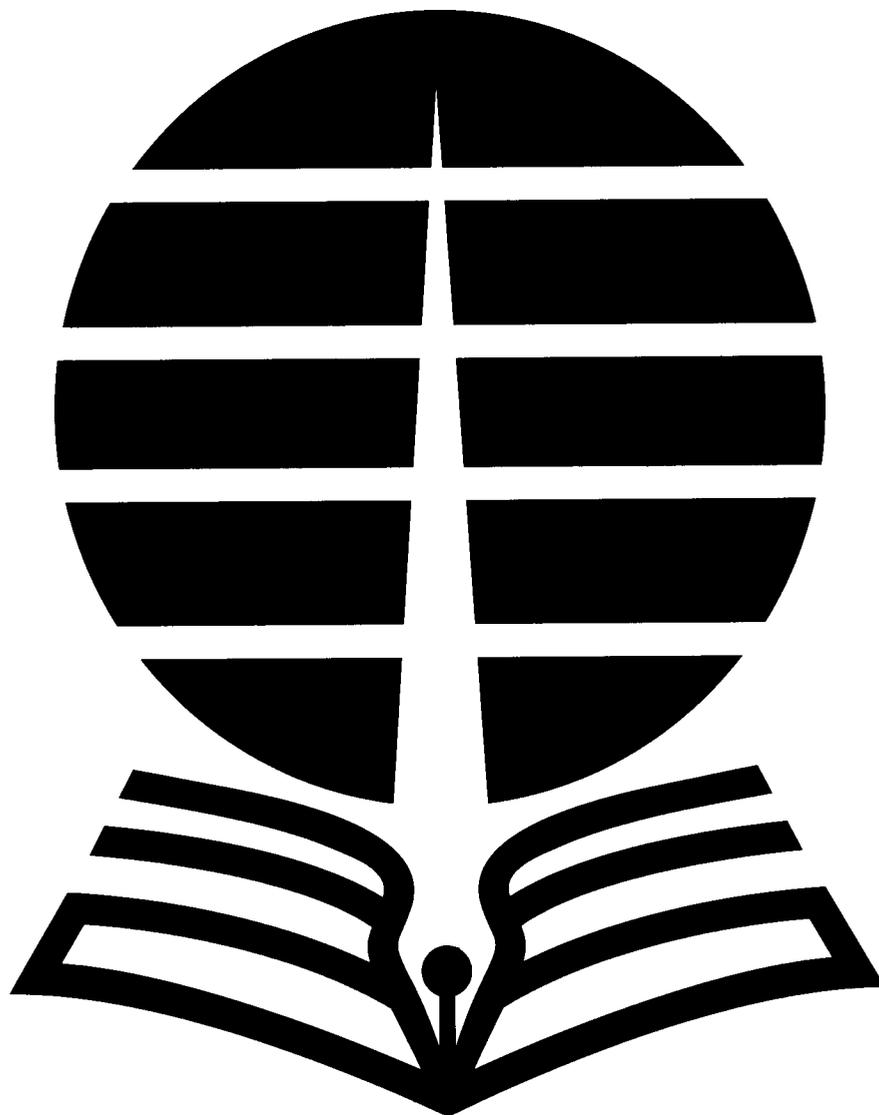
Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah Kabupaten Sumba Timur: Lebih mengoptimalkan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sebagai kunci dalam upaya peningkatan ketahanan pangan;
- b. Strategi yang perlu diambil dalam rangka percepatan Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumba Timur adalah Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan jalan memanfaatkan lahan/pekarangan sebagai sumber pangan.
- c. Bagi penelitian lebih lanjut: Melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan anggaran pembangunan ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia, A Food Security and Vulnearability Atlas Of Indonesia 2009 Dewan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian – Word Food Programe
2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nusa Tenggara Timur, A Food Security and Vulnearability Atlas Of NTT 2010 Pemerintah Propinsi NTT, Dewan Ketahanan Pangan
3. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Sumba Timur, A Food Security and Vulnearability Atlas Of Sumba Timur 2012 Badan Bimas dan Ketahanan pangan Kabupaten Sumba Timur 2013
4. Analisa Situasi Pangan Kabupaten Sumba Timur Keadaan Januari – Desember 2010
5. Analisa Situasi Pangan Kabupaten Sumba Timur Keadaan Januari – Desember 2011
6. Analisa Situasi Pangan Kabupaten Sumba Timur Keadaan Januari – Desember 2012
7. Analisa Situasi Pangan Kabupaten Sumba Timur Keadaan Januari – Desember 2013
8. Prosiding Konferensi DKP Tahun 2012, Sekretariat DKP 2012
9. Lampiran Prosiding Konferensi DKP Tahun 2012, DKP 2012
10. Damiri. 2001. Strategi Pengembangan Sektor Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Wonogiri Dalam Rangka Otda, Yogyakarta
11. Laporan Analisa Pola Konsumsi Kabupaten Sumba Timur. BBKP Sumba Timur
12. Prasetya.Irawan. 2010. Metodologi Penelitian Administrasi. Penerbit Universitas Terbuka
13. Nilasari.Senja.2014. Manejemen Strategi Itu Gampang Untuk Pemula dan Orang Awam. Penerbit Dunia Cerdas
14. Dr.Ir.Gatot Irianto,M.S,DAA. Menuju Indonesia Berdaulat Pangan

15. Suryana.Achmad. 2003. Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan Edisi 2003/2004. BPFE – Yogyakarta
16. John A. Pearce II,Richard B.Robinson Jr. Manajemen Strategi. Salemba Empat Edisi 12
17. Dr.Sangaji. Mamang Etta, M.Si, Dr.Sophiah, M.M,S.Pd. Metodologi Penelitian.Penerbit Andi Yogyakarta 2010
18. Suwarso.Muhamad. Manajemen Strategi Konsep dan Alat Analisa. UPP STIM YKPN Yogyakarta 2013
19. Prof.J.Supranto,MA,APU. Dr.IrLimakrisna. Nandan,MM, CQM. Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi
20. J.David Hunger. Thomas L. Wheelen. Manajemen Strategi 1996. ANDI



Lampiran 1

**KUISIONER ANALISIS SWOT UNTUK STRATEGI
PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

Dengan Hormat,

Bersama ini saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **UMBU NDILU HAMANDIKA**

NIM : **500009062**

Program Studi : **Magister Administrasi Publik**

Adalah mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang sedang mengadakan penelitian mengenai Analisis SWOT dan Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan di Badan Bimas dan Ketahanan Pangan Kab. Sumba Timur.

Maka daripada itu saya mohon agar Bapak/ Ibu berkenan untuk mengisi kuisisioner ini dengan jujur dan lengkap serta tanpa ada pengaruh dari orang lain.

Hormat Saya,

UMBU NDILU HAMANDIKA

A. IDENTITAS INFORMAN

Petunjuk: Isilah titik-titik yang tersedia dan lingkari (O) pada salah satu kolom yang tersedia

1. Nama :

2. Jenis Kelamin : L / P

3. Umur :

4. Jabatan :

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Tujuan

Mendapatkan penilaian dari informan terhadap tingkat kepentingan faktor-faktor strategis internal dan eksternal. Tingkat kepentingan yang dimaksud adalah berupa pemberian bobot dan peringkat terhadap berapa besar

faktor strategis tersebut menentukan keberhasilan dalam strategi peningkatan ketahanan pangan kabupaten Sumba Timur.

2. Petunjuk Pengisian

a. Pengisian kuesioner dilakukan secara tertulis oleh informan;

b. Jawaban merupakan jawaban pribadi;

c. Berilah bobot setiap faktor dengan metode *paired comparison* atau teknik perbandingan berpasangan. Pemberian nilai pada perbandingan berpasangan antara dua faktor secara relatif sesuai dengan tingkat kepentingan. Faktor-faktor strategis pada indikator A dan B diberi nilai

1, 2, atau 3 dan total bobot yang diberikan harus sama dengan 1; dan

d. Nilai 1 = faktor strategis pada indikator A kurang penting daripada faktor strategis pada indikator B.

Nilai 2 = faktor strategis pada indikator A sama penting daripada faktor strategis pada indikator B.

Nilai 3 = faktor strategis pada indikator A lebih penting daripada faktor strategis pada indikator B.

KUESIONER PEMBOBOTAN FAKTOR INTERNAL

No.	Keterangan	Mana yang lebih berpengaruh (A dan B)	Bobot
1.	A Komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap ketahanan pangan		
	B Terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah		
2.	A Komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap ketahanan pangan		
	B Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
3.	A Komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap ketahanan pangan		
	B Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
4.	A Komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap ketahanan pangan		
	B Adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal		
5.	A Komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap ketahanan pangan		
	B Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal		
6.	A Komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap ketahanan pangan		
	B Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam		
7.	A Komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap ketahanan pangan		
	B Terbatas SDM dibanding beban tugas		
8.	A Komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap ketahanan pangan		
	B belum optimalnya fungsi Dewan Ketahanan Pangan		
9.	A Komitmen pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap ketahanan pangan		
	B Daya beli masyarakat rendah		
10.	A Terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah		
	B Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		

11.	A Terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah		
	B Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
12.	A Terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah		
	B Adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal		
13.	A Terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah		
	B Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal		
14.	A Terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah		
	B Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam		
15.	A Terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah		
	B Terbatas SDM dibanding beban tugas		
16.	A Terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah		
	B belum optimalnya fungsi Dewan Ketahanan Pangan		
17.	A Terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah		
	B Daya beli masyarakat rendah		
18.	A Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
	B Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
19.	A Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
	B Adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal		
20.	A Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
	B Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal		
21.	A Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
	B Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam		
22.	A Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
	B Terbatas SDM dibanding beban tugas		
23.	A Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
	B belum optimalnya fungsi Dewan Ketahanan Pangan		
24.	A Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
	B Daya beli masyarakat rendah		
25.	A Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
	B Adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal		
26.	A Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		

	B Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal		
27.	A Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
	B Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam		
28.	A Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
	B Terbatas SDM dibanding beban tugas		
29.	A Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
	B belum optimalnya fungsi Dewan Ketahanan Pangan		
30.	A Luasnya lahan dan faktor produksi pertanian		
	B Daya beli masyarakat rendah		
31.	A Adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal		
	B Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal		
32.	A Adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal		
	B Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam		
33.	A Adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal		
	B Terbatas SDM dibanding beban tugas		
34.	A Adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal		
	B belum optimalnya fungsi Dewan Ketahanan Pangan		
35.	A Adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal		
	B Daya beli masyarakat rendah		
36.	A Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal		
	B Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam		
37.	A Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal		
	B Terbatas SDM dibanding beban tugas		
38.	A Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal		
	B belum optimalnya fungsi Dewan Ketahanan Pangan		
39.	A Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal		
	B Daya beli masyarakat rendah		
40.	A Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam		
	B Terbatas SDM dibanding beban tugas		
41.	A Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam		

	B belum optimalnya fungsi Dewan Ketahanan Pangan		
42.	A Pola konsumsi masyarakat yang belum beragam		
	B Daya beli masyarakat rendah		
43.	A Terbatas SDM dibanding beban tugas		
	B belum optimalnya fungsi Dewan Ketahanan Pangan		
44.	A Terbatas SDM dibanding beban tugas		
	B Daya beli masyarakat rendah		
45.	A belum optimalnya fungsi Dewan Ketahanan Pangan		
	B Daya beli masyarakat rendah		

KUESIONER PEMBOBOTAN FAKTOR EKSTERNAL

No.	Keterangan	Mana yang lebih berpengaruh (A dan B)	Bobot
1.	A Perkembangan teknologi pengolahan pangan lokal		
	B Adanya dasar hukum dan kebijakan tentang peningkatan ketahanan pangan di Indonesia		
2.	A Perkembangan teknologi pengolahan pangan lokal		
	B Keberadaan jalan negara dan jalan provinsi		
3.	A Perkembangan teknologi pengolahan pangan lokal		
	B Posisi Kabupaten Sumba Timur yang strategis		
4.	A Perkembangan teknologi pengolahan pangan lokal		
	B Regulasi pangan masih belum terpadu		
5.	A Perkembangan teknologi pengolahan pangan lokal		
	B Harga komoditas pangan strategis fluktuatif		
6.	A Perkembangan teknologi pengolahan pangan lokal		
	B Perubahan iklim		
7.	A Perkembangan teknologi pengolahan pangan lokal		
	B Perubahan situasi politik daerah		
8.	A Adanya dasar hukum dan kebijakan tentang peningkatan ketahanan pangan di Indonesia		
	B Keberadaan jalan negara dan jalan provinsi		
9.	A Adanya dasar hukum dan kebijakan tentang peningkatan ketahanan pangan di Indonesia		
	B Posisi Kabupaten Sumba Timur yang strategis		
10.	A Adanya dasar hukum dan kebijakan tentang peningkatan ketahanan pangan di Indonesia		
	B Regulasi pangan masih belum terpadu		
11.	A Adanya dasar hukum dan kebijakan tentang peningkatan ketahanan pangan di Indonesia		
	B Harga komoditas pangan strategis fluktuatif		
12.	A Adanya dasar hukum dan kebijakan tentang peningkatan ketahanan pangan di Indonesia		
	B Perubahan iklim		

13.	A Adanya dasar hukum dan kebijakan tentang peningkatan ketahanan pangan di Indonesia		
	B Perubahan situasi politik daerah		
14.	A Keberadaan jalan negara dan jalan provinsi		
	B Posisi Kabupaten Sumba Timur yang strategis		
15.	A Keberadaan jalan negara dan jalan provinsi		
	B Regulasi pangan masih belum terpadu		
16.	A Keberadaan jalan negara dan jalan provinsi		
	B Harga komoditas pangan strategis fluktuatif		
17.	A Keberadaan jalan negara dan jalan provinsi		
	B Perubahan iklim		
18.	A Keberadaan jalan negara dan jalan provinsi		
	B Perubahan situasi politik daerah		
19.	A Posisi Kabupaten Sumba Timur yang strategis		
	B Regulasi pangan masih belum terpadu		
20.	A Posisi Kabupaten Sumba Timur yang strategis		
	B Harga komoditas pangan strategis fluktuatif		
21.	A Posisi Kabupaten Sumba Timur yang strategis		
	B Perubahan iklim		
22.	A Posisi Kabupaten Sumba Timur yang strategis		
	B Perubahan situasi politik daerah		
23.	A Regulasi pangan masih belum terpadu		
	B Harga komoditas pangan strategis fluktuatif		
24.	A Regulasi pangan masih belum terpadu		
	B Perubahan iklim		
25.	A Regulasi pangan masih belum terpadu		
	B Perubahan situasi politik daerah		
26.	A Harga komoditas pangan strategis fluktuatif		
	B Perubahan iklim		
27.	A Harga komoditas pangan strategis fluktuatif		
	B Perubahan situasi politik daerah		
28.	A Perubahan iklim		
	B Perubahan situasi politik daerah		

PENENTUAN NILAI FAKTOR STRATEGIS INTERNAL DAN EKSTERNAL

Petunjuk Pengisian

Isilah kolom nilai sesuai dengan tingkat hubungan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan pangan di Kabupaten Sumba Timur sesuai dengan skala yang telah ditentukan.

Berilah tanda silang (X) pada angka:

3 = Cukup kuat (kekuatan minor)

4 = Sangat kuat (kekuatan utama)

Kekuatan	Tingkat Kekuatan			
	1	2	3	4
Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur terhadap Ketahanan Pangan				
Adanya Sumber Dana Setiap Tahunnya				
Terdapatnya kelembagaan ketahanan pangan daerah				
Adanya sosialisasi peningkatan ketahanan pangan yang optimal				
Luasnya Lahan dan Faktor Produksi Pertanian				

Berilah tanda silang (X) pada angka:

1 = Sangat lemah (kelemahan utama)

2 = Tidak terlalu lemah (kelemahan minor)

Kelemahan	Tingkat Kelemahan			
	1	2	3	4
Daya beli masyarakat rendah				
Kelembagaan pendukung masyarakat yang belum optimal				
Pola konsumsi masyarakat yang belum B2SA				
Terbatasnya SDM di bandingkan Beban Tugas yang Dilakukan				
Belum optimalnya fungsi Dewan Ketahanan Pangan				

Berilah tanda silang (X) pada angka:

1 = Respon dibawah rata-rata (jelek).

2 = Respon rata-rata

3 = Respon diatas rata-rata.

4 = Respon sangat baik (*superior*)

Peluang	Tingkat Respon			
	1	2	3	4
Perkembangan teknologi pengolahan pangan lokal				
Adanya dasar hukum dan kebijakan tentang peningkatan ketahanan pangan di Indonesia				
Posisi Kabupaten Sumba Timur yang strategis				
Keberadaan jalan negara dan jalan provinsi				

Ancaman	Tingkat Respon			
	1	2	3	4
Regulasi pangan masih belum terpadu				
Perubahan situasi politik daerah				
Perubahan iklim				
Harga komoditas pangan strategis fluktuatif				

Lampiran 2

**PENDALAMAN ANALISIS SWOT
STRATEGY PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

I. ANALISIS FAKTOR INTERNAL

A. Bidang Ketersediaan

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor *internal* (Faktor dari dalam Bidang Ketersediaan dan kerawanan pangan) yang berpengaruh terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumba Timur. (Internal= Kekuatan dan Kelemahan)

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor *Internal di subid Produksi dan ketersediaan* yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.

**PENDALAMAN ANALISIS SWOT
STRATEGY PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

B. Bidang Distribusi dan Harga

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor *internal* (Faktor dari dalam) di bidang *Distribusi dan Harga* yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur. (Internal= Kekuatan dan Kelemahan)

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor *internal* (Faktor dari dalam) di sub bidang *cadangan pangan* yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.

**PENDALAMAN ANALISIS SWOT
STRATEGY PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

C. Bidang Konsumsi

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor internal (Faktor dari dalam) di bidang **Konsumsi dan Keamanan Pangan** yang berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur. (Internal= Kekuatan dan Kelemahan)

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor internal (Faktor dari dalam) di bidang **Pola Konsumsi** yang berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.

- i.
- j.
- k.

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor internal (Faktor dari dalam) di sub bidang ***Mutu dan Keamanan Pangan*** yang berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.

Terima Kasih Atas
Kerjasamanya

Peneliti

Nara Sumber

Umbu Ndilu Hamandika

Sri Handayani Iye, STP

**PENDALAMAN ANALISIS SWOT
STRATEGY PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

II. ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL

A. Bidang Ketersediaan

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor *Eksternal* (Faktor dari Luar) di **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan pangan** yang berpengaruh terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sumba Timur. (Eksternal= Peluang dan Ancaman)

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor *Eksternal di subid Produksi dan ketersediaan* yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.

h.

i.

j.

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor *Eksternal* apa saja di sub bidang ***Kewaspadaan Pangan dan Gizi*** yang berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Terima Kasih Atas
Kerjasamanya

Peneliti

Nara Sumber

Umbu Ndilu Hamandika

Yulianus Keimarak, BSc

**PENDALAMAN ANALISIS SWOT
STRATEGY PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

B. Bidang Distribusi

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor *Eksternal* (Faktor dari Luar) di bidang *Distribusi* yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor *Eksternal* (Faktor dari Luar) di sub bidang *cadangan pangan* yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.

i.

j.

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor Eksternal (Faktor dari Luar) di sub bidang *Distribusi dan Harga Pangan* yang bisa berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Terima Kasih Atas
Kerjasamanya

Peneliti

Nara Sumber

Umbu Ndilu Hamandika

Abner Mage, STP, M.Si

**PENDALAMAN ANALISIS SWOT
STRATEGY PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN
DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

C. Bidang Konsumsi

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor Eksternal (Faktor dari Luar) di bidang **Konsumsi dan Keamanan Pangan** yang berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor Eksternal (Faktor dari Luar) di bidang **Pola Konsumsi** yang berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.

i.

j.

Menurut bapak/ibu/sdr apa saja faktor Eksternal (Faktor dari Luar) di sub bidang *Mutu dan Keamanan Pangan* yang berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Sumba Timur.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Terima Kasih Atas

Kerjasamanya

Peneliti

Nara Sumber

Umbu Ndilu Hamandika

Sri Handayani Iye, STP

Lampiran 3

Matriks IFE Informan 1

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Jumlah	Bobot
1	Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan		3	3	1	1	3	3	3	3	1	21	0.117
2	Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian	1		3	3	1	1	1	1	3	1	15	0.083
3	Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal	1	1		1	1	1	1	3	3	1	13	0.072
4	danya Sumber Dana Setiap Tahunnya	3	1	3		1	1	1	3	3	1	17	0.094
5	Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	3	3	3	3		1	1	3	3	1	21	0.117
6	Daya Beli Masyarakat Rendah	1	3	3	3	3		1	3	3	1	21	0.117
7	Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal	1	3	3	3	3	3		3	3	1	23	0.128
8	Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA	1	3	1	1	1	1	1		3	3	15	0.083
9	Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan	1	1	1	1	1	1	1	1		1	9	0.050
10	Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan	3	3	3	3	3	3	3	1	3		25	0.139
Jumlah												180	1.000

Keterangan

- A Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan
 B Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian
 C Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal
 D danya Sumber Dana Setiap Tahunnya
 E Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah
 F Daya Beli Masyarakat Rendah
 G Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal
 H Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA
 I Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan
 J Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan

Lampiran 3

Matriks IFE Informan 2

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Jumlah	Bobot
1	Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan	3	3	1	1	3	3	3	3	3	3	23	0.128
2	Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.050
3	Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal	3	3	3	1	3	3	3	3	3	1	23	0.128
4	danya Sumber Dana Setiap Tahunnya	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	25	0.139
5	Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	1	3	1	1	3	1	3	3	3	1	17	0.094
6	Daya Beli Masyarakat Rendah	1	3	1	1	3	3	3	3	3	1	19	0.106
7	Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal	1	3	1	1	1	1	3	3	3	1	15	0.083
8	Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA	1	3	1	1	1	1	1	3	3	1	11	0.061
9	Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan	1	3	1	1	1	1	1	3	3	1	13	0.072
10	Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	25	0.139
Jumlah												180	1.000

Keterangan

- A Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan
 B Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian
 C Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal
 D danya Sumber Dana Setiap Tahunnya
 E Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah
 F Daya Beli Masyarakat Rendah
 G Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal
 H Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA
 I Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan
 J Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan

Lampiran 3

Matriks IFE Informan 3

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Jumlah	Bobot
1	Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan		3	3	3	2	3	3	3	3	3	26	0.144
2	Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian	1		2	2	2	2	2	3	3	2	19	0.106
3	Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal	1	2		2	2	2	2	3	3	2	19	0.106
4	danya Sumber Dana Setiap Tahunnya	1	2	2		2	3	3	3	3	2	21	0.117
5	Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	2	2	2	2		3	3	3	3	2	22	0.122
6	Daya Beli Masyarakat Rendah	1	2	2	1	1		2	3	2	1	15	0.083
7	Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal	1	2	2	1	1	2		2	2	1	14	0.078
8	Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA	1	1	1	1	1	1	2		2	1	11	0.061
9	Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan	1	1	1	1	1	2	2	2		1	12	0.067
10	Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan	1	2	2	2	2	3	3	3	3		21	0.117
Jumlah												180	1.000

Keterangan

- A Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan
- B Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian
- C Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal
- D danya Sumber Dana Setiap Tahunnya
- E Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah
- F Daya Beli Masyarakat Rendah
- G Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal
- H Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA
- I Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan
- J Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan

Lampiran 3

Matriks IFE Informan 4

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Jumlah	Bobot
1	Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan		3	3	2	3	2	3	3	3	3	25	0.139
2	Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian	1		3	2	3	2	3	3	3	2	22	0.122
3	Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal	1	1		1	3	2	3	3	3	3	20	0.111
4	danya Sumber Dana Setiap Tahunnya	2	2	3		3	2	3	3	3	2	23	0.128
5	Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	1	1	1	1		2	2	2	3	2	15	0.083
6	Daya Beli Masyarakat Rendah	2	2	2	2	2		2	2	2	2	18	0.100
7	Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal	1	1	1	1	2	2		3	3	2	16	0.089
8	Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA	1	1	1	1	2	2	1		3	1	13	0.072
9	Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan	1	1	1	1	1	2	1	1		2	11	0.061
10	Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan	1	2	1	2	2	2	2	3	2		17	0.094
Jumlah												180	1.000

Keterangan

- A Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan
- B Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian
- C Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal
- D danya Sumber Dana Setiap Tahunnya
- E Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah
- F Daya Beli Masyarakat Rendah
- G Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal
- H Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA
- I Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan
- J Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan

Lampiran 3

Matriks IFE Informan 5

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Jumlah	Bobot
1	Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan		3	3	2	3	2	3	3	3	3	25	0.139
2	Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian	1		3	3	1	1	1	1	3	1	15	0.083
3	Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal	1	1		1	3	3	3	3	3	1	19	0.106
4	danya Sumber Dana Setiap Tahunnya	2	1	3		2	3	3	3	3	2	22	0.122
5	Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	1	3	1	2		3	3	3	3	2	21	0.117
6	Daya Beli Masyarakat Rendah	2	3	1	1	1		2	2	2	2	16	0.089
7	Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal	1	3	1	1	1	2		3	3	2	17	0.094
8	Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA	1	3	1	1	1	2	1		3	1	14	0.078
9	Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan	1	1	1	1	1	2	1	1		2	11	0.061
10	Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan	1	3	3	2	2	2	2	3	2		20	0.111
Jumlah												180	1.000

Keterangan

- A Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan
 B Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian
 C Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal
 D danya Sumber Dana Setiap Tahunnya
 E Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah
 F Daya Beli Masyarakat Rendah
 G Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal
 H Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA
 I Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan
 J Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan

Lampiran 3

Matriks IFE Informan 6

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Jumlah	Bobot
1	Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan	3	3	3	1	1	3	3	3	3	1	21	0.117
2	Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0.050
3	Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal	1	3	2	2	2	2	2	3	3	2	20	0.111
4	danya Sumber Dana Setiap Tahunnya	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	24	0.133
5	Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	3	3	2	2	2	3	3	3	3	2	24	0.133
6	Daya Beli Masyarakat Rendah	1	3	2	1	1	2	2	2	2	2	16	0.089
7	Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal	1	3	2	1	1	2	3	3	3	2	18	0.100
8	Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA	1	3	1	1	1	2	1	3	3	1	14	0.078
9	Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan	1	3	1	1	1	2	1	1	2	2	13	0.072
10	Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	21	0.117
Jumlah												180	1.000

Keterangan

- A Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan
- B Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian
- C Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal
- D danya Sumber Dana Setiap Tahunnya
- E Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah
- F Daya Beli Masyarakat Rendah
- G Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal
- H Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA
- I Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan
- J Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan

Lampiran 3

Matriks IFE Informan 7

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Jumlah	Bobot
1	Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan	3	3	1	3	3	3	3	3	3	1	23	0.128
2	Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian	1	3	3	1	1	2	3	3	3	1	18	0.100
3	Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal	1	1	3	1	3	3	2	3	3	2	19	0.106
4	danya Sumber Dana Setiap Tahunnya	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2	24	0.133
5	Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	1	3	1	1	3	1	3	2	3	2	17	0.094
6	Daya Beli Masyarakat Rendah	1	3	1	1	3	2	2	2	2	2	17	0.094
7	Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal	1	2	2	1	1	2	3	3	3	2	17	0.094
8	Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA	1	1	1	1	2	2	1	3	3	1	13	0.072
9	Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan	1	1	1	1	1	2	1	1	3	2	11	0.061
10	Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan	3	3	2	2	2	2	2	3	2	3	21	0.117
	Jumlah											180	1.000

Keterangan

- A Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan
 B Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian
 C Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal
 D danya Sumber Dana Setiap Tahunnya
 E Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah
 F Daya Beli Masyarakat Rendah
 G Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal
 H Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA
 I Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan
 J Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan

Lampiran 3

Matriks IFE Informan 8

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Jumlah	Bobot
1	Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan		3	3	1	2	3	3	3	3	1	22	0.122
2	Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian	1		3	3	2	2	2	1	1	1	16	0.089
3	Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal	1	1		1	2	2	2	3	3	1	16	0.089
4	danya Sumber Dana Setiap Tahunnya	3	1	3		2	3	3	3	3	1	22	0.122
5	Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	2	2	2	2		3	3	3	3	1	21	0.117
6	Daya Beli Masyarakat Rendah	1	2	2	1	1		2	3	3	1	16	0.089
7	Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal	1	2	2	1	1	2		3	3	1	16	0.089
8	Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA	1	3	1	1	1	1	1		1	3	13	0.072
9	Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan	1	3	1	1	1	1	1	3		1	13	0.072
10	Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan	3	3	3	3	3	3	3	1	3		25	0.139
Jumlah												180	1.000

Keterangan

- A Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan
- B Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian
- C Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal
- D danya Sumber Dana Setiap Tahunnya
- E Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah
- F Daya Beli Masyarakat Rendah
- G Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal
- H Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA
- I Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan
- J Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan

Lampiran 3

Matriks IFE Informan 9

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Jumlah	Bobot
1	Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan		3	3	3	2	3	3	3	3	3	26	0.144
2	Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian	1		3	3	2	2	2	1	1	1	16	0.089
3	Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal	1	1		1	3	3	2	3	3	2	19	0.106
4	danya Sumber Dana Setiap Tahunnya	1	1	3		2	3	3	3	3	2	21	0.117
5	Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	2	2	1	2		3	3	3	3	2	21	0.117
6	Daya Beli Masyarakat Rendah	1	2	1	1	1		2	2	2	2	14	0.078
7	Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal	1	2	2	1	1	2		2	2	1	14	0.078
8	Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA	1	3	1	1	1	2	2		1	1	13	0.072
9	Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan	1	3	1	1	1	2	2	3		1	15	0.083
10	Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan	1	3	2	2	2	2	3	3	3		21	0.117
Jumlah												180	1.000

Keterangan

- A Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan
- B Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian
- C Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal
- D danya Sumber Dana Setiap Tahunnya
- E Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah
- F Daya Beli Masyarakat Rendah
- G Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal
- H Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA
- I Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan
- J Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan

Lampiran 3

Matriks IFE Informan 10

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Jumlah	Bobot
1	Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	26	0.144
2	Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian	1	3	3	1	1	1	1	1	1	2	14	0.078
3	Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal	1	1	3	1	3	3	3	3	3	2	20	0.111
4	danya Sumber Dana Setiap Tahunnya	1	1	3	2	3	3	3	3	3	2	21	0.117
5	Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	2	3	1	2	3	3	3	3	3	2	22	0.122
6	Daya Beli Masyarakat Rendah	1	3	1	1	1	2	2	2	3	1	15	0.083
7	Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal	1	3	1	1	1	2	3	3	3	1	16	0.089
8	Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA	1	3	1	1	1	2	1	3	1	1	12	0.067
9	Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	13	0.072
10	Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	21	0.117
Jumlah												180	1.000

Keterangan

- A Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan
- B Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian
- C Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal
- D danya Sumber Dana Setiap Tahunnya
- E Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah
- F Daya Beli Masyarakat Rendah
- G Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal
- H Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA
- I Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan
- J Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan

Lampiran 4

REKAPITULASI IFE															
No	Faktor Strategik Internal	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	Jumlah	Bobot	Peringkat	Skor
1	Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan	0.117	0.128	0.144	0.139	0.139	0.117	0.128	0.122	0.144	0.144	1.322	0.132		0.489
2	Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian	0.083	0.05	0.106	0.122	0.083	0.05	0.1	0.089	0.089	0.078	0.850	0.085	3.7	0.306
3	Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal	0.072	0.128	0.106	0.111	0.106	0.111	0.106	0.089	0.105	0.111	1.045	0.105	3.6	0.355
4	danya Sumber Dana Setiap Tahunnya	0.095	0.139	0.117	0.128	0.122	0.133	0.133	0.122	0.117	0.117	1.128	0.113	3.4	0.403
5	Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	0.117	0.094	0.122	0.083	0.117	0.133	0.094	0.117	0.117	0.122	1.116	0.112	3.3	0.402
6	Daya Beli Masyarakat Rendah	0.17	0.106	0.083	0.1	0.089	0.089	0.094	0.089	0.078	0.083	0.981	0.098	3.6	0.167
7	Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal	0.128	0.083	0.078	0.089	0.094	0.1	0.094	0.089	0.078	0.089	0.922	0.092	1.8	0.148
8	Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA	0.083	0.061	0.061	0.072	0.078	0.078	0.073	0.072	0.072	0.069	0.719	0.072	1.6	0.093
9	Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan	0.05	0.072	0.066	0.061	0.061	0.072	0.061	0.072	0.083	0.072	0.67	0.067	1.3	0.121
10	Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan	0.139	0.139	0.117	0.095	0.111	0.117	0.117	0.139	0.117	0.117	1.208	0.121	1.8	0.205
														1.7	

Lampiran 5

REKAPITULASI PERINGKAT IFE

KET	Faktor Strategik Internal	I 1	I 2	I 3	I 4	I 5	I 6	I 7	I 8	I 9	I 10	Mean
KEKUATAN	Komitmen Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Terhadap Ketahanan Pangan	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3.7
	Luasnya Lahan dan Factor Produksi Pertanian	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3.6
	Adanya Sosialisasi Peningkatan Ketahanan Pangan Yang Optimal	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3.4
	danya Sumber Dana Setiap Tahunnya	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3.3
	Terdapatnya Kelembagaan Ketahanan Pangan Daerah	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	3.6
KELEMAHAN	Daya Beli Masyarakat Rendah	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1.8
	Kelembagaan Pendukung Masyarakat Belum Optimal	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	1.6
	Pola Komsumsi Masyarakat Yang Belum B2SA	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1.3
	Belum Optimalnya Peran Dewan Ketahanan Pangan	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	1.8
	Terbatasnta SDM di Bandingkan Beban Tugas Yang Harus Dilaksanakan	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2	1.7

Lampiran 6

Matriks EFE Informan 1

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	Jumlah	Bobot
1	Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis		3	3	3	3	1	1	1	15	0.134
2	Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal	1		3	1	3	1	3	3	15	0.134
3	Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi	1	1		1	3	1	1	1	9	0.080
4	Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia	3	3	1		3	1	3	1	15	0.134
5	Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif	3	3	3	3		3	3	3	21	0.188
6	Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu	1	1	1	1	1		1	3	9	0.080
7	Perubahan Iklim	1	1	3	3	3	1		3	15	0.134
8	Perubahan Situasi Politik Daerah	1	3	3	3	1	1	1		13	0.116
Jumlah										112	1.000

Keterangan

- A Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis
- B Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal
- C Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi
- D Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia
- E Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif
- F Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu
- G Perubahan Iklim
- H Perubahan Situasi Politik Daerah

Lampiran 6

Matriks EFE Informan 2

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	Jumlah	Bobot
1	Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis		1	1	1	1	1	1	1	7	0.063
2	Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal	3		3	3	3	3	3	3	21	0.188
3	Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi	1	1		3	1	1	1	3	11	0.098
4	Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia	1	3	3		3	3	3	3	19	0.170
5	Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif	1	1	3	3		1	3	3	15	0.134
6	Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu	1	1	3	3	3		3	3	17	0.152
7	Perubahan Iklim	1	1	3	3	1	1		3	13	0.116
8	Perubahan Situasi Politik Daerah	1	1	1	3	1	1	1		9	0.080
Jumlah										112	1.000

Keterangan

- A Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis
- B Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal
- C Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi
- D Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia
- E Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif
- F Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu
- G Perubahan Iklim
- H Perubahan Situasi Politik Daerah

Lampiran 6

Matriks EFE Informan 3

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	Jumlah	Bobot
1	Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis		3	2	2	2	2	2	2	15	0.134
2	Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal	3		3	1	2	2	1	1	13	0.116
3	Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi	1	3		2	2	2	1	2	13	0.116
4	Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia	1	1	2		2	1	1	1	9	0.080
5	Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif	2	3	2	2		3	2	2	16	0.143
6	Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu	2	2	2	2	1		2	2	13	0.116
7	Perubahan Iklim	3	3	3	2	2	2		2	17	0.152
8	Perubahan Situasi Politik Daerah	3	3	2	2	2	2	2		16	0.143
Jumlah										112	1.000

Keterangan

- A Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis
- B Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal
- C Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi
- D Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia
- E Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif
- F Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu
- G Perubahan Iklim
- H Perubahan Situasi Politik Daerah

Lampiran 6

Matriks EFE Informan 4

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	Jumlah	Bobot
1	Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis		2	1	2	1	1	2	2	11	0.098
2	Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal	1		3	2	2	1	2	3	14	0.125
3	Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi	1	1		2	1	1	1	3	10	0.089
4	Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia	3	3	3		2	2	3	3	19	0.170
5	Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif	3	2	3	3		2	2	3	18	0.161
6	Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu	2	2	3	3	2		3	3	18	0.161
7	Perubahan Iklim	2	1	3	2	1	2		2	13	0.116
8	Perubahan Situasi Politik Daerah	1	1	1	2	1	1	2		9	0.080
Jumlah										112	1.000

Keterangan

- A Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis
- B Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal
- C Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi
- D Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia
- E Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif
- F Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu
- G Perubahan Iklim
- H Perubahan Situasi Politik Daerah

Lampiran 6

Matriks EFE Informan 5

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	Jumlah	Bobot
1	Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis		3	2	2	2	2	2	2	15	0.134
2	Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal	3		3	1	2	2	1	3	15	0.134
3	Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi	1	1		2	2	2	1	3	12	0.107
4	Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia	1	3	2		2	1	1	3	13	0.116
5	Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif	2	3	2	2		3	2	3	17	0.152
6	Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu	2	2	2	2	1		2	3	14	0.125
7	Perubahan Iklim	3	3	3	2	2	2		2	17	0.152
8	Perubahan Situasi Politik Daerah	1	1	1	2	1	1	2		9	0.080
Jumlah										112	1.000

Keterangan

- A Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis
- B Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal
- C Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi
- D Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia
- E Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif
- F Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu
- G Perubahan Iklim
- H Perubahan Situasi Politik Daerah

Lampiran 6

Matriks EFE Informan 7

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	Jumlah	Bobot
1	Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis		3	2	2	2	2	2	2	15	0.134
2	Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal	3		3	1	3	1	3	3	17	0.152
3	Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi	1	3		2	2	2	1	2	13	0.116
4	Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia	1	1	2		2	1	1	1	9	0.080
5	Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif	3	3	2	2		1	3	3	17	0.152
6	Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu	1	2	2	2	3		3	3	16	0.143
7	Perubahan Iklim	1	3	3	2	1	1		3	14	0.125
8	Perubahan Situasi Politik Daerah	1	3	2	2	1	1	1		11	0.098
Jumlah										112	1.000

Keterangan

- A Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis
- B Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal
- C Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi
- D Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia
- E Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif
- F Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu
- G Perubahan Iklim
- H Perubahan Situasi Politik Daerah

Lampiran 6

Matriks EFE Informan 8

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	Jumlah	Bobot
1	Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis		3	3	3	2	2	2	2	17	0.152
2	Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal	1		3	1	2	2	2	3	14	0.125
3	Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi	1	1		1	2	2	1	3	11	0.098
4	Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia	3	3	1		2	1	3	3	16	0.143
5	Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif	2	3	2	2		3	2	3	17	0.152
6	Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu	2	2	2	2	1		3	3	15	0.134
7	Perubahan Iklim	2	1	3	2	1	2		2	13	0.116
8	Perubahan Situasi Politik Daerah	1	1	1	2	1	1	2		9	0.080
Jumlah										112	1.000

Keterangan

- A Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis
- B Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal
- C Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi
- D Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia
- E Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif
- F Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu
- G Perubahan Iklim
- H Perubahan Situasi Politik Daerah

Lampiran 6

Matriks EFE Informan 9

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	Jumlah	Bobot
1	Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis		3	2	2	2	2	2	2	15	0.134
2	Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal	3		3	1	3	1	3	3	17	0.152
3	Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi	1	1		2	2	2	1	3	12	0.107
4	Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia	1	3	2		3	1	3	3	16	0.143
5	Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif	3	3	2	2		3	3	3	19	0.170
6	Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu	1	1	2	2	1		2	3	12	0.107
7	Perubahan Iklim	1	1	3	2	2	1		3	13	0.116
8	Perubahan Situasi Politik Daerah	1	1	1	2	1	1	1		8	0.071
Jumlah										112	1.000

Keterangan

- A Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis
- B Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal
- C Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi
- D Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia
- E Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif
- F Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu
- G Perubahan Iklim
- H Perubahan Situasi Politik Daerah

Lampiran 6

Matriks EFE Informan 10

No	Faktor Strategik Internal	A	B	C	D	E	F	G	H	Jumlah	Bobot
1	Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis		3	2	2	2	1	1	1	12	0.107
2	Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal	3		3	1	3	3	3	3	19	0.170
3	Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi	1	1		2	2	1	1	3	11	0.098
4	Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia	1	3	2		3	3	3	3	18	0.161
5	Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif	1	1	3	3		1	3	3	15	0.134
6	Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu	1	1	2	2	3		3	3	15	0.134
7	Perubahan Iklim	1	1	3	3	1	1		3	13	0.116
8	Perubahan Situasi Politik Daerah	1	1	1	3	1	1	1		9	0.080
Jumlah										112	1.000

Keterangan

- A Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis
- B Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal
- C Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi
- D Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia
- E Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif
- F Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu
- G Perubahan Iklim
- H Perubahan Situasi Politik Daerah

Lampiran 7

REKAPITULASI EFE

No	Faktor Strategik Eksternal	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	Jumlah	Bobot	Peringkat	Skor
1	Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis	0.134	0.062	0.134	0.098	0.134	0.116	0.134	0.152	0.134	0.107	1.205	0.121	3.1	0.374
2	Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal	0.134	0.188	0.116	0.125	0.134	0.152	0.152	0.125	0.152	0.17	1.448	0.145	2	0.290
3	Keberadaan Jalan Negara dan Jalan Propinsi	0.08	0.098	0.116	0.089	0.107	0.107	0.116	0.098	0.107	0.098	1.016	0.102	2.7	0.274
4	Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia	0.134	0.17	0.08	0.17	0.116	0.143	0.08	0.143	0.143	0.161	1.34	0.134	1.9	0.255
5	Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif	0.188	0.134	0.143	0.161	0.152	0.188	0.152	0.152	0.17	0.134	1.574	0.157	2.3	0.362
6	Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu	0.08	0.152	0.116	0.161	0.125	0.08	0.143	0.134	0.107	0.134	1.232	0.123	2.8	0.345
7	Perubahan Iklim	0.134	0.116	0.152	0.116	0.152	0.134	0.125	0.116	0.116	0.116	1.277	0.128	2.6	0.332
8	Perubahan Situasi Politik Daerah	0.116	0.08	0.143	0.08	0.08	0.08	0.098	0.08	0.071	0.08	0.908	0.091	2.8	0.254

I1 : Matriks EFE Informan 1

I2 : Matriks EFE Informan 2

I3 : Matriks EFE Informan 3

I4 : Matriks EFE Informan 4

I5 : Matriks EFE Informan 5

I6 : Matriks EFE Informan 6

I7 : Matriks EFE Informan 7

I8 : Matriks EFE Informan 8

I9 : Matriks EFE Informan 9

I10: Matriks EFE Informan 10

Lampiran 8

REKAPITULASI EFE												
KET	Faktor Strategik Eksternal	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	Mean
PELUANG	Posisi Kabupaten Sumba Timur yang Strategis	3	2	3	3	3	4	3	4	3	3	3.1
	Perkembangan Tehnologi Pangan Lokal	2	2	2	1	1	2	2	2	3	3	2
	Keberadaan Jalan Negara dean Jalan Propinsi	3	2	2	4	2	4	3	2	2	3	2.7
	Adanya Dasar Hukum dan Kebijakan Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan di Indonesia	3	1	1	3	2	1	2	1	3	2	1.9
ANCAMAN	Harga Komuditas Pangan Strategis Fluktuatif	2	2	2	2	2	2	3	2	2	4	2.3
	Regulasi Pangan Masih Belum Terpadu	3	1	3	4	3	2	3	3	3	3	2.8
	Perubahan Iklim	2	2	3	4	3	3	2	2	2	3	2.6
	Perubahan Situasi Politik Daerah	3	2	3	4	3	3	2	3	2	3	2.8